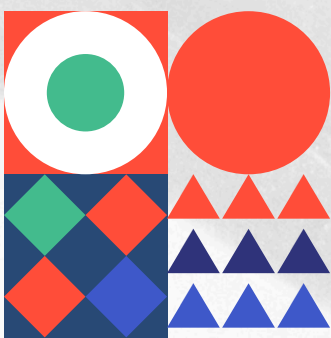
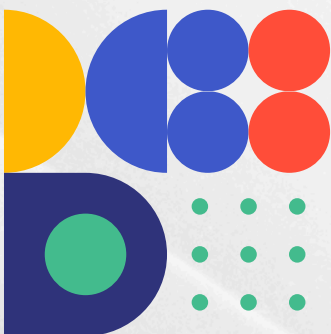
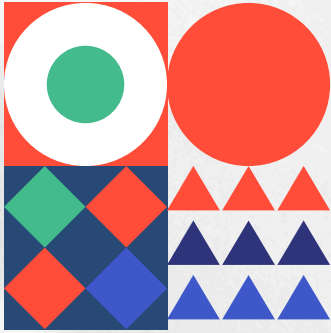




wonosobo
the soul of java

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

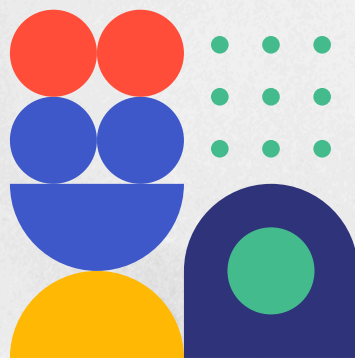
LPPD 2025 KABUPATEN WONOSOBO

LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025



wonosobo
the soul of java

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo selama satu tahun anggaran, yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

LPPD ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden. Laporan ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

LPPD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 ini memuat informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan sepanjang tahun, realisasi anggaran, capaian kinerja, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini juga memberikan gambaran umum mengenai keberhasilan dan tantangan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas, LPPD ini juga mengedepankan transparansi dan objektivitas dalam penyampaian hasil penyelenggaraan pemerintahan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat, serta menjadi acuan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dalam aspek fiskal, administratif, maupun pelaksanaan program. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran dari Pemerintah Pusat sangat kami harapkan guna menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan LPPD ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan di masa depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wonosobo, 31 Maret 2026

BUPATI WONOSOBO



H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum	I-1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah	I-1
B. Data Geografis Wilayah	I-4
C. Jumlah Penduduk	I-13
D. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	I-14
E. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai	I-15
F. Realisasi APBD	I-19
G. Alokasi dan Realisasi Belanja Urusan	I-22
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I-36
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I-36
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	I-56
C. Program Pembangunan Daerah	I-64
D. Kegiatan Pembangunan Daerah	I-81
1.1.3 Standar Pelayanan Minimal	I-86
BAB II CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	II-1
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-1
A. Indeks Pembangunan Manusia	II-1
B. Angka Kemiskinan	II-11
C. Angka Pengangguran	II-18
D. Pertumbuhan Ekonomi	II-20
E. Pendapatan Per Kapita	II-20
F. Ketimpangan Pendapatan	II-21
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-24
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-63
BAB III CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN	III-1
BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo	I-5
Tabel 1.1.2 Pembagian Kemiringan Wilayah	I-6
Tabel 1.1.3 Morfologi Kabupaten Wonosobo	I-10
Tabel 1.1.4 Stratigrafi Kabupaten Wonosobo	I-11
Tabel 1.1.5 Bendung, Sungai dan Daerah Irigasi	I-12
Tabel 1.1.6 Data Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2025	I-13
Tabel 1.1.7 Jumlah Desa dan Kelurahan	I-14
Tabel 1.1.8 Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	I-15
Tabel 1.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I-19
Tabel 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	II-1
Tabel 2.1.2 Angka Kemiskinan	II-11
Tabel 2.1.3 Angka Pengangguran	II-18
Tabel 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	II-20
Tabel 2.1.5 Pendapatan Per Kapita	II-20
Tabel 2.1.6 Ketimpangan Pendapatan	II-21
Tabel 2.2.1 Pendidikan	II-24
Tabel 2.2.2 Kesehatan	II-27
Tabel 2.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-30
Tabel 2.2.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-33
Tabel 2.2.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas	II-36
Tabel 2.2.6 Sosial	II-39
Tabel 2.2.7 Tenaga Kerja	II-42
Tabel 2.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-45
Tabel 2.2.9 Pangan	II-48
Tabel 2.2.10 Pertanahan	II-50
Tabel 2.2.11 Lingkungan Hidup	II-52
Tabel 2.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-55
Tabel 2.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-58
Tabel 2.2.14 Pengendalian Penduduk dan KB	II-60
Tabel 2.2.15 Perhubungan	II-62
Tabel 2.2.16 Komunikasi dan Informatika	II-64
Tabel 2.2.17 Koperasi dan UMKM	II-66
Tabel 2.2.18 Penanaman Modal	II-68
Tabel 2.2.19 Kepemudaan dan Olahraga	II-70
Tabel 2.2.20 Statistik	II-72
Tabel 2.2.21 Persandian	II-73
Tabel 2.2.22 Kebudayaan	II-74
Tabel 2.2.23 Perpustakaan	II-76
Tabel 2.2.24 Kearsipan	II-78
Tabel 2.2.25 Kelautan dan Perikanan	II-80
Tabel 2.2.26 Pariwisata	II-82
Tabel 2.2.27 Pertanian	II-84
Tabel 2.2.28 Kehutanan	II-86
Tabel 2.2.29 Energi dan Sumber Daya Mineral	II-88

Tabel 2.2.30 Perdagangan	II-90
Tabel 2.2.31 Perindustrian	II-92
Tabel 2.2.32 Transmigrasi	II-94
 Tabel 2.3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	 II-63
Tabel 2.3.2 Efisiensi dan Efektivitas Kinerja	II-65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1 Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo.....	I-5
Gambar 1.1.2 Peta Topografi Kabupaten Wonosobo.....	I-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

I. PEMBENTUKAN DAERAH

Kabupaten Wonosobo dibentuk bersama 27 kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

II. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39).

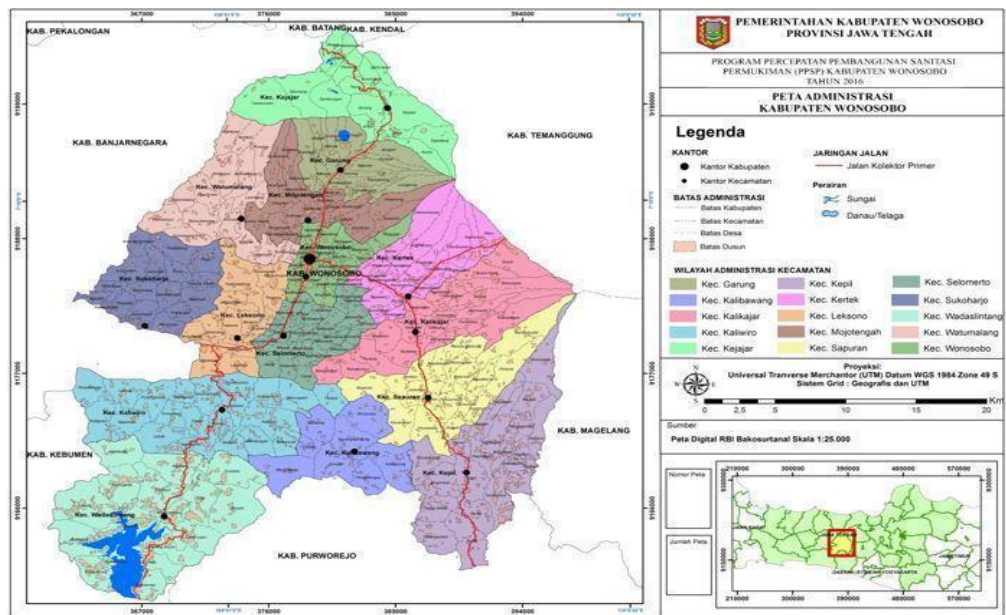
B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

I. Batas Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 1.011,62 Km², secara administratif, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan kabupaten tetangga, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Gambar 1.1.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo



(Sumber: Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo)

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berada pada 70.11'.13" dan 70.36'.40" garis Lintang Selatan (LS) serta 1090.43'.19" dan 1100.04'.40" garis Bujur Timur (BT). Secara geografis, Kabupaten Wonosobo berada di tengah wilayah Jawa Tengah, bahkan berada pada tengahnya Pulau Jawa. Wilayah Wonosobo dilintasi jalur tengah. Kabupaten Wonosobo yang merupakan wilayah jalur transit dan penghubung antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cilacap dan PKN Semarang. Dilalui jalur penghubung PKN Cilacap-PKN Semarang dan PKN Yogyakarta serta koridor KSPN Borobudur-Dieng. Kondisi ini juga menunjukkan adanya letak strategis ekonomi yang harus ditangkap peluangnya sebagai jalur yang dilalui tersebut.

II. Luas Wilayah

Secara administratif, Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan dan 236 desa dan 29 kelurahan.

Tabel 1.1.1
Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa dan Kelurahan
1	Wonosobo	29,28	2,89	7	13	20

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa dan Kelurahan
2	Kertek	63,66	6,29	19	2	21
3	Selomerto	41,44	4,10	22	2	24
4	Leksono	45,10	4,46	13	1	14
5	Garung	53,89	5,33	14	1	15
6	Mojotengah	48,94	4,84	16	3	19
7	Kejajar	65,38	6,46	15	1	16
8	Watumalang	64,57	6,38	15	1	16
9	Sapuran	74,92	7,41	16	1	17
10	Kalikajar	80,52	7,96	18	1	19
11	Kepil	100,23	9,91	20	1	21
12	Kaliwiro	101,45	10,03	20	1	21
13	Wadaslintang	133,28	13,17	16	1	17
14	Sukoharjo	56,77	5,61	17	-	17
15	Kalibawang	52,20	5,16	8	-	8
Jumlah		1.011,62	100,00	236	29	265

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2025

III. Topografi

Ditinjau dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ciri perbukitan sampai pegunungan dengan ketinggian lokasi antara 250 – 2.250 mdpl di atas permukaan laut. Kelerengan merupakan suatu kemiringan tanah dimana sudut kemiringan dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal dan dinyatakan dalam persen (%). Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 5 wilayah kemiringan, yaitu:

Tabel 1.1.2
Pembagian Wilayah di Kabupaten Wonosobo

No	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Wilayah
1.	0 - 8 %	29.800,82	Semua Kecamatan
2.	8 - 15 %	46.162,01	Semua Kecamatan
3.	15 – 25 %	17.469,46	Semua Kecamatan
4.	25 – 40 %	6.356,73	Semua Kecamatan
5.	>40 %	672,73	Semua Kecamatan Kecuali Kecamatan Leksono, Kecamatan Selomerto, dan Kecamatan Wonosobo

Sumber: Bappeda Kabupaten Wonosobo (diolah), 2025

Variasi kemiringan lereng di Kabupaten Wonosobo memberikan dampak positif bagi pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam seperti sektor pariwisata,

pertanian dan perkembangan. Sedangkan dampak negatifnya dalam hal pengembangan wilayah dan potensi bencana alam gerakan tanah/ tanah longsor.

IV. Struktur Geologi

Berdasarkan pembagian zona fisiografi Pulau Jawa menurut Van Bemmelen (1949), wilayah Kabupaten Wonosobo berada pada jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan bagian utara dan terletak di bagian tengah dari zona tersebut. Kawasan ini didominasi oleh endapan gunung api yang terbentuk pada periode Kuartar. Jejak aktivitas vulkanik pada masa tersebut masih dapat dilihat dari bentuk kerucut gunung api seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sementara itu, di kawasan lain terdapat kompleks gunung api Dieng yang berusia lebih tua, yang meninggalkan sisa aktivitas erupsi berupa dataran tinggi atau plateau.

Secara fisiografis, Wonosobo berada di bagian timur Depresi Serayu yang terbentuk akibat proses orogenesis dan epirogenesa, yang kemudian diikuti oleh aktivitas vulkanisme serta proses denudasi yang berlangsung relatif cepat. Pada bagian timur Depresi Serayu terdapat Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro yang terbentuk pada zaman Kuartar sekitar $\pm 1,8$ juta tahun yang lalu. Rangkaian gunung api ini kemudian berlanjut dan terhubung dengan kompleks gunung api Dieng hingga Rogojembangan.

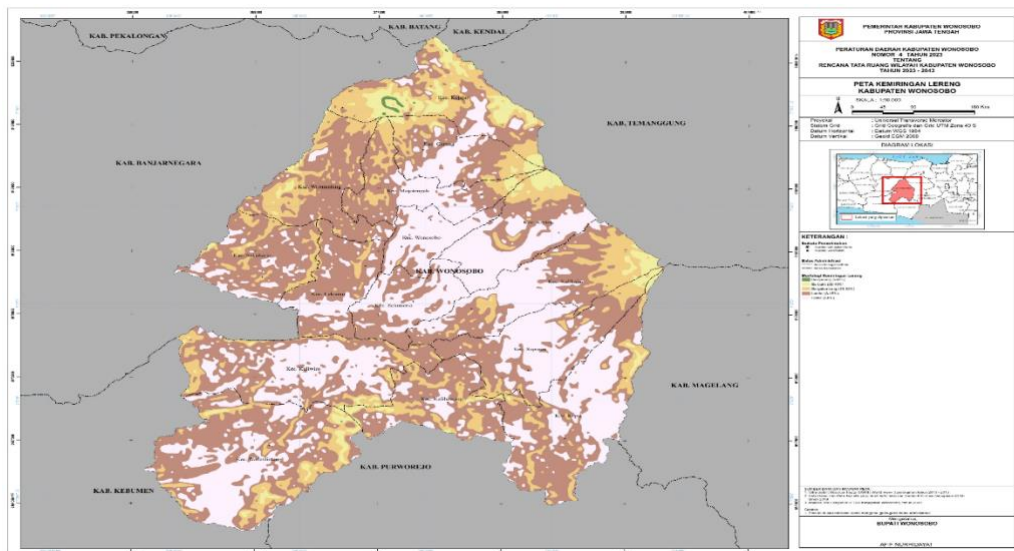
Sebagai wilayah yang berada di sekitar gunung api muda, kondisi tanah di Kabupaten Wonosobo tergolong sangat subur. Hal ini menjadi faktor pendukung utama bagi pengembangan sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat. Berbagai komoditas pertanian unggulan dihasilkan di wilayah ini, antara lain teh, tembakau, aneka sayuran, dan kopi. Selain itu, daerah ini juga memiliki potensi untuk pengembangan budidaya jamur, carica papaya, dan asparagus. Berbagai jenis kayu juga menjadi komoditas ekspor nonmigas, serta terdapat beberapa tanaman khas Kabupaten Wonosobo seperti purwaceng, gondorukem, dan kayu putih.

Di kawasan Dieng banyak dijumpai cekungan atau depresi yang terbentuk akibat pusat-pusat erupsi vulkanik pada masa Pleistosen, yang kemudian terisi oleh endapan material serta sisa-sisa tumbuhan. Selain itu, wilayah ini juga menjadi bagian hulu Sungai Serayu beserta anak-anak sungainya yang berada di wilayah selatan, tepatnya di ujung timur Pegunungan Serayu Selatan yang dibatasi oleh zona patahan. Banyaknya gunung di wilayah Wonosobo juga menjadi sumber berbagai mata air yang mengalir menuju Sungai Serayu, Sungai Bogowonto, Kali Galuh, Kali Semagung, Kali Sanggrahan, dan Luk Ulo. Sungai-sungai tersebut sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, pertanian, serta penyediaan air minum.

Sungai Serayu yang mengalir menuju Telaga Menjer juga telah dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, Kabupaten Wonosobo memiliki potensi wisata yang sangat penting, terutama di kawasan Dataran Tinggi Dieng (Dieng Plateau). Kawasan ini memiliki potensi panas bumi yang telah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, serta memiliki berbagai kawah vulkanik dan panorama alam yang indah. Di kawasan ini juga terdapat kompleks candi peninggalan Kerajaan Mataram Hindu. Berbagai potensi tersebut menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk berkunjung ke Kabupaten Wonosobo.

Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan. Peta topografi dapat dilihat pada Gambar 1.1.2.

Gambar 1.1.2
Peta Topografi Kabupaten Wonosobo



Sumber: RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043

Secara geomorfologi, bentang lahan di Kabupaten Wonosobo, didominasi oleh bentang lahan bentukan dari proses vulkanik. Bentang lahan lainnya berasal dari bentukan denudasional, bentang lahan struktural, bentang lahan fluvial (aliran sungai). Bentuk bentang lahan proses vulkanik yang ada yaitu kubah lava, kerucut gunung api, lereng gunung api, kaki gunung api, perbukitan intrusif batuan gunung api, pegunungan medan lava, perbukitan medan lava, kaldera, danau kaldera, lembah antar gunung api material piroklastik, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.2. Konsekuensinya dengan bentang lahan yang didominasi oleh vulkanik, menjadikan wilayah Kabupaten Wonosobo mempunyai topografi yang dominan tidak datar. Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah perkembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Wonosobo. Pengembangan wilayah disesuaikan dengan bentukan lahan agar prinsip pembangunan berkelanjutan.

Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ketinggian antara 250 dpl – 2250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl – 1000 dpl sebesar 50% dari seluruh area, menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai dataran tinggi dengan kondisi posisi pasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Kabupaten Wonosobo memiliki iklim tropis dengan dua musim dalam setahun yaitu musim kemarau dan musim hujan. Rata-rata suhu di Kabupaten Wonosobo adalah antara 14,3 – 26,5 derajat Celcius. Sementara curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 1713-4255 mm/tahun. Oleh karena itu, Kabupaten Wonosobo termasuk dalam wilayah yang subur sehingga cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Secara geologis, wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk dalam jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Zona ini didominasi oleh endapan gunung api kuarter. Endapan gunung api kuarter ini masih dapat diamati kenampakan kerucut vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan di bagian lain gunung api Dieng yang berumur lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang membentuk plateau (dataran tinggi). Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda Kabupaten Wonosobo termasuk daerah yang subur. Hal ini sangat mendukung perkembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat dengan komoditi utama seperti teh, tembakau, berbagai jenis sayuran dan kopi.

Penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 meliputi lahan sawah sebesar 12.714,84 Ha (12,54%) dan bukan lahan sawah 88.599,23 Ha (87,46%). Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043, peruntukan lahan di Kabupaten Wonosobo dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya. Peruntukan kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Sementara itu, kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, peternakan, permukiman seluas 86.499,42 Ha.

Kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Wonosobo cukup kompleks baik dilihat dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis, memiliki potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah.

V. Morfologi

Berdasarkan hasil analisis menggunakan peta citra terbaru, terdapat 7 (tujuh) jenis morfologi di Kabupaten Wonosobo, yaitu datar, bergelombang, berombak, cekung, perbukitan, pegunungan, dan pegunungan curam.

Tabel 1.1.3
Morfologi Kabupaten Wonosobo

No	Morfologi	Persebaran Kecamatan	Luas (Ha)	%
1	Datar	Garung, Wadaslintang	1.159,71	1,14%
2	Bergelombang	Garung, Kalikajar, Kaliwiro, Kepil, Kertek, Leksono, Mojotengah, Selomerto, Watumalang, Wonosobo	8.715,93	8,60%
3	Berombak	Kaliwiro, Wadaslintang	98,46	0,10%
4	Cekung	Kejajar	359,8	0,36%
5	Perbukitan	Garung, Kalibawang, Kalikajar, Kaliwiro, Kepil, Kertek, Leksono, Mojotengah, Sapuran, Selomerto, Sukoharjo, Wadaslintang, Watumalang, Wonosobo	35.896,72	35,44%
6	Pegunungan	Garung, Kalibawang, Kalikajar, Kaliwiro, Kepil, Kertek, Leksono, Mojotengah, Sapuran, Selomerto, Sukoharjo, Wadaslintang, Watumalang, Wonosobo	54.735,78	54,04%
7	Pegunungan Curam	Garung, Kalikajar, Kejajar, Kertek, Mojotengah, Sapuran	327,10	0,32%
Jumlah			101.293,51	100,00%

Sumber: Satu Data Wonosobo 2024

Morfologi dengan bentuk pegunungan memiliki luas paling besar, yaitu sekitar 54,04%. Diikuti oleh bentuk morfologi perbukitan sekitar 35,44% dan morfologi bergelombang dengan luas sekitar 8,60%. Adapun bentuk morfologi dengan luas terkecil adalah morfologi berombak yaitu sekitar 0,10% yang berada di Kecamatan Kaliwiro dan Kecamatan Wadaslintang.

VI. Stratigrafi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Banjarnegara – Pekalongan skala 1:100.000 (W.H Condon, L. Pardyanto, K.B. Ketner, T.C. Amin, S. Gafoer dan H. Sampoerna, 1996), Pegunungan Serayu Utara dibentuk oleh batuan sedimen dengan terobosan batuan pada beberapa tempat, sedangkan Pegunungan Serayu Selatan didominasi oleh batuan melange/malihan yang merupakan Komplek Luk Ulo dan sedikit batuan sedimen dengan terobosan di beberapa tempat. Stratigrafi Wilayah Kabupaten Wonosobo terdiri atas 26 satuan batuan/formasi yang urutannya dari muda sampai ke tua adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.4
Stratigrafi Kabupaten Wonosobo

Simbol	Stratigrafi	Simbol	Stratigrafi
Qa	Aluvial	Ktm	Batu terbreksikan

Simbol	Stratigrafi	Simbol	Stratigrafi
Qla	Aluvial dan Endapan Danau	Qt2	Endapan undak
Tptl	Anggota Batugamping	Tmw3	Formasi Waturanda
QTlb	Anggota Breksi	Qtd	Formasi Damar
Tmrs	Anggota Sigugur	Tmph	Formasi Halang
Tmwt	Anggota Tufa	Tomk	Formasi Kebo Butak
Tmi 1	Batuan Beku Terobosan	Tpp1	Formasi Peniron
Tpd	Batuan Diorit	Tmp7	Formasi Penosogan
Qdm	Batuan Gunungapi Dieng	Tom T1	Formasi Totogan
Qjyf	Batuan Gunungapi Jembangan	Qf	Kipas Aluvial
Qsm	Batuan Gunung Api Sumbing	Kog	Mafik dan Ultramafik
Qsu 1	Batuan Gunung Api Sindoro	Qj	Morfoset Patuk Banteng-Jeding
Qsmo	Batuan Gunungapi Tua Sumbing	Teol	Reefal Limestone

Sumber: Satu Data Wonosobo 2024

VII. Hidrologi

Ditinjau dari aspek hidrologi, Kabupaten Wonosobo memiliki beberapa sumber daya, antara lain:

a. Air Permukaan

Sumber daya air permukaan yang ada di Kabupaten Wonosobo meliputi:

1) Sungai

Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo sebagian telah digunakan untuk irigasi, pertanian dan air minum. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu sumber mata air di gunung-gunung yang ada di sekitar Kabupaten Wonosobo. Nama-nama sungai tersebut adalah Sungai Serayu, Bogowonto, Kali Begaluh, Kali Semagung, Kali Sanggrahan dan Luk Ulo. Selain untuk kebutuhan irigasi, pertanian, dan air minum, ada manfaat lain dari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Wonosobo, seperti Sungai Serayu yang mengalir ke Telaga Menjer dan arus airnya dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik tenaga air dan juga menjadi obyek pariwisata berupa wisata arung jeram yang diminati oleh wisatawan domestik maupun internasional.

Dengan adanya sungai-sungai di Kabupaten Wonosobo, potensi kegiatan sektoral yang berkaitan dengan perairan bisa dapat digali dan dikembangkan. Potensi di sektor pariwisata, sektor perikanan perairan air tawar, sektor energi, dan sektor-sektor lainnya jika dikembangkan dengan baik maka akan meningkatkan pendapatan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah akan meningkat di beberapa sektor. Banyaknya sungai dan anak sungai di Kabupaten Wonosobo juga perlu dicermati kelestarian dan tingkat polusinya karena dengan jumlah sungai yang banyak maka akan semakin luas pula kawasan sempadan

sungai di Kabupaten Wonosobo yang perlu dilindungi dan jika tidak dapat terlindungi dengan baik dikhawatirkan timbul dampak negatif bagi pemanfaatan ruang seperti banyaknya titik rawan longsor di sepanjang sungai dan anak sungai atau tingginya tingkat polusi di sungai akibat banyaknya limbah rumah tangga dan limbah industri dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu.

2) Waduk dan Telaga

Selain sungai, sumberdaya air permukaan di Kabupaten Wonosobo adalah waduk. Terdapat satu waduk besar dan satu telaga di Kabupaten Wonosobo, yaitu Waduk Wadaslintang dan Telaga Menjer. Waduk Wadaslintang merupakan waduk di selatan Kabupaten Wonosobo dan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. Dengan lokasi Waduk Wadaslintang yang berada di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen serta fungsi waduk yang berpengaruh terhadap dua kabupaten tersebut maka pengelolaan Waduk Wadaslintang secara bergantian setiap tahun akan dikelola oleh Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen. Telaga Menjer, Telaga Warna dan Telaga Cebong merupakan telaga yang berada di Kawasan Dieng. Telaga Menjer tidak hanya menjadi salah satu objek wisata di Kawasan Dieng, namun juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan bendungan dan disebut sebagai PLTA Garung.

3) Bendung

Terdapat 19 bendung yang ada di Kabupaten Wonosobo yang terdapat di 13 sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.5

Bendung, Sungai, dan Daerah Irigasi Kabupaten Wonosobo

Nama Bendung	Sungai	Daerah Irigasi
Wanganaji	Serayu	Wanangaji
Geblok	Serayu	Geblok
Mangli	Serayu	Mangli
Timbang	Serayu	Timbang
Tandu	Serayu	Tandu
Capar Jeruk	Capar	Capar Jeruk
Gintung	Gintung	Gintung
Kalimendong	Bleber	Kalimendong
Kalitulang	Kalitulang	Kalitulang
Banjaran	Preng	Banjaran
Muncar	Begaluh	Muncar
Klitih	Begaluh	Klitih
Mungkung	Begaluh	Mungkung

Nama Bendung	Sungai	Daerah Irigasi
Karangsari	Begaluh Kecil	Karangsari
Pingit	Bogowonto	Pingit
Kedung Tumpeng	Medono	Kedung Tumpeng
Kedungupit	Begaluh	Kedungupit
Kembang	Begaluh	Kembang
Aji Pegedangan	Cecep	Aji Pegedangan

Sumber: Revisi RTRW Rekom BIG Kabupaten Wonosobo, 2019-2039

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa debit air di semua bendung melebihi dari debit kebutuhan air sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan air yang dibebankan kepada bendung-bendung yang ada di Kabupaten Wonosobo dapat memenuhi kebutuhan. Banyaknya bendung di Kabupaten Wonosobo berpotensi untuk dijadikan pembangkit listrik air untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di sekitar bendung sehingga mampu beban-beban listrik dapat dialokasikan untuk wilayah lain di Kabupaten Wonosobo.

b. Air Tanah

Sumber daya air tanah yang ada di Kabupaten Wonosobo dapat dibedakan menurut letaknya menjadi:

- 1) *Confined Aquifer*, merupakan air tanah tertekan yang berada di antara dua lapisan kedap air, pada umumnya merupakan air tanah dalam bersifat lebih stabil. Di sekitar Dieng dan Gunung Sindoro banyak dijumpai *confined aquifer* yang airnya banyak mengandung mineral dan bersifat panas.
- 2) *Unconfined Aquifer*, merupakan air tanah tidak tertekan yang berada pada zona jenuh air, merupakan air tanah dangkal dan sangat tergantung pada musim, sehingga air tanah jenis ini relatif stabil.

Air tanah tersebut, apabila keluar akan membentuk mata air. Untuk Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa mata air yang tersebar di setiap kecamatan. Mata air tersebut dimanfaatkan untuk keperluan irigasi desa, PDAM, dan air minum masyarakat. Pemanfaatan air tanah perlu diawasi dan dikendalikan karena berkaitan dengan volume cadangan air tanah yang jika tidak diimbangi dengan upaya perlindungan lokasi-lokasi imbuhan air maka volume air tanah akan semakin berkurang dan seiring waktu akan habis.

C. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 adalah 951.150 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 485.251 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 466.299

jiwa. Tingkat persentase jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Wonosobo sebesar 10,31% atau 98.134 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo. Letak Kecamatan Wonosobo yang merupakan pusat ibukota Kabupaten Wonosobo menjadikan daya tarik sendiri untuk penduduk tinggal di Kecamatan Wonosobo. Sedangkan Kecamatan Kalibawang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil dengan tingkat persentase 3,15% atau 29.986 jiwa. Tabel 1.1.6 menjelaskan kondisi kependudukan Kabupaten Wonosobo per Desember Tahun 2025.

Tabel 1.1.6
Data Penduduk Wonosobo Tahun 2025 Berdasarkan Pencatatan Administratif
Kependudukan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Wadaslintang	33.317	32.631	65.948	6,93
2	Kepil	35.755	34.229	69.984	7,35
3	Sapuran	34.338	32.533	66.871	7,03
4	Kaliwiro	28.593	28.027	56.620	5,95
5	Leksono	24.910	24.408	49.318	5,18
6	Selomerto	29.193	28.743	57.936	6,09
7	Kalikajar	39.913	38.092	78.005	8,20
8	Kertek	49.787	47.984	97.771	10,27
9	Wonosobo	49.438	48.696	98.134	10,31
10	Watumalang	30.866	29.625	60.491	6,36
11	Mojotengah	37.024	34.646	71.670	7,53
12	Garung	31.946	29.873	61.819	6,50
13	Kejajar	25.667	23.937	49.604	5,21
14	Sukoharjo	19.154	18.239	37.393	3,93
15	Kalibawang	15.350	14.636	29.986	3,15
	Jumlah	485.251	466.299	951.550	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

D. JUMLAH KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN

Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan. Secara rinci pembagian desa dan kelurahan di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.7
Jumlah Desa dan Kelurahan Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TOTAL
Wadaslintang	16	1	17
Kepil	20	1	21
Sapuran	16	1	17
Kaliwiro	20	1	21

KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TOTAL
Leksono	13	1	14
Selomerto	22	2	24
Kalikajar	18	1	19
Kertek	19	2	21
Wonosobo	7	13	20
Watumalang	15	1	16
Mojotengah	16	3	19
Garung	14	1	15
Kejajar	15	1	16
Sukoharjo	17	-	17
Kalibawang	8	-	8
JUMLAH	236	29	265

Sumber: Satu Data Wonosobo 2025

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Tabel 1.1.8

Jumlah Perangkat Daerah, Umit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah di Kabupaten Wonosobo

No.	Jenis Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja	Jumlah Pegawai Pemerintah
1.	Badan Kepegawaian Daerah	1	-	PNS : 25 PPPK : 27 PPPK PW : 3 total : 35
2.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	-	PNS : 14 PPPK : 3 PPPK PW : 5 total : 22
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	-	PNS : 19 PPPK : 17 PPPK PW : 11 total : 47
4.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	1	-	PNS : 48 PPPK : 5 PPPK PW : 39 total : 92
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	-	PNS : 26 PPPK : 15

No.	Jenis Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja	Jumlah Pegawai Pemerintah
				PPPK PW : 8 total : 49
6.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	1	-	PNS : 24 PPPK : 8 PPPK PW : 29 total : 61
7.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	-	PNS : 14 PPPK : 20 PPPK PW : 11 total : 45
8.	Dinas Kesehatan	1	UPTD : 1 Puskesmas : 24	PNS : 699 PPPK : 223 PPPK PW : 110 total : 1032
9.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	-	PNS : 21 PPPK : 12 PPPK PW : 14 total : 47
10.	Dinas Lingkungan Hidup	1	-	PNS : 53 PPPK : 10 PPPK PW : 162 total : 225
11.	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1	4	PNS : 45 PPPK : 9 PPPK PW : 21 total : 75
12.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1	1	PNS : 25 PPPK : 14 PPPK PW : 25 total : 64
13.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	7	PNS : 79 PPPK : 11 PPPK PW : 126 total : 216
14.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	-	PNS : 19 PPPK : 4 PPPK PW : 6 total : 29
15.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1	UPTD : 519 - TK : 3	PNS : 2614 PPPK : 2001

No.	Jenis Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja	Jumlah Pegawai Pemerintah
			- SD : 444 - SMP : 72	PPPK PW : 768 total : 5383
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1	-	PNS : 24 PPPK : 8 PPPK PW : 18 total : 51
17.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1	5	PNS : 45 PPPK : 12 PPPK PW : 45 total : 102
18.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	1	1	PNS : 42 PPPK : 6 PPPK PW : 83 total : 131
19.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	-	PNS : 20 PPPK : 11 PPPK PW : 27 total : 58
20.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	1	1	PNS : 28 PPPK : 2 PPPK PW : 7 total : 37
21.	Inspektorat	1	-	PNS : 53 PPPK : 1 PPPK PW : 1 total : 55
22.	Kecamatan Garung	1	-	PNS : 19 PPPK : 6 PPPK PW : 8 total : 33
23.	Kecamatan Kalibawang	1	-	PNS : 8 PPPK : 4 PPPK PW : 3 total : 15
24.	Kecamatan Kalikajar	1	-	PNS : 15 PPPK : 5 PPPK PW : 10 total : 30
25.	Kecamatan Kaliwiro	1	-	PNS : 15 PPPK : 7

No.	Jenis Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja	Jumlah Pegawai Pemerintah
				PPPK PW : 8 total : 30
26.	Kecamatan Kejajar	1	-	PNS : 24 PPPK : 4 PPPK PW : 4 total : 32
27.	Kecamatan Kepil	1	-	PNS : 19 PPPK : 6 PPPK PW : 8 total : 33
28.	Kecamatan Kertek	1	-	PNS : 23 PPPK : 7 PPPK PW : 5 total : 35
29.	Kecamatan Leksono	1	-	PNS : 16 PPPK : 5 PPPK PW : 5 total : 26
30.	Kecamatan Mojotengah	1	-	PNS : 22 PPPK : 10 PPPK PW : 10 total : 42
31.	Kecamatan Sapuran	1	-	PNS : 17 PPPK : 6 PPPK PW : 4 total : 27
32.	Kecamatan Selomerto	1	-	PNS : 21 PPPK : 8 PPPK PW : 6 total : 35
33.	Kecamatan Sukoharjo	1	-	PNS : 12 PPPK : 4 PPPK PW : 3 total : 19
34.	Kecamatan Wadaslintang	1	-	PNS : 15 PPPK : 7 PPPK PW : 7 total : 29
35.	Kecamatan Watumalang	1	-	PNS : 15 PPPK : 7

No.	Jenis Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja	Jumlah Pegawai Pemerintah
				PPPK PW : 6 total : 28
36.	Kecamatan Wonosobo	1	-	PNS : 62 PPPK : 28 PPPK PW : 34 total : 125
37.	Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro	1	-	PNS : 308 PPPK : 87 PPPK PW : 205 total : 600
38.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	-	PNS : 30 PPPK : 15 PPPK PW : 17 total : 62
39.	Sekretariat Daerah	1	-	PNS : 97 PPPK : 41 PPPK PW : 44 total : 182
40.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	-	PNS : 18 PPPK : 3 PPPK PW : 8 total : 29
	Grand Total	40	563	PNS : 4695 PPPK : 2660 PPPK PW : 1915 total : 9270

F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Data APBD Kabupaten Wonosobo selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.9

Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo

Uraian	2025
Pendapatan	1.995.647.858.651.09
Pendapatan Asli Daerah	383.397.964.048
Dana Perimbangan	1.264.579.730.676
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	726.188.704

Uraian	2025
Belanja	1.944.444.261.782,52
Belanja Langsung	-
Belanja Tidak Langsung	-
Belanja Operasi	1.405.164.439.146
Belanja Modal	191.954.364.737,52
Belanja Tidak Terduga	857.223.700
Belanja Transfer	346.468.234.199
Pembiayaan	33.706.944.828.91
Pembiayaan Penerimaan	33.706.944.828.91
Pembiayaan Pengeluaran	0

Sumber : BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2025

Tabel 1.1.10
Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian
PENDAPATAN DAERAH	2.714.650.364.409	2.647.144.611.251	97,51
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.212.847.641.539	1.187.374.235.526	97,90
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	101.401.392.424	94.600.513.573	93,29
Urusan pemerintahan pilihan	22.515.891.802	21.048.402.503	93,48
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	89.054.462.161	84.126.413.672	94,47
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	77.973.804.117	75.833.054.655	97,25

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian
Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah	1.124.047.534.491	1.101.238.444.227	97,97
Unsur Kewilayahan	86.809.637.874,50	82.923.547.095	95,52
Belanja Daerah	1.609.603.893.927	1.564.394.117.213	97,19
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.212.847.641.539	1.187.374.235.526	97,90
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	101.401.392.424	94.600.513.573	93,29
Urusan Pemerintahan Pilihan	22.515.891.802	21.048.402.503	93,48
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	89.054.462.161	84.126.413.672	94,47
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	77.973.804.117	75.833.054.655	97,25
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	10.540.842.178	10.216.347.707	96,92
Unsur Kewilayahan	86.809.637.874,50	82.923.547.095	95,52
Unsur Pemerintahan Umum	8.460.221.831	8.271.602.482	97,77

Sumber: : BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2025

G. ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 1.1.11
ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.212.847.641.539	1.187.374.235.526
1.	PENDIDIKAN		653.950.856.586	645.988.334.059
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	503.833.214.544	501.350.757.462
		Program Pengelolaan Pendidikan	149.809.842.042	144.365.519.907
		Program Pengembangan Kurikulum	235.000.000	210.286.690
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	72.800.000	61.770.000
2.	KESEHATAN		387.653.856.140	375.854.536.050
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.256.386.336	276.096.240.955
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	103.555.816.018	98.041.572.941

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Upaya Kesehatan Masyarakat		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	784.946.900	765.331.400
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	733.759.310	654.587.114
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	322.947.576	296.803.640
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		115.611.526.183	112.639.605.349
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.326.528.024	12.031.874.218
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.324.348.000	4.991.043.385
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.100.000.000	1.094.364.749
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.815.000.000	2.798.815.355

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	900.000.000	891.150.158
		Program Penataan Bangunan Gedung	653.252.000	636.088.863
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.214.173.023	1.324.201.350
		Program Penyelenggaraan Jalan	89.181.945.136	87.971.825.771
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.096.280.000	900.241.500
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		24.659.698.089	23.023.306.364
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.981.749.664	6.766.471.372
		Program Pengembangan Perumahan	643.831.380	642.939.668
		Program Kawasan Permukiman	75.408.040	74.326.200
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	205.000.000	165.000.000
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana	16.722.573.863	15.343.753.344

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Dan Utilitas Umum (PSU)		
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	31.135.142	30.815.780
5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		16.545.198.241	16.045.898.844
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (SATPOL + BPBD)	11.205.059.990	10.801.992.993
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.306.732.125	2.282.421.772
		Program Penanggulangan Bencana	1.086.030.526	1.026.927.355
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.947.375.600	1.934.556.724
6.	SOSIAL		14.426.506.300	13.822.554.860

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.032.886.148	4.808.940.037
		Program Pemberdayaan Sosial	582.748.282	480.188.792
		Program Rehabilitasi Sosial	1.133.375.066	1.047.722.631
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	7.506.267.120	7.343.788.943
		Program Penanganan Bencana	96.229.684	93.459.800
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	75.000.000	48.454.657
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			101.401.392.424	94.600.513.573
7.	TENAGA KERJA		12.647.139.565	9.667.498.945
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.461.595.944	5.246.374.685
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.730.543.621	4.093.114.021
		Program Penempatan Tenaga Kerja	315.000.000	189.390.579

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Hubungan Industrial	140.000.000	138.619.660
8.	PANGAN		23.506.756.091	22.972.629.664
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.251.756.091	22.719.437.639
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	100.000.000	99.379.920
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	45.000.000	44.054.465
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	70.000.000	69.959.350
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	40.000.000	39.798.290
9.	LINGKUNGAN HIDUP		20.855.101.328	20.076.774.920
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.514.158.769	8.281.530.897
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	180.137.516	136.447.980
		Program Pengendalian	471.325.094	406.476.557

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.525.858.871	1.492.424.629
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	10.590.388	9.065.785
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	50.718.950	49.325.530
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	31.942.631	31.865.155
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	4.075.000	4.075.000

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Pengelolaan Persampahan	10.066.294.109	9.665.563.387
10.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		7.081.757.692	6.821.249.307
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.090.940.982	5.843.134.624
		Program Pendaftaran Penduduk	835.317.350	826.003.393
		Program Pencatatan Sipil	77.100.000	75.395.050
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	78.399.360	76.716.240
11.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		15.883.155.981	15.639.526.776
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.289.893.625	5.171.422.218
		Program Pengendalian Penduduk	444.298.800	427.850.128
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.099.239.956	5.023.830.890
		Program Pemberdayaan Dan	5.049.723.600	5.016.423.540

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		
13.	KOMUNIKASI & INFORMATIKA		11.241.735.293	9.935.983.676
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.764.908.325	5.542.772.003
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.254.667.558	3.171.115.817
		Program Aplikasi Pengelolaan Informatika	1.222.159.410	1.222.095.856
14.	PENANAMAN MODAL		4.594.867.550	4.315.739.872
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.405.343.210	4.127.351.181
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	65.379.400	64.357.400
		Program Promosi Penanaman Modal	8.450.000	8.450.000
		Program Pelayanan Penanaman Modal	77.466.900	77.430.107
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	38.228.040	38.151.184

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
15.	KEARSIPAN		5.590.878.924	5.171.110.413
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.393.548.957	4.992.354.504
		Program Pengelolaan Arsip	197.329.967	178.755.909
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			22.515.891.802	21.048.402.503
16.	PARIWISATA		8.755.587.558	8.040.139.460
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.679.218.559	5.348.714.667
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.626.613.553	1.420.674.948
		Program Pemasaran Pariwisata	843.704.776	790.507.982
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	286.361.670	167.768.863
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	319.689.000	312.473.000
17	PERDAGANGAN		13.760.304.244	13.008.263.043

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.695.464.185	10.065.838.196
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	61.650.438	55.137.560
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.303.466.651	1.193.840.311
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.597.206.018	1.593.904.006
		Program Pengembangan Ekspor	35.048.421	34.045.044
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	58.313.135	56.758.026
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	9.155.396	8.739.900
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			89.054.462.161	84.126.413.672
18.	SEKRETARIAT DAERAH		42.962.612.836	40.424.492.929
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.727.805.020	34.621.545.276
		Program Pemerintahan Dan	4.629.463.270	4.504.572.855

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Kesejahteraan Rakyat		
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.605.344.546	1.298.374.798
19.	SEKRETARIAT DPRD		46.091.849.325	43.701.920.743
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.860.394.325	39.900.454.017
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4.231.455.000	3.801.466.726
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			77.973.804.117	75.833.054.655
20.	PERENCANAAN		8.164.345.300	7.908.782.835
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.157.866.726	6.960.037.528
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	360.739.320	346.274.031
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	645.739.254	602.471.276
21.	KEUANGAN		62.656.831.723	61.101.624.812
		Program Penunjang Urusan	58.157.106.470	56.648.594.557

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Pemerintahan Daerah		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	747.777.078	727.890.028
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	761.832.513	747.540.092
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.990.115.662	2.977.600.135
22.	KEPEGAWAIAN		7.152.627.094	6.822.647.008
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.269.762.613	4.984.885.217
		Program Kepegawaian Daerah	1.882.864.481	1.837.761.791
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			10.540.842.178	10.216.347.707
23.	INSPEKTORAT		10.540.842.178	10.216.347.707
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.889.850.696	9.606.697.258
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	545.401.482	516.695.283
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	105.590.000	92.955.166

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
UNSUR KEWILAYAHAN			86.809.637.874,50	82.923.547.095
24.	Kecamatan		86.809.637.874,50	82.923.547.095
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.003.079.516,50	56.613.156.643
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.781.320.606	1.710.886.609
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	19.112.015.309	18.857.912.451
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.903.187.127	1.803.321.863
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.706.593.113	2.662.754.233
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.303.442.204	1.275.515.296
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			8.460.221.831	8.271.602.482
25.	Kesatuan Bangsa Dan Politik		8.460.221.831	8.271.602.482
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.799.015.771	2.707.866.080
		Program Penguatan Ideologi Pancasila	1.165.663.484	1.153.146.794

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Dan Karakter Kebangsaan		
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.823.034.450	1.805.106.750
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.604.555.725	1.597.622.140
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	89.684.253	87.179.730
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	978.268.148	920.680.988

Sumber : : BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2025

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tiap aspek dalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis. Respon yang efektif terhadap dinamika yang ada. Hambatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada

umumnya bersumber dari potensi yang belum terdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang terlewatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi dengan tepat. Oleh karena itu tahap Identifikasi Masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Permasalahan strategis berdasarkan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- 1) Belum optimalnya kualitas guru
- 2) Belum optimalnya implementasi sekolah inklusi
- 3) Rendahnya partisipasi sekolah PAUD (APS PAUD)
- 4) Masih rendahnya partisipasi sekolah usia 13 sampai dengan 15 tahun
- 5) Masih rendahnya partisipasi sekolah pendidikan kesetaraan
- 6) Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah
- 7) Masih rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- 1) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas kunjung neonatal sesuai standar
- 2) Masih ditemukan kasus ibu hamil KEK, kasus BBLR akibat kurangnya asupan gizi
- 3) Pergeseran keluhan kesehatan dan penyakit yang banyak di derita masyarakat dari penyakit menular ke penyakit tidak menular karena perubahan gaya hidup
- 4) Pengawasan pangan perlu ditingkatkan
- 5) Kesehatan lingkungan

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belum optimalnya tata kelola perencanaan, pemrograman dan penganggaran kegiatan penyelenggaraan jalan
- 2) Kondisi topografi menuntut penanganan secara khusus
- 3) Intensitas curah hujan, kerawanan bencana memicu penurunan kondisi kemandapan jalan
- 4) Masih rendahnya layanan akses air minum aman di perdesaan

- 5) Berkurangnya sumber air baku
- 6) Masih rendahnya layanan akses air limbah domestik layak
- 7) Belum adanya regulasi (Perda pengelolaan Air Limbah Domestik)
- 8) Saluran irigasi masih banyak yang multifungsi sebagai saluran drainase dan saluran air limbah domestik
- 9) Intensitas curah hujan dan kerawanan bencana memicu penurunan kondisi jaringan irigasi
- 10) Belum optimalnya tata kelola drainase
- 11) Belum optimalnya penataan bangunan Gedung strategis
- 12) Belum optimalnya masyarakat dalam mengakses layanan PBG-SLF
- 13) Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan
- 14) Belum tersedianya aturan legal rencana tata ruang dalam skala rinci

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses hunian layak
- 2) Belum optimalnya penanganan dan pencegahan Kawasan permukiman kumuh
- 3) Tingginya potensi rumah terena bencana
- 4) Masih tingginya rumah tidak layak huni

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Masih kurangnya jumlah tenaga Linmas dalam mendukung pemilu
- 2) Masih kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna menangani kasus pelanggaran K3
- 3) Masih kurangnya sarana prasarana pendukung yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- 4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kantrantibmas
- 5) Masih belum optimalnya warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 6) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (*response time*)

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- 1) Belum optimalnya upaya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan sosial (keterampilan, management, promosi usaha)
- 3) Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (Ketersediaan data; Keterbatasan sarpras dan SDM)
- 4) Belum adanya fasilitas *shelter* yang standar
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penetapan sasaran program

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- 1) Terbatasnya kesempatan dan penempatan kerja
- 2) Masih rendahnya jumlah masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau *start up* wirausaha baru
- 3) Masih kurangnya tenaga kerja berkualitas – pelatihan berbasis kompetensi perlu diperbanyak
- 4) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih rendahnya keberdayaan perempuan ditunjukkan dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 sebesar 48,92 dengan rata rata masih di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah
- 2) Masih adanya ketimpangan gender dalam Masyarakat ditunjukkan dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2023 yaitu sebesar 92,65 dari kondisi ideal 100 dan masih di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Pemenuhan haka anak belum optimal
- 4) Masih adanya kasus kekerasan pada anak dan Perempuan

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- 1) Masih panjangnya saluran distribusi pangan
- 2) Masih rendahnya cakupan Desa Mandiri Pangan
- 3) Masih beredarnya pangan non ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)
- 4) Kualitas dan mutu pangan yang relatif rendah, Harga bahan pangan yang tidak stabil

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- 1) Rendahnya aset tanah pemerintah daerah yang bersertifikat
- 2) Belum optimalnya tata kelola aset

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Belum optimalnya pengelolaan sampah di sumber sampah
- 2) Masih tingginya luasan lahan kritis di luar kawasan hutan
- 3) Masih tingginya pencemaran air dan penurunan debit mata air

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Kepemilikan dokumen kependudukan penduduk rentan masih belum optimal

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan perdesaan masih rendah.
- 2) Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah

- 3) Lemahnya kelembagaan Bumdes
- 4) Belum optimalnya sistem administrasi pemerintahan desa khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi desa / kelurahan

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Cakupan peserta KB aktif belum optimal masih didominasi oleh penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek
- 2) Rendahnya persentase kesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- 3) Tingginya angka unmetneed (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)
- 4) Masih terdapat kenaikan drop out KB
- 5) Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan belum memenuhi standar ideal di Kabupaten Wonosobo sebesar 19 tahun dan standar kesehatan 21 tahun

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- 1) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum/transportasi publik, perlu adanya peninjauan kembali trayek yang sudah ada
- 2) Banyaknya potensi daerah rawan kecelakaan utamanya pada daerah dataran tinggi terutama akses pariwisata
- 3) Belum optimalnya pelayanan terminal tipe C Sawangan
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana penyeberangan waduk
- 5) Terbatasnya fasilitas kelengkapan lalu lintas jalan terutama akses pariwisata dan Daerah rawan kecelakaan
- 6) Rendahnya ketersediaan fasilitas parkir sistem elektronik

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum optimalnya layanan informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah
- 2) Belum optimalnya pengelolaan SPBE
- 3) Belum semua website Organisasi Perangkat Daerah mengumpan informasi secara berkala sesuai dengan Standard Layanan Informasi Publik
- 4) Rata-rata respon tindak lanjut pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal Lapor Bupati masih melebihi standard yang ditetapkan

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM

- 1) Jumlah Koperasi yang memiliki badan hukum masih sedikit.
- 2) Kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk UMKM belum terjaga.
- 3) Masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM untuk mengajukan HAKI atas produk UMKM dan kesulitan untuk mendapatkan bantuan permodalan
- 4) Masih minimnya koperasi aktif dan koperasi sehat
- 5) Masih minimnya koperasi pertanian

- 6) Masih minimnya jumlah UMKM naik kelas
- 7) Masih minimnya skema pendanaan bagi UKM dan pemasaran produk UKM
- 8) Jumlah koperasi tidak sehat/non aktif masih banyak

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- 1) Masih rendahnya pertumbuhan investasi daerah
- 2) Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan penanaman modal

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Prestasi olahraga masih terbatas pada cabang olahraga tertentu
- 2) Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana olahraga
- 3) Masih minimnya prestasi tingkat nasional dan internasional
- 4) Masih minimnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
- 5) Masih rendahnya wirausaha pemuda

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- 1) Data statistik sektoral belum terintegrasi
- 2) Masih minimnya data sektoral yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah
- 3) Data Statistik Sektoral belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- 1) Belum optimalnya pengelolaan keamanan data dan informasi pada masing-masing perangkat daerah

p. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

- 1) Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya, termasuk untuk wisata sejarah/budaya

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- 1) Masih minimnya jumlah referensi digital dibandingkan dengan jumlah koleksi buku dan judul buku
- 2) Belum semua desa/ kelurahan mempunyai perpustakaan desa/ kelurahan

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- 1) Belum semua perangkat daerah menerapkan arsip secara baku
- 2) Belum optimalnya pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun
- 3) Masih minimnya pembinaan kearsipan bagi unit pengelola arsip (organisasi masyarakat, organisasi politik, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan kecamatan)

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Masih rendahnya produksi ikan budidaya dan perikanan tangkap

- 2) Minimnya Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang memproduksi secara kontinyu
- 3) Belum optimalnya penerapan teknologi perikanan

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- 1) Masih rendahnya kunjungan wisatawan
- 2) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 3) Masih rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan
- 4) Masih minimnya pelaku ekonomi kreatif yang menjadi wirausaha

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- 1) Ketergantungan petani pada sarana pertanian dari pabrikan yang cukup tinggi (bibit/benih, pupuk, obat-obatan, pakan)
- 2) Masih minimnya produk pertanian, perkebunan dan peternakan yang tersertifikasi/terstandarisasi
- 3) Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas
- 4) Tenaga kerja sektor pertanian semakin terbatas
- 5) Belum optimalnya penggunaan teknologi/inovasi pertanian
- 6) Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- 1) Masih rendahnya komoditas produk ekspor
- 2) Sarana distribusi perdagangan belum optimal
- 3) kesulitan memasarkan produk pada jaringan toko modern
- 4) belum optimalnya digital marketing produk UMKM lokal

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- 1) Masih rendahnya kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil
- 2) Masih rendahnya industri pengolahan yang bersertifikasi halal
- 3) Belum optimalnya kelembagaan industri pengolahan
- 4) Masih rendahnya industri pengolahan yang mempunyai izin usaha bersertifikat
- 5) Belum tersedianya rencana pembangunan industri kabupaten

f. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

- 1) Belum optimalnya tingkat kesiapan lahan di satuan permukiman

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

- 1) Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintahan
- 2) Indeks tata kelola PBJ rendah

b. Sekretariat DPRD

- 1) Persentase peraturan daerah (perda) inisiatif DPRD masih rendah (18,75%)

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

- 1) Belum optimalnya capaian kinerja pembangunan

- 2) Masih rendahnya implementasi pendanaan inovatif

b. Keuangan

- 1) Proporsi belanja pegawai masih diatas 30%
- 2) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah
- 3) Belum optimalnya pengelolaan dan penatausahaan aset daerah

c. Kepegawaian

- 1) Persentase dokumen perencanaan kepegawaian yang tersusun belum optimal (80%)
- 2) Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN meningkat
- 3) Belum semua layanan kepegawaian yang berbasis digital
- 4) Masih rendahnya persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (14,64%)

d. Penelitian dan Pengembangan

- 1) Kelembagaan blm sesuai regulasi
- 2) Data dukung inovasi daerah belum optimal
- 3) Belum adanya kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence based policy*)

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat Daerah

- 1) Masih adanya hasil temuan BPKP, BPK, Inspektorat dan eksternal lainnya yang belum ditindaklanjuti (0,71%)
- 2) Jumlah unit pelayanan yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) masih rendah yaitu baru 2 unit dari 64 unit
- 3) Belum adanya unit pelayanan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

- 1) Belum optimalnya fungsi koordinasi wilayah kecamatan

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1) Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu cenderung menurun
- 2) Masih rendahnya masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan
- 3) Masih rendahnya masyarakat yang mengikuti pendidikan politik
- 4) Masih adanya konflik SARA yang mengganggu toleransi
- 5) belum optimalnya penerapan nilai-nilai demokrasi
- 6) Kurang update-nya data organisasi kemasyarakatan yang masih aktif
- 7) Kurangnya upaya pemantauan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan

Tema RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 “Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah”. Daya Saing Daerah adalah kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Peningkatan Daya Saing daerah didukung dari beberapa aspek, antara lain penguat/ enabling environment, sumberdaya manusia/ human capital, pasar/market, dan ekosistem inovasi. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah tahun 2022 diperoleh hasil skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten sebesar 3,247 meningkat dibanding skor tahun 2021 yang lalu yaitu sebesar 2,8455. Aspek yang diukur meliputi empat klaster aspek dengan skor aspek tertinggi menuju terendah yaitu faktor pasar/market sebesar 3,667, faktor penguat/enabling environment sebesar 3,542 sumber daya manusia/human capital sebesar 3,054 dan ekosistem inovasi sebesar 2,728. Faktor pasar menjadi aspek daya saing yang tertinggi sementara ekosistem inovasi menjadi aspek daya saing yang terendah di Kabupaten Wonosobo.

Selaras dengan tema RKPD 2025 dan memperhatikan gambaran kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global, nasional, dan provinsi, maka secara garis besar isu strategis yang dihadapi sebagai berikut :

1) Kualitas infrastruktur;

Infrastruktur wilayah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan wilayah. Kondisi infrastruktur wilayah dapat dilihat dari indikator indeks infrastruktur. Indeks infrastruktur dihitung pada sektor jalan, irigasi, air minum, air limbah domestik layak, dan irigasi.

Pada tahun 2023 indeks infrastruktur meningkat dari 63,46 menjadi 73,95. Meskipun ada peningkatan namun belum optimal, sehingga masih diperlukan upaya pemantapan infrastruktur wilayah, baik berupa jalan, air minum aman, air limbah domestik layak dan irigasi. Pada subsektor jalan, meskipun kemandapan jalan sudah mendekati target 65%, namun kualitas kemantapannya masih didominasi pada kondisi sedang (kondisi baik hanya 19,35%, kondisi sedang sebesar 45,56% yang artinya kondisi sedangnya mencapai 70,19 % dari kondisi kemandapan jalan).

Peningkatan indeks infrastruktur ini lebih disebabkan dengan kenaikan capaian akses air limbah domestik layak. Pada perhitungan capaian akses tersebut terdapat perubahan definisi operasional layak, dimana akses septictank tidak kedap atau masih berupa cubluk di desa/ kelurahan status pedesaan yang sebelumnya dianggap belum layak berubah menjadi layak. Oleh karena Kabupaten Wonosobo banyak di dominasi status perdesaan, adanya perubahan ini meningkatkan capaian akses air limbah domestik layak pada tahun 2023 menjadi sebesar 86,36%. Akan tetapi masih terdapat tantangan dalam layanan air limbah domestik yaitu dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Jawa Tengah masih rendah dan pada akses aman juga masih jauh dari target. Capaian akses air limbah domestik aman baru mencapai 1,9% sehingga angka ini masih sangat kecil dan jauh dari target yang ditetapkan yaitu 89,5%. Hal inilah yang masih perlu didorong dan perlu upaya lebih agar layanan air limbah domestik dapat optimal.

Pada sub urusan air minum, akses air minum layak sudah tinggi namun masih memiliki tantangan masih rendahnya layanan air minum aman pada SPAM perdesaan. Capaian akses air minum layak Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 sebesar 95,06%. Walaupun capaian akses air minum layak sudah tinggi yang dikarenakan ketersediaan sumber air baku khususnya mata air, akan tetap di beberapa daerah masih ada yang tidak memiliki sumber air baku yang memadai, sehingga belum terjangkau oleh layanan SPAM bahkan di musim kemarau masih membutuhkan *dropping* air. Disisi lain akses air minum layak saja tidak cukup karena target dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah air minum yang aman. Air minum aman adalah air minum yang memiliki kriteria baku mutu air seperti yang tercantum dalam Permenkes nomor 32 tahun 2017. Untuk SPAM perkotaan yang menjadi layanan Perumda Air Minum dikategorikan masuk standar aman karena telah dilakukan pengujian kualitas air dan klorinasi secara rutin. Adapun SPAM perdesaan kondisi saat ini belum dilakukan pengujian kualitas air secara rutin sehingga belum dapat dikategorikan sebagai akses aman.

Pada subsektor irigasi, secara makro capaian kinerja irigasi dapat dilihat dari indikator indeks kinerja layanan irigasi (IKSI) tahun 2023 adalah 65,79 yang berdasarkan Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 masuk dalam kinerja kurang dan perlu perhatian, sehingga perlu ditingkatkan lagi.

Sampai dengan 2023 kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan di ruas kabupaten yang baru terpenuhi sebesar 70% dari total kebutuhan. sehingga masih perlu ditingkatkan karena berpengaruh terhadap keselamatan pengguna jalan. Semakin lengkap sarana prasarana perlengkapan jalan menjadi salah satu upaya memperkecil angka fatalitas kecelakaan.

Selain sarana prasarana perlengkapan jalan, sarana prasarana angkutan Sungai, danau dan penyeberangan yaitu khususnya di Waduk Wadaslintang yang selama ini masih digunakan sebagian masyarakat untuk memperpendek waktu tempuh antar desa di sekitar Waduk Wadaslintang masih memerlukan perhatian.

Capaian persentase permukiman layak huni pada tahun 2023 adalah 87,36%, walaupun masuk pada kategori tinggi akan tetapi terdapat tantangan masih cukup banyak permukiman yang berada pada Kawasan *negative list* khususnya berada pada Kawasan rawan bencana. Selain itu, pencegahan terhadap timbulnya permukiman kumuh masih perlu dilakukan, mengingat luasan kumuh di Kabupaten Wonosobo saat ini sekitar 764,42 Ha.

Ruang wilayah bersifat tetap dan terbatas, sementara kebutuhan ruang untuk mendukung kehidupan masyarakat semakin meningkat. Konflik kepentingan ruang antar sektor tidak terelakkan, sehingga diperlukan adanya penataan ruang agar tercapai ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kondisi saat ini upaya penataan ruang masih belum optimal karena belum tersedianya instrumen penataan ruang yang detail yang dibutuhkan pada level operasional berupa RDTR.

Jika dilihat dari indikator tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang, capaiannya sudah cukup tinggi yaitu 84,13 % (perhitungan data spasial). Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi antara lain pada kawasan lindung yang menjadi kawasan budidaya.

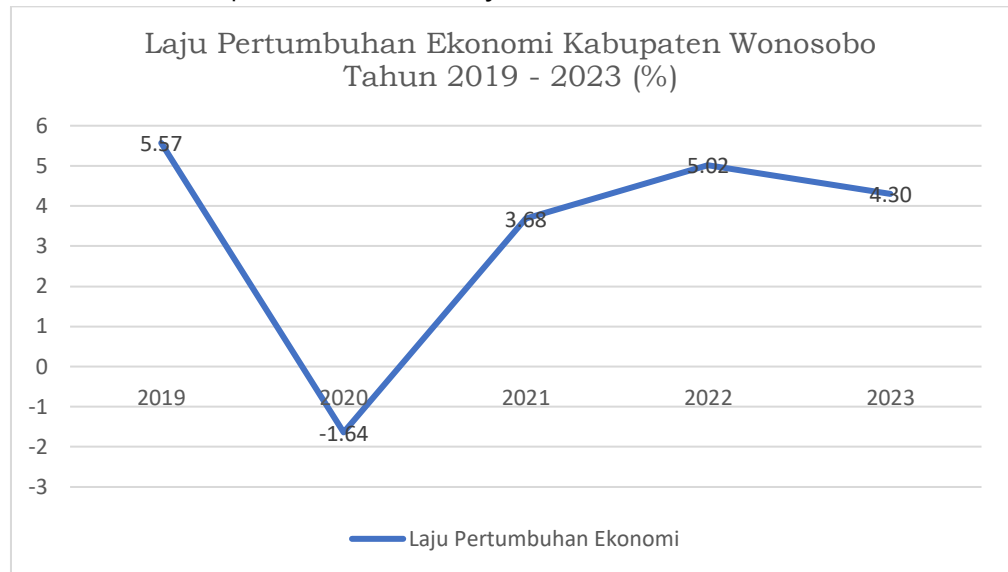
Dalam konteks infrastruktur kewilayahan yang masih menjadi isu strategis yaitu :

- a) peningkatan kondisi kemantapan jalan pada kawasan sentra produksi pangan dan destinasi pariwisata prioritas, jalan penghubung desa miskin;

- b) peningkatan akses air limbah domestik aman;
- c) Penanganan rumah tidak layak huni di wilayah kumuh, kemiskinan dan stunting;
- d) penataan ruang.

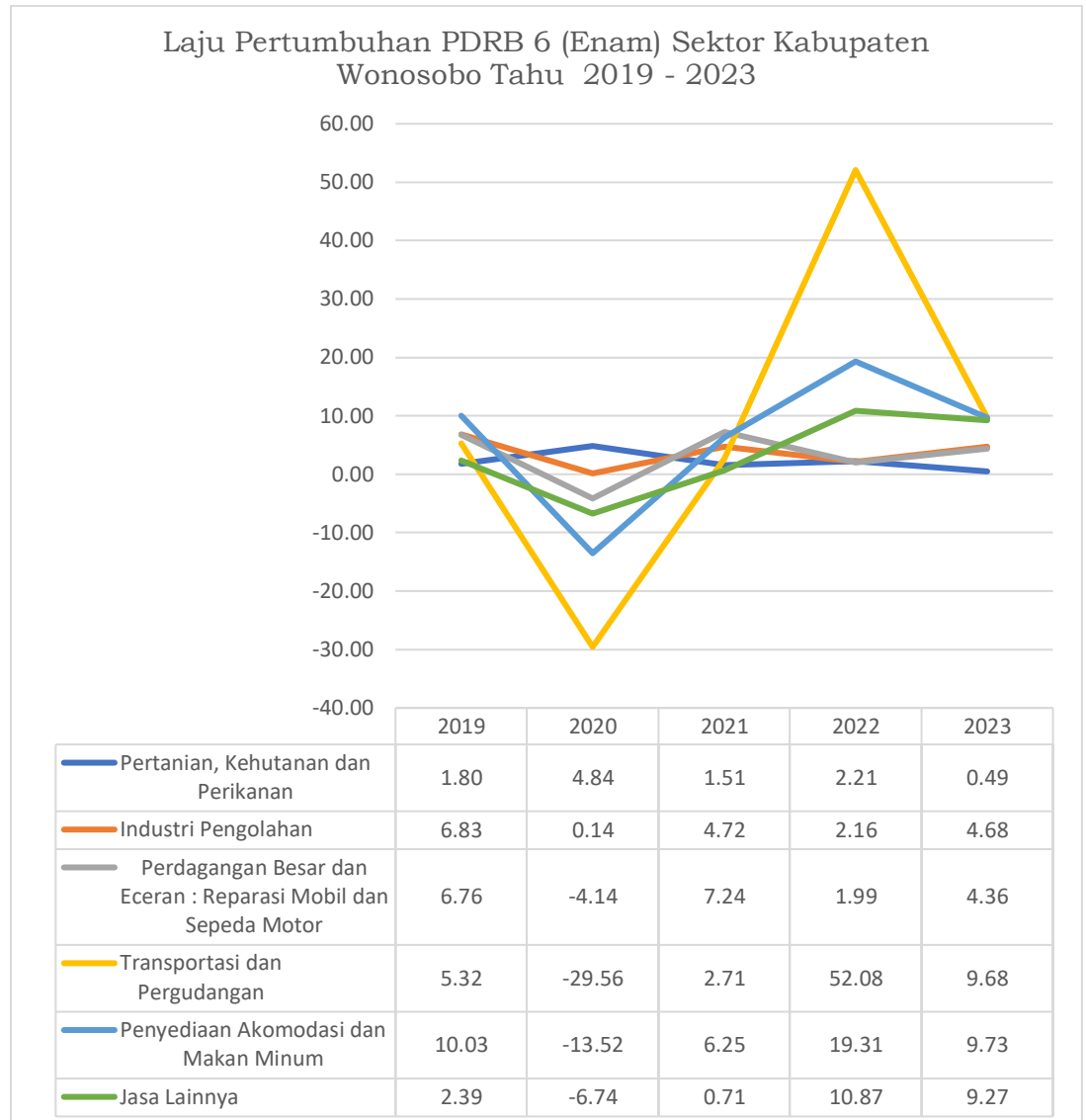
2) Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal;

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan regional. Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dari 5,02% pada tahun 2022 menjadi 4,30% di tahun 2023.



Grafik 1.1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 (%)

Struktur ekonomi di Kabupaten Wonosobo tahun 2023 berturut-turut didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 28,76%; sektor industri pengolahan 18,13%; dan Sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor 16,69%. Pertanian mempunyai peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, utamanya pada upaya mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.



Grafik 1.1. 2 Laju Pertumbuhan PDRB 6 (Enam) Sektor Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

Nilai Produk Domestik Regional Broto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2023 naik dari Rp 4.304 milyar tahun 2022 menjadi Rp. 4.325, 17 milyar tahun 2023. Akan tetapi kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan pertanian pada tahun 2023 justru mengalami penurunan 0,85 % dari tahun 2022 sebesar 29, 61 % menjadi 28,76 % tahun 2023.

Nilai PDRB ADHK sektor industri pengolahan naik menjadi Rp 2.613,56 milyar (2023) dari Rp 2.496,62 milyar (2022). Kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) tahun mengalami kenaikan sebesar 0,14% dari 17,99% (2022) menjadi 18,13% (2023). Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan naik dari 2,16% (2022) menjadi 4,68% (2023)

Nilai PDRB ADHK sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami kenaikan dari Rp. 2.663, 80 milyar (2022) menjadi Rp. 2.779,89 milyar (2023).Laju

pertumbuhan sektor perdagangan besar; reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami kenaikan dari 1,99% (2022) menjadi 4,36% (2023).

Wonosobo dianugerahi tanah yang subur dan alam yang indah, menjadi faktor pendukung utama bagi pertanian dan pariwisata di Wonosobo. Pertanian mempunyai peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, utamanya pada upaya mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Wonosobo mempunyai beragam destinasi wisata alam, budaya, sejarah, dan kuliner, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Pariwisata tidak hanya memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah, namun juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan sektor lainnya. Industri pariwisata menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, baik di sektor formal maupun informal, seperti homestay, warung makan, transportasi, dan kerajinan tangan.

Sektor transportasi dan pergudangan mengalami kenaikan dari Rp 954,06 milyar (2022) menjadi Rp 1022,83 milyar (2023). Kenaikan PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan tahun 2023. Penyediaan akomodasi makan dan minum tahun 2023 juga mengalami kenaikan PDRB ADHK dari Rp 504,65 milyar (2022) menjadi Rp. 551,95 milyar. Kenaikan di sektor penyediaan transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tersebut mencerminkan bahwa sektor pariwisata berkembang cukup baik di Kabupaten Wonosobo. Pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Wonosobo pada 2023 sebanyak Rp 266.786.118.103 sedangkan pendapatan sektor pariwisata pada 2023 sejumlah Rp15.961.985.119 dan memberikan kontribusi sebesar 5,98% terhadap PAD. Pendapatan sektor pariwisata meliputi pajak hiburan sebanyak Rp133.356.609, pajak hotel sebesar Rp1.581.380.479, pajak restoran sebesar Rp 8.144.052.731 dan retribusi tiket wisata, parkir dan kios. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Wonosobo selama tahun 2023 sebanyak 1.742.434 orang.

Pengembangan pariwisata juga mendorong pertumbuhan sektor lainnya, seperti industri kreatif, perdagangan, dan jasa. Dengan adanya wisatawan yang datang, berbagai produk lokal dapat dipromosikan dan dijual, meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha lokal. Namun, dalam mengoptimalkan peran pariwisata dalam pengembangan ekonomi, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam hal pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

Masyarakat setempat juga perlu terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata, baik dalam hal pelestarian lingkungan dan budaya, maupun dalam penyediaan produk dan jasa yang berkualitas bagi wisatawan. Sementara itu, pelaku usaha pariwisata perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan demi menjaga daya tarik destinasi wisata Indonesia.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka (TPT). TPT di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 5,01% (2022) menjadi 4,95%. Namun jumlah pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 22.714 orang (2022) menjadi 25.712 orang (2023), sehingga perluasan kesempatan kerja menjadi perhatian khusus.

Realisasi investasi Kabupaten Wonosobo tahun 2023 hanya sebesar Rp 814.982.531.940,- sehingga upaya peningkatan investasi perlu diarahkan pada perbaikan iklim investasi dan kepastian usaha pemberian kemudahan bagi investasi yang akan masuk terutama pada sektor pertanian dan pariwisata.

Berdasarkan uraian diatas maka sasaran pokok adalah terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan isu strategis sebagai berikut :

1. Peletakan landasan menuju ekonomi yang inklusif, produktif dan berkelanjutan;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan Pariwisata;
3. Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan Pariwisata;
4. Optimalisasi hilirisasi sektor pertanian;
5. Pengembangan wisata tematik untuk meningkatkan integrasi antar destinasi wisata.
6. Peningkatan produktifitas dan daya saing UMKM sektor pertanian dan pariwisata.

3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing;

Pembangunan manusia memiliki peran penting dan strategis untuk menentukan masa depan dan kemajuan daerah. Pembangunan sumber daya manusia berarti mempersiapkan generasi yang sehat, berpendidikan tinggi, berkarakter, tenaga kerja yang memiliki kompetensi, keterampilan dan peka dengan perkembangan teknologi serta mampu beradaptasi namun tetap berbudaya.

Meskipun demikian, membangun SDM merupakan sebuah proses yang panjang dan berkelanjutan yang tidak secara instan bisa langsung terlihat hasilnya karena banyak aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, baik dari sisi pemerintah sebagai penyedia layanan maupun masyarakat selaku pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan.

Keberhasilan pembangunan manusia yang secara global dinilai melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Wonosobo dalam kurun 5 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang positif dan bergerak membaik dari tahun ketahun. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Wonosobo sebesar 70,18 atau naik 0,49 dibandingkan tahun 2022. Kemajuan ini telah menaikan posisi IPM yang semula kategori sedang menjadi kategori tinggi. Namun demikian, jika dibandingkan dengan rata- rata capaian Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Wonosobo masih jauh tertinggal atau 3,21 poin di bawah angka Jawa Tengah yang pada tahun 2023 telah mencapai 73.39.

Kualitas SDM tercermin pada situasi angkatan kerja yang sampai tahun 2022 masih didominasi oleh penduduk dengan pendidikan SD dan penduduk yang bekerja lebih banyak di sektor non formal. Sekitar 67% penduduk yang bekerja hanya berpendidikan SD/ sederajat bahkan ada yang tidak tamat SD. Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka peluang kerja pada sektor formal akan semakin sempit yang berpengaruh pula pada rendahnya pendapatan dan berdampak pada kemampuan daya beli. Situasi ketenagakerjaan relevan dengan profil pendidikan penduduk di Kabupaten Wonosobo. Sampai dengan tahun 2023. rata- rata lama sekolah di Kabupaten Wonosobo masih berada di angka 6.89 tahun dan harapan lama sekolah 11.80 tahun. Sebagai komponen pembentuk indeks pendidikan, rata- rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah masih perlu ditingkatkan mengingat capaiannya masih dibawah rata-

rata Provinsi Jawa Tengah dimana rata- rata lama sekolah pada tahun 2023 telah mencapai 8.01 tahun dan harapan lama sekolah telah mencapai 12,85 tahun. Artinya ketika rata- rata anak usia 7 tahun di Jawa Tengah memiliki harapan untuk dapat meraih jenjang pendidikan sampai dengan lulus SMA/ sederajat dan pendidikan tinggi 0,85 tahun, anak anak di Kabupaten Wonosobo hanya memiliki harapan tamat sekolah sampai dengan jenjang SMP/ sederajat dan bersekolah SMA/ sederajat sampai kelas XII. Pada penduduk usia 25 tahun ke atas, ketika rata- rata penduduk usia 25 tahun keatas di Jawa Tengah telah bersekolah sampai kelas 3 SMP/ sederajat, penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Wonosobo hanya bersekolah sampai kelas 1 SMP. Tantangan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Wonosobo adalah belum meratanya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan. Jumlah guru yang sesuai dengan kompetensi belum optimal dan persebarannya tidak merata, kemampuan literasi dan numerasi yang masih perlu ditingkatkan, penciptaan iklim pembelajaran yang inovatif dan mendukung kecakapan hidup, serta motivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada dimensi kesehatan, pembangunan manusia dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Sampai dengan tahun 2023, usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Wonosobo sebesar 74,01 tahun atau meningkat 0,12 tahun dibandingkan tahun 2022. Keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari meningkatnya pelayanan dan perawatan kesehatan serta meningkatnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pula terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi usia harapan hidup antara lain angka kematian ibu, kematian bayi, dan angka kesakitan, kesehatan lansia serta faktor kecukupan gizi dan faktor lingkungan. Semakin tinggi usia harapan hidup menunjukkan rendahnya bayi yang lahir mati, menurunnya kematian ibu, tingginya kualitas kesehatan lansia, terkendalinya penyakit baik menular maupun tidak menular, tingginya kualitas gizi masyarakat terutama pada bayi dan balita, remaja, ibu hamil dan ibu menyusui serta kualitas lingkungan yang semakin baik. Melihat perkembangan usia harapan hidup di Kabupaten Wonosobo dibandingkan dengan rata- rata capaian di Jawa Tengah yang pada tahun 2023 telah mencapai 74,69 tahun, maka pembangunan kesehatan perlu ditingkatkan lagi mengingat masih adanya kasus kematian bayi, kematian ibu, kondisi ketidak cukupan gizi yang menyebabkan ibu hamil KEK, anemia, balita stunting dan kasus gizi buruk serta gizi kurang serta angka kesakitan yang disebabkan karena penyakit menular dan tidak menular. Bahkan dalam fenomena perubahan gaya hidup, angka kematian cenderung disebabkan karena penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi dan gangguan jantung. Sedangkan penyakit menular yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah HIV dan TB yang sampai dengan tahun 2023 kabupaten Wonosobo belum mencapai eliminasi TB. Salah satu target Tujuan 3 Pembangunan Berkelanjutan yaitu pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

Dalam hal pemenuhan gizi masyarakat khususnya bayi dan balita, pada tahun 2022 Kabupaten Wonosobo berhasil menurunkan angka stunting menjadi 22,7 setelah pada tahun 2022

mencapai 28,1%. Namun penurunan ini masih jauh dibawah target nasional dimana pada tahun 2024 angka stunting menjadi 14%. Maka upaya untuk meningkatkan kualitas gizi melalui pencegahan dan penanganan stunting masih menjadi salah satu isu yang perlu segera ditangani untuk memastikan tidak ada lagi balita stunting baru di Kabupaten Wonosobo.

Pembangunan sumber daya manusia juga erat kaitanya dengan pembangunan kependudukan yang bertujuan untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Isu strategis pada pembangunan kependudukan adalah peningkatan cakupan pemakaian kontrasepsi serta pendewasaan usia perkawinan dimana pada tahun 2023 rata- rata usia kawin pertama perempuan di Kabupaten Wonosobo mencapai 19,32 tahun, sedangkan BKKBN merekomendasikan usia ideal perempuan menikah adalah 21 tahun. Pembangunan kependudukan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan keluarga sebagai satuan terkecil masyarakat. Bahkan dalam upaya pencegahan stunting, peran intervensi gizi sensitif melalui pemberdayaan keluarga untuk peningkatan kesehatan reproduksi menjadi faktor penting keberhasilan penurunan stunting. Sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu *no one left behind* maka kesetaraan gender dalam pembangunan manusia masih menjadi isu penting dimana masih ada kesenjangan antara laki- laki dan perempuan. Jika dibandingkan kondisi IPM tahun 2022 antara perempuan dan laki- laki masih ada kesenjangan dimana capaian rata- rata lama sekolah perempuan 6.63 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah laki laki sebesar 7,13 tahun. Begitu juga dengan pengeluaran per kapita disesuaikan dimana pada kelompok laki- laki telah mencapai Rp. 15.192.000 sedangkan perempuan hanya sebesar Rp. 9.754.000. Dengan kondisi tingkat pendidikan yang rendah pada rata- rata perempuan usia 25 tahun keatas di Kabupaten Wonosobo menyebabkan rendahnya daya saing pada sektor tenaga kerja. Berdasarkan sakernas 2022, 36,58% perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga tidak dibayar yang rentan tidak mendapatkan hak- haknya sebagai pekerja seperti jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak memiliki hak untuk berpendapat serta meningkatkan kapasitasnya. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap sumbangan pendapatan perempuan yang masih rendah serta perempuan sebagai tenaga profesional yang belum optimal. Rendahnya posisi tawar perempuan dalam keluarga juga mengakibatkan timbulnya kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan yang juga masih terjadi di Kabupaten Wonosobo meskipun menurun setiap tahunnya, namun masih perlu mendapatkan perhatian. Kekerasan terhadap anak juga masih terjadi di Kabupaten Wonosobo baik yang terjadi di lingkungan sekolah, keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Dalam hal pemenuhan hak anak, masih ada dimensi hak anak yang perlu ditingkatkan yang tentunya membutuhkan peran semua pihak.

Pembangunan manusia secara inklusif juga erat kaitannya dengan pemenuhan pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) sebagaimana Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah. Dengan luasnya cakupan yang harus terlayani dan kompleksnya permasalahan dalam pelayanan bidang sosial, maka kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan. Pemenuhan layanan sosial tidak hanya memberikan bantuan yang bersifat charity namun juga meningkatkan keberdayaan PPKS agar bisa mandiri dan hidup secara layak di masyarakat.

Pembangunan manusia juga tidak terlepas dari peran desa dalam menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Desa

memiliki peran untuk mengetahui permasalahan di desanya dan mengetahui potensi yang dimiliki untuk digali dan dioptimalkan serta berinovasi untuk meningkatkan kemajuan desanya. Melalui indeks desa membangun (IDM), masing-masing desa dapat menilai tingkat kemandirian desanya dalam dimensi ekonomi, sosial dan ekologi/lingkungan. Sampai dengan tahun 2023, baru ada 31 desa kategori mandiri atau 31% dari 236 desa. Dengan demikian, desa perlu didorong untuk meningkatkan kualitas perencanaannya berbasis IDM dan data serta memperhatikan keberlanjutan pembangunan melalui optimalisasi pembangunan kawasan perdesaan berbasis potensi.

Sumber daya manusia yang unggul dapat terlihat dari prestasi olahraga dan daya saing pemuda. Bonus demografi yang segera akan dicapai perlu dipersiapkan dengan memperhatikan pembangunan pemuda baik pada penguatan kesehatan reproduksi pemuda, pendidikan karakter dan literasi, penguasaan teknologi, keterampilan dan informasi serta kewirausahaan dan kemampuan berinovasi.

Tantangan utama dalam mengimplementasikan strategi pembangunan SDM yang efektif adalah memberikan akses yang adil dan merata bagi semua kelompok masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pelatihan dan ketrampilan dan sumber daya ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Maka, diperlukan strategi inklusif yang memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara dan adil. SDM yang berkualitas juga akan berperan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor ekonomi, membantu menciptakan lapangan kerja dan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan situasi tersebut, maka target pembangunan sumber daya manusia pada tahun 2025 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, sehat, mandiri dan berkarakter inklusif dan berkelanjutan. Maka isu strategis pembangunan sumber daya manusia adalah

- a) Pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas serta peningkatan literasi Masyarakat;
- b) Peningkatan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perbaikan gizi Masyarakat;
- c) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga;
- d) Peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga;
- e) Peningkatan perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan;
- f) Implementasi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;
- g) Peningkatan keberlanjutan pembangunan desa dan memperkuat ekonomi masyarakat desa.

4) Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan;

Kemiskinan masih menjadi isu utama di Kabupaten Wonosobo, meskipun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dan membaik. Pada tahun 2023 Kabupaten Wonosobo berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 15,58% dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 123.700 jiwa. Penurunan angka kemiskinan ini berhasil menaikkan peringkat yang sebelumnya pada posisi 34 naik menjadi 33 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penurunan angka kemiskinan juga diikuti dengan penurunan keparahan dan kedalaman

kemiskinan yang artinya kemiskinan di Kabupaten Wonosobo bergerak positif dengan semakin mendekatnya penduduk miskin ke garis kemiskinan dan menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin itu sendiri. Namun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah yang pada tahun 2023 telah turun menjadi 10,77%, angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo masih tertinggal 4,81%. Tingkat kemiskinan ekstrem Jawa Tengah pada tahun 2023 turun menjadi 1,1% yang tentunya semua kabupaten/kota berkontribusi pada angka penurunan Jawa Tengah.

Tantangan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan adalah pengendalian harga kebutuhan Pokok masyarakat, perbaikan sistem distribusi barang kebutuhan pokok, konvergensi penanganan kemiskinan, komitmen penggunaan satu data, perbaikan sistem monitoring dan evaluasi intervensi penanganan kemiskinan serta kolaborasi pentahelix yang lebih terstruktur.

5) Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusifitas wilayah;

Tata kelola pemerintahan adalah fondasi yang memastikan pemerintah mampu berjalan dengan efisien, adil, dan bertanggung jawab. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip penting seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah prinsipnya adalah sebuah upaya mewujudkan pemerintahan yang kapabel, menguatkan transparansi informasi publik, pengelolaan komunikasi publik serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah berbasis teknologi bertujuan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih baik (*Good Governance*). Salah satu parameter untuk mengukur pemerintahan yang baik adalah Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Capaian Indeks SPBE Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 masih berada di bawah target daerah dan di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 2,90.

Sementara itu capaian dari Nilai SAKIP Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 sudah semakin membaik yaitu 66,96, namun nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata Jawa Tengah (67,74). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi penilaian kritis terhadap kinerja pemerintah, dan nilai SAKIP yang masih kurang akan berdampak pada ketidakjelasan dalam prioritas dan arah strategis pemerintah daerah serta mencerminkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan layanan publik yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi kemampuan daerah untuk mendapatkan dana tambahan.

Hingga saat ini, Kabupaten Wonosobo termasuk dalam kabupaten dengan kemampuan keuangan daerah rendah. Nilai IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) masuk dalam kriteria "perlu perbaikan" (76,44). Daerah dengan kemampuan keuangan yang rendah akan sangat terdampak kebijakan pusat terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi kabupaten/kota. Salah satu kebijakan yang berdampak di Kabupaten Wonosobo adalah penentuan alokasi anggaran untuk tujuan tertentu (prinsip *earmarking*). Secara normatif, *earmarking* memberikan kepastian dalam besaran anggaran untuk pembangunan pada urusan tertentu, namun kebijakan ini dapat mengurangi fleksibilitas dan kapasitas anggaran

daerah untuk pembiayaan prioritas daerah, terutama jika belanja yang ditentukan bersifat *mandatory*.

Untuk mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan kondusifitas wilayah. Aspek kondusifitas wilayah ini menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Kondusifitas wilayah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 ditunjukkan dan Indeks Rasa Aman (74,78).

Dalam rangka meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat serta keamanan, ketentraman, dan ketertiban terutama pasca pemilu serentak tahun 2024, isu politik menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pemerintah daerah terus meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan sebagai upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan harmoni sosial dalam masyarakat.

Indeks Merit pada tahun 2022 sebesar 228,50 dengan kategori cukup (KemenPAN-RB) sedangkan pada tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 267. Indeks merit sebesar 267 sebetulnya termasuk ke dalam kategori baik akan tetapi masih perlu untuk ditingkatkan terutama dalam hal penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN yang sesuai dengan Anjab dan ABK serta pemetaan kompetensi seluruh pegawai sesuai dengan catatan pada dokumen penilaian indeks sistem merit Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang masih menjadi isu strategis yaitu:

- a) Penguatan proses perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- b) Penguatan perencanaan, evaluasi dan pengendalian berdasarkan kebijakan Satu Data Wonosobo;
- c) Pemantapan implementasi merit sistem serta peningkatan profesionalisme ASN sebagai pelayan publik;
- d) Peningkatan kinerja pendapatan asli daerah;
- e) Penguatan tata kelola pemerintahan yang semakin optimal dengan implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
- f) Peningkatan kondusifitas wilayah dengan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Kesadaran akan keberagaman, toleransi, dan inklusivitas sosial dapat menjadi dasar bagi pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

6) Pemantapan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Serta Pengurangan Risiko Bencana;

Indikasi kondisi lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan. Capaian IKLH tahun 2023 sebesar 66,12 menurun 0,3 poin dari tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh adanya capaian indeks kualitas lahan yang menurun.

Kondisi lahan di Wonosobo masih belum optimal yang ditandai dengan capaian indeks kualitas lahan sebesar 55,54 (interval 50-70 masuk kategori sedang). Indeks kualitas lahan menggambarkan nilai kualitas lahan berdasarkan dari tutupan lahan. Kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kondisi tutupan vegetasi non di luar kawasan hutan terjadi penjarangan. Lahan-lahan yang idealnya ditanami pohon/ tanaman keras, sebagian besar digunakan untuk budidaya pertanian hortikultura. Budidaya hortikultura, misalnya kentang cukup masif di kawasan hulu dan tidak menerapkan prinsip ramah lingkungan (minimnya tegakan pohon, guludan searah lereng, dan bahkan ada pada lahan dengan kemiringan yang sangat curam). Kondisi tersebut telah menyebabkan terjadinya sedimentasi dan erosi terutama pada musim penghujan yang memicu tingginya risiko bencana longsor dan banjir limpasan/ bandang.

Dalam konteks lingkungan hidup, wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki peran strategis sebagai kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) terutama DAS Serayu yang merupakan salah satu DAS prioritas nasional. Adanya praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan dianggap semakin menyebabkan kondisi buruk daerah aliran sungai dan membahayakan daerah di bawahnya meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Purworejo dan Kebumen.

Salah satu objek vital nasional di kabupaten tetangga yang ikut terdampak dari pola pertanian hortikultura di kawasan hulu yaitu Waduk Mrica. Percepatan sedimentasi di Waduk Mrica memang dominan disebabkan oleh kawasan hulu DAS Serayu dari sub das Merawu di Banjarnegara namun juga ada andil dari kawasan hulu di Wonosobo (terutama sub das Serijo). Angkutan sedimen suspensi yang masuk Waduk dari Sungai Serayu yang berasal dari lahan di Wonosobo mencapai 4,3 juta m³. Angka yang besar untuk mengindikasikan berpindahnya sumberdaya tanah dari kawasan hulu akibat erosi dan menjadi sedimen di wilayah tengah dan membahayakan fungsi Waduk Mrica. Jika pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi kewenangan pusat, maka peran kewenangan pemda dalam mengatasi degradasi lahan dapat didasarkan pada upaya konservasi tanah dan air. Degradasi lahan terutama di kawasan hulu juga terkait dengan perubahan iklim. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan frekuensi kejadian banjir limpasan meningkat, terutama di sungai. Meskipun belum menimbulkan bencana peningkatan debit air sungai akan membahayakan daerah bawahnya.

Sampah menjadi masalah serta isu dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo. Persentase pengelolaan sampah baru mencapai 47,11%. Belum optimalnya pengelolaan sampah disebabkan diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Upaya pengurangan sampah dan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan sampah juga masih terbatas. Dari 265 desa/kelurahan di Wonosobo baru 8,3% yang memiliki TPS 3R atau sejenisnya pada tahun 2023. Selain itu, ada kecenderungan peningkatan jumlah armada desa yang mengangkut sampah langsung ke TPA Wonorejo tanpa pengolahan terlebih dahulu. pada tahun 2023, tercatat sebanyak 124 desa/kelurahan yang mengangkut sampah ke TPA Wonorejo, dengan massa sampah yang masuk 19.203 metrik ton/tahun. Dengan pengelolaan sampah di TPA yang masih cenderung *open dumping* kombinasi *semi-controlled landfill* menjadikan kapasitas TPA terlampaui. di samping itu, pada musim penghujan, TPA mengalami longsor sampah.

Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki potensi ancaman bencana yang tinggi. Menurut kajian rawan bencana tahun 2023, kejadian bencana yang termasuk ke dalam prioritas utama

berdasarkan pada kecenderungan kejadian dan hasil analisis risiko bencana meliputi banjir bandang, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kekeringan. Keempat bencana alam tersebut merupakan prioritas yang perlu diutamakan karena adanya kecenderungan kejadian yang terus meningkat dengan tingkat risiko kelas sedang. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Wonosobo adalah 0,84. Meskipun angkanya termasuk tinggi tetapi masih terdapat indikator penilaian IKD yang rendah yaitu pada prioritas perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan prioritas pengembangan sistem pemulihan bencana. Penguatan kesiapsiagaan salah satunya dengan adanya rencana kontijensi bencana. Saat ini belum semua prioritas bencana memiliki dokumen tersebut. Pemulihan pasca bencana tidak hanya fisik atau infrastruktur saja tetapi aspek sosial juga perlu diperhatikan. Aspek sosial ini terkait dengan pemulihan kehidupan Masyarakat.

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021 – 2026, dan pada tahun 2025 terjadi masa transisi kepemimpinan BUpati dan Wakil Bupati Wonosobo terpilih, yang dilantik dan ditetapkan untuk masa jabatan 2025-2030 pada 20 Februari 2025. Sehingga ditetapkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Adapun kedua Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Visi

“TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA”

Misi

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata; dan
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaanya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Visi

MEWUJUDKAN WONOSOBO SEJAHTERA, ADIL, DAN MAKMUR

Misi

1. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan Kesehatan;
2. Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata;
3. Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman;
4. Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing;
5. Tumbuh dan kembangkan koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat;
6. Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya local;
7. Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo;
8. Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera).

Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tersebut apabila dikaitkan dengan misi pada RPJMN 2020-2024 dan RPJMN 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1.12

Keselarasan RPJMN dengan RPJMD Wonosobo Tahun 2021-2026

Misi RPJMN 2020-2024	Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026
VISI	
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera
MISI	
Peningkatan Kualitas manusia Indonesia	Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan Pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern
Struktur ekonomi yang produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 2: Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi
Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata

Misi RPJMN 2020-2024	Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberdayaan dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan	Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat

Tabel 1.1.13

Keselarasan RPJMN dengan RPJMD Wonosobo Tahun 2025-2029

Misi RPJMN 2025-2029	Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025-2029
VISI	
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur
MISI	
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Misi 1: Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan. Misi 3: Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman.

Misi RPJMN 2025-2029	Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025-2029
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Misi 3: Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman.
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Misi 2: Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata.
Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Misi 1: Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan.
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Misi 7: Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Misi 1: Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan.
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegah dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Misi 8: Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Misi 6: Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya loka

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, maka kerangka logis RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1.14
Keselarasn Dokumen RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Wonosobo

No	RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045	Penerjemahan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026
VISI		
	Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur
MISI		
1	Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan	Misi 2: Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Misi 8: Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).
3	Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan	Misi 2: Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata
4	Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing	Misi 1: Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan
5	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Misi 8: Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya lokal

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029:

Tabel 1.1.15

Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 Dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Jawa Tengah	RPJMD Kabupaten Wonosobo
	2025-2029	Tahun 2025-2029
	VISI	
	Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045	Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur
	MISI	
1	Misi 1: Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global	Misi 1: Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan Misi 4: Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing
2	Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan	Misi 5: Tumbuh dan kembangkan Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat; Misi 7: Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo.
3	Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas	Misi 8: Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat)

No	RPJMD Provinsi Jawa Tengah	RPJMD Kabupaten Wonosobo
	2025-2029	Tahun 2025-2029
4	Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsi	Misi 2: Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata.
5	Misi 5: Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan	Misi 6: Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya lokal
6	Misi 6: Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	Misi 4: Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing.

Dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan. Dokumen RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi lainnya yang berbatasan, RTRW Kabupaten Wonosobo, RTRW Provinsi Jawa Tengah. RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Adapun penjabaran unsur visi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 dan unsur visi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025-2029 ke dalam misi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1.16**Penerjemahan Unsur Visi Ke Dalam Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026**

Unsur Visi	Penjelasan
Berdaya Saing	Pembangunan daerah yang berdaya saing didasarkan pada elemen utama pembangunan masyarakat yang mampu meningkatkan taraf hidup, mampu berkompetisi dengan daerah lain, mampu memenuhi kebutuhan daerah, mampu menyediakan lapangan kerja, serta pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengedepankan kebersamaan, gotong-royong dan kerja sama semua pihak sehingga Kabupaten Wonosobo dapat mengangkat harkat dan martabatnya dalam berbagai bidang.
Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi sosial, dan lingkungan fisik yang lebih baik dan didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, kreatif, berdaya saing, berakhlak mulia, serta berwawasan global.
Sejahtera	Meningkatkan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan ini merupakan wujud dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang baik, mampu menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehingga kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin dapat diwujudkan

Perumusan prioritas RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dengan mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah, permasalahan pembangunan/isu strategis Kabupaten Wonosobo, dan pokok-pokok pikiran DPRD. Keselarasan antara prioritas daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dengan prioritas nasional RKP tahun 2025 ditunjukkan pada persandingan antara Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Jateng dan Prioritas Nasional yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1.17

**Keselarasn Antara PN RKP 2025 dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan RKPD
Kabupaten Wonosobo Tahun 2025**

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGGAH	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
PN 1. Transformasi Ekonomi	PP 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung	PD 2. Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumber daya lokal

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
	infrastruktur yang merata dan berkualitas	PD. 1 Pemantapan infrastruktur pada kawasan prioritas
PN 2. Transformasi Sosial	PP 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	PD. 3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing
PN 3. Transformasi Tata Kelola	PP 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PD. 4 Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah
PN 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia		
PN 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	PP 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	PD. 5 Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengurangan risiko bencana

Sumber: Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, 2025

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja. Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan dan 5 (lima) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum dan Non Urusan.

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - a) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan. Program ini diarahkan pada perluasan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup dan Peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu dan relevansi pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK PAUD 3-6 tahun, Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A, Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B, Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A, Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B, Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani, Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal, Persentase sekolah ramah anak, Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan, Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan, persentase PAUD (TK/RA/KB/SPS yang terakreditasi, Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini, Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, Persentase Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI, persentase Warga negara Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs, Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar, Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik, Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4. Dalam rangka percepatan pencapaian kinerja program dan mendukung kinerja daerah, beberapa implementasi yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi program unggulan daerah antara lain yaitu Pengembangan sekolah inklusi sebagai perwujudan ramah VIII-1 RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 HAM melalui Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah Inklusi dan Tim Konsultasi/ Assesment dan Gerakan kembali ke sekolah/Pengembalian Anak ke Sekolah.
- 2) Program Pengembangan Kurikulum Program ini diarahkan pada penguatan kurikulum yang inklusif, inovatif dan adaptif untuk menghasilkan SDM berkarakter, mandiri dan berdaya saing. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir Assesment Nasional, persentase sekolah jenjang pendidikan

dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal dan persentase PAUD yang melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal.

- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu dan relevansi pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio kecukupan guru kelas SD dan rasio ketercukupan Guru SMP.
- 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu dan relevansi pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi dan persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar.

b) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini diarahkan pada peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan, peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat secara berkelanjutan, peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan.
- 2) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program ini diarahkan pada peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar, Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat dan Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT).
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Program ini diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Puskesmas Yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dan Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk).
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program ini diarahkan pada optimalisasi peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio posyandu per satuan balita, Persentase posyandu dengan strata mandiri, Persentase poskestren aktif dan Cakupan desa siaga aktif strata mandiri

- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan/ Puskesmas untuk mencapai indikator Rata-rata Indeks kepuasan layanan puskesmas, lama tunggu pelayanan obat racikan, dan lama tunggu pelayanan rawat jalan.
- c) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Program Penyelenggaraan Jalan Program ini diarahkan pada peningkatan kinerja pelayanan jalan kabupaten sesuai dengan kondisi geografis dan tematik kawasan dan peningkatan aksesibilitas wilayah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani, persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik.
 - 2) Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA) Program ini diarahkan pada Revitalisasi tata kelola sistem sumberdaya air. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik.
 - 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program ini diarahkan pada peningkatan akses air minum layak yang berkelanjutan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak.
 - 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program ini diarahkan pada percepatan Peningkatan akses layanan pengolahan air limbah domestik layak.
 - 5) Program Penataan Bangunan Gedung Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berkualitas.
 - 6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat.
 - 7) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berkualitas.
 - 8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program ini diarahkan pada penguatan profesionalisme jasa konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio tenaga operator/teknisi/analisis bidang konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi.

- 9) Program Pengembangan Permukiman Program ini diarahkan pada peningkatan layanan kualitas infrastruktur permukiman. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah dokumen teknis kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang terverifikasi tepat waktu sesuai peraturan
 - 10) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berkualitas.
 - 11) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang didukung sarana prasarana memadai.
- d) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 1) Program Pengembangan Perumahan Program ini diarahkan pada Fasilitasi penyediaan akses rumah layak huni.
 - 2) Program Kawasan Permukiman Program ini diarahkan pada percepatan penanganan kawasan kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani dan persentase penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah (legal).
 - 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program ini diarahkan pada Optimalisasi pencegahan kawasan kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang tertangani.
 - 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana utilitas yang terpadu dan berkelanjutan.
 - 5) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas lembaga penyedia perumahan.
- e) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,

Keindahan) dan persentase Penegakan Perda, persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara.

- 2) Program Penanggulangan Bencana Program ini diarahkan pada perkuatan kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta persentase desa dan kelurahan tangguh bencana.
 - 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Program ini diarahkan pada percepatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang tangguh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time) dan Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan yang dibentuk dan dilatih oleh unit damkar dalam waktu tanggap (Response Time).
- f) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
- 1) Program Rehabilitasi Sosial Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - 2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program ini diarahkan pada penguatan tata kelola sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk ketepatan sasaran dan intervensi program.
 - 3) Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kelengkapan TMP dalam kondisi baik.
 - 4) Program Pemberdayaan Sosial Program ini diarahkan pada peningkatan peran lembaga dan masyarakat dalam kemandirian PPKS.
 - 5) Program Penanganan Bencana Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- a. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan:

- 1) Program Penempatan Tenaga Kerja Program ini diarahkan pada pengembangan start up wirausaha baru bagi masyarakat miskin secara berkelanjutan, perluasan dan penempatan lapangan kerja dan penumbuhan peluang kewirausahaan.
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja.
- 3) Program Hubungan Industrial Program ini diarahkan pada perlindungan tenaga kerja.
- 4) Program Perencanaan tenaga kerja Program ini diarahkan pada perluasan dan penempatan lapangan kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan.
- 2) Program Kualitas Keluarga Program ini diarahkan pada peningkatan layanan konseling Keluarga.
- 3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program ini diarahkan pada peningkatan layanan dan fasilitas publik yang ramah anak dan inklusif. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa ramah anak.
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program ini diarahkan pada peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate
- 5) Program Perlindungan Perempuan Program ini diarahkan pada peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak.
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak Program ini diarahkan pada peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan keamanan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio desa ber lumbung pangan, persentase desa mandiri pangan.

- 2) Program Pengawasan Keamanan Pangan Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan keamanan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase bahan pangan ASUH.
 - 3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan keamanan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja VIII-9 RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yaitu ketersediaan pangan per kapita/hari, persentase cadangan pangan utama (beras) dan persentase cadangan pangan utama
 - 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan keamanan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa berstatus rawan pangan.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
- 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program ini diarahkan Optimalisasi penatagunaan tanah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.
 - 2) Program Penatagunaan Tanah Program ini diarahkan Optimalisasi penatagunaan tanah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program ini diarahkan pada optimalisasi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - 2) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program ini diarahkan pada peningkatan layanan publik dalam bidang lingkungan hidup. P
 - 4) Program Pengelolaan Persampahan Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang didukung sarana prasarana memadai.
 - 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program ini

diarahkan pada Peningkatan pengelolaan B3 dan bahan B3 oleh kegiatan dan/atau usaha penghasil B3.

- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program ini diarahkan pada upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan lingkungan hidup.
- 7) Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program ini diarahkan untuk pengembangan instrumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi.
- 8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program ini diarahkan untuk peningkatan layanan publik dalam bidang lingkungan hidup.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Program Pendaftaran Penduduk Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan.
- 2) Program Pencatatan Sipil Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan.
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa.
- 2) Program Penataan Desa Program ini diarahkan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur skala perdesaan.
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa Program ini diarahkan pada pengembangan kawasan perdesaan dan perbatasan prioritas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kawasan perdesaan dilegalisasi, Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk.
- 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa Program ini diarahkan pada penguatan tata kelola administrasi pembangunan desa dan Optimalisasi pengelolaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

- 1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program ini diarahkan pada peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi remaja.
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas akses serta keterjangkauan layanan KB yang merata dan berkeadilan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta Drop out KB dan Kepesertaan KB Pria.
- 3) Program Pengendalian Penduduk Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas akses serta keterjangkauan layanan KB yang merata dan berkeadilan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rata-rata jumlah anak per keluarga dan Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program ini diarahkan pada peningkatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan jalan.
- 2) Program Pengelolaan Pelayaran Program ini diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program ini diarahkan pada peningkatan layanan dan pemanfaatan komunikasi informasi publik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Nilai Aksesibilitas Website, Nilai Informasi Tersedia Setiap Saat dan Nilai Kelembagaan PPID.
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program ini diarahkan pada implementasi e-government untuk mendukung smart city. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Nilai Kebijakan Internal SPBE, Nilai Tata Kelola SPBE, Nilai Manajemen SPBE dan Nilai Layanan SPBE.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM

- 1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan koperasi dan perluasan kemitraan usaha,.

- 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan UMKM dan perluasan kemitraan usaha serta peningkatan akses permodalan, pengelolaan usaha, pemasaran bagi masyarakat miskin.
- 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha dan kualitas koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase KSP/USP koperasi sehat.
- 4) Program Pengembangan UMKM Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha dan kualitas UMKM. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase unit usaha mikro naik kelas dan pertumbuhan omset usaha mikro.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- 1) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Program ini diarahkan pada percepatan layanan perizinan satu pintu.
- 2) Program Pelayanan Penanaman Modal Program ini diarahkan pada percepatan layanan perizinan satu pintu.
- 3) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program ini diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- 4) Program Promosi Penanaman Modal Program ini diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program ini diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda serta kemitraan.
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda serta kemitraan.
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan sistem pembinaan olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan dan pengembangan olahraga rekreasi.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program ini diarahkan pada pengelolaan data statistik dan keamanan sistem informasi

pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ketersediaan data sektoral.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program ini diarahkan pada pengelolaan data statistik dan keamanan sistem informasi pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Indeks Keamanan Informasi.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan Program ini diarahkan pada Optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal.
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program ini diarahkan pada Optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal.
- 3) Program Pengelolaan Permuseuman Program ini diarahkan pada Optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kenaikan koleksi embrio museum cagar budaya atau museum cagar budaya
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan Program ini diarahkan pada transformasi layanan perpustakaan yang inklusif.
- 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Program ini diarahkan pada Pemerataan layanan perpustakaan untuk membangun kesadaran literasi.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- 1) Program Pengelolaan Arsip Program ini diarahkan pada peningkatan akses dan layanan arsip.
- 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program ini diarahkan pada peningkatan upaya pelestarian pengembangan dan pemanfaatan arsip.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program ini diarahkan pada peningkatan SDM dan teknologi perikanan serta peningkatan sarpras, budidaya dan produksi perikanan

- 2) Program pengelolaan perikanan tangkap, Program ini diarahkan pada peningkatan sarpras budidaya dan produksi perikanan
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
- 1) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program ini diarahkan pada peningkatan kelembagaan dan kapasitas pelaku pariwisata/ekonomi kreatif melalui standarisasi dan sertifikasi
 - 2) Program Pemasaran Pariwisata, Program ini diarahkan peningkatan daya tarik, sarpras dan promosi pariwisata
 - 3) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program ini diarahkan pada peningkatan daya tarik, sarpras dan promosi pariwisata dan pengembangan desa wisata berbasis agroindustri lokal
 - 4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Program ini diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
- 1) Program Penyuluhan Pertanian, Program ini diarahkan pada peningkatan kelembagaan dan kapasitas petani, peningkatan keterampilan petani ruta miskin/buruh tani serta peningkatan partisipasi petani ruta miskin/buruh tani dalam kelembagaan petani.
 - 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program ini diarahkan diarahkan pada peningkatan akses saprodi melalui pengembangan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif.
 - 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program ini diarahkan peningkatan akses saprodi melalui pengembangan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.
 - 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program ini diarahkan pada peningkatan akses saprodi melalui pengembangan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.
 - 5) Program Perizinan Usaha Pertanian, Program ini diarahkan pada peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian, perkebunan, dan peternakan
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
- 1) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program ini diarahkan pada penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan.
 - 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program ini diarahkan pada penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan.

- 3) Program Pengembangan Ekspor, Program ini diarahkan pada promosi dan proteksi produk lokal.
 - 4) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program ini diarahkan pada promosi dan proteksi produk lokal.
 - 5) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan konsumen.
 - 6) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan konsumen.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk industri pengolahan, peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk industri pengolahan dan dan peningkatan nilai tambah produk melalui integrasi usaha dari hulu sampai hilir berbasis kawasan, potensi lokal dan agroindustri.
 - 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program ini diarahkan pada peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk industri pengolahan.
 - 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Program ini diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk melalui integrasi usaha dari hulu sampai hilir berbasis kawasan, potensi lokal dan agroindustri.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program ini diarahkan pada perluasan dan penempatan lapangan kerja, untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman.
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- a. Sekretariat Daerah
 - 1) Program Perekonomian dan Pembangunan, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan.
 - 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - 3) Program Administrasi Umum Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - b. Sekretariat DPRD

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan layanan DPRD bagi mitra kerja/pemangku kepentingan.
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
- a. Perencanaan
 - 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program ini diarahkan pada penguatan proses perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu,
 - 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini diarahkan pada penguatan proses perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial, dengan pengembangan skema pendanaan inovatif dan penguatan sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan.
 - b. Keuangan
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini diarahkan pada peningkatan efektivitas pengelolaan Keuangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kesesuaian program VIII-22 RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 APBD terhadap RKPD, persentase silpa terhadap APBD, persentase penyerapan belanja transfer dan persentase perangkat daerah yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu.
 - 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program ini diarahkan pada pendayagunaan aset daerah untuk peningkatan pendapatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan persentase tanah aset pemda yang bersertifikat.
 - 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program ini diarahkan pada digitalisasi pengelolaan administrasi pendapatan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PAD terhadap pendapatan daerah dan persentase kenaikan PAD.
 - c. Kepegawaian dan Diklat
 - Program Kepegawaian Daerah Program ini diarahkan pada implementasi manajemen ASN. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase layanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi, persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN, persentase pengembangan kompetensi ASN berdasarkan pemetaan kompetensi, persentase ketersediaan dokumen perencanaan kepegawaian dan persentase ASN berkinerja baik

- d. Penelitian dan Pengembangan
 - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program ini diarahkan pada penguatan proses perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial, dengan pengembangan skema pendanaan inovatif dan penguatan sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan dan peningkatan produk inovasi.
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
 - a. Inspektorat Daerah
 - 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan dan persentase tindak lanjut hasil review APIP.
 - 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase perangkat daerah yang memiliki profil manajemen risiko, persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
7. Unsur Kewilayahan
 - a. Kecamatan
 - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan PATEN dan IKM kelurahan
 - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase lembaga masyarakat aktif.
 - 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah yang dilaksanakan

- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa Dan Politik

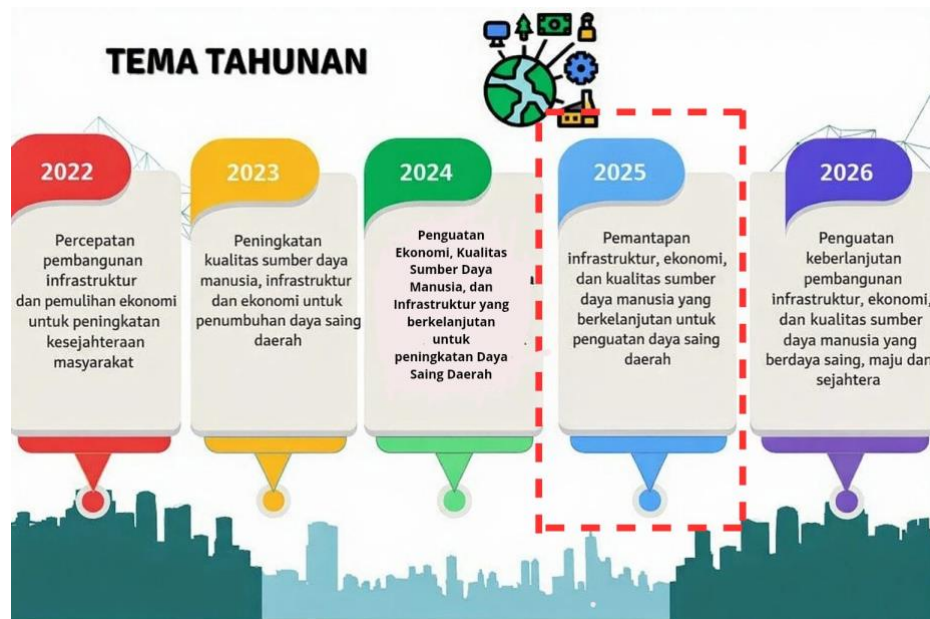
- 1) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Program ini diarahkan pada penguatan pendidikan politik yang inklusi.
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program ini diarahkan pada penguatan sinergi dalam memelihara keharmonisan kehidupan bermasyarakat.
- 3) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program ini diarahkan pada peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini keamanan.
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program ini diarahkan pada peningkatan peran organisasi masyarakat sipil untuk penguatan karakter.
- 5) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program ini diarahkan pada peningkatan peran organisasi masyarakat sipil untuk penguatan karakter.

9. Non Urusan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini diarahkan untuk pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik, persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja, cakupan pelayanan administrasi perkantoran, persentase perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat waktu dan persentase perangkat daerah menyusun dokumen evaluasi tepat waktu.

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN.

Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka pembangunan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 diarahkan pada “Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah”.



Gambar 1.1.3
Arah Kebijakan Tahunan Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD Tahun 2021-2026, kemajuan yang dicapai tahun 2021 dan 2022 dan perkiraan tahun 2023, serta berbagai masalah, isu strategis, maka pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 diprioritaskan pada:

- Pemantapan infrastruktur pada kawasan prioritas;
- Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumber daya lokal;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing;
- Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah;
- Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengurangan risiko bencana

Untuk mempertajam prioritas pembangunan tersebut dirumuskan fokus dan prioritas program pembangunan sebagai berikut:

a. Pemantapan infrastruktur pada kawasan prioritas melalui:

- 1) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, dengan prioritas pada:
 - Penguatan infrastruktur jalan yang tahan bencana untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan pertanian.
- 2) Peningkatan layanan akses air limbah domestik layak, dengan prioritas pada:
 - Perluasan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan air limbah domestik dengan prinsip kolaborasi.
- 3) Peningkatan layanan akses air minum aman di pedesaan dengan prioritas pada:
 - Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum dengan prinsip kolaborasi.
- 4) Peningkatan kinerja layanan irigasi, dengan prioritas pada :
 - Peningkatan pengelolaan layanan irigasi
- 5) Peningkatan keselamatan lalu lintas, dengan prioritas pada:
 - Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi.
- 6) Penanganan kawasan permukiman layak huni, dengan prioritas pada:
 - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif , inklusif dan berkelanjutan.
- 7) Peningkatan instrumen penataan ruang, dengan prioritas pada :
 - Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumber daya lokal melalui:

- 1) Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dengan prioritas pada:
 - Pengembangan sentra produksi pangan (SPP)
- 2) Menjaga pasokan komoditas bahan pokok penting dan komoditas bersubsidi melalui :
 - Pelaksanaan Pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok penting dan barang bersubsidi.
- 3) Peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan, dengan prioritas pada:
 - Peningkatan produksi dan produktivitas industri pengolahan hasil pertanian.
- 4) Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan, dengan prioritas pada:

- Perbaikan tata niaga perdagangan
 - Optimalisasi pemanfaatan pasar (pasar induk, pasar sapuran, pasar pagi);
 - Menjaga stabilitas rantai pasok bahan pokok.
- 5) Pengembangan destinasi dan potensi sektor pariwisata, dengan prioritas pada:
- Pengembangan potensi wisata prioritas;
 - Peningkatan daya tarik wisata, sarana prasarana dan promosi wisata;
 - Pengembangan desa wisata;
 - Pengembangan Geopark Dieng;
 - Peningkatan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya.
- 6) Peningkatan pertumbuhan investasi, dengan prioritas pada:
- Perbaikan iklim investasi dan kepastian usaha;
 - Pengembangan investasi pada sektor pertanian dan pariwisata daerah.
- 7) Peningkatan pertumbuhan UMKM, koperasi dan lembaga ekonomi desa, dengan prioritas pada:
- Peningkatan produksi dan produktivitas UMKM/ koperasi;
 - Peningkatan kapasitas UMKM/ koperasi;
 - Perluasan kemitraan UMKM/ koperasi.
- 8) Pengembangan kapasitas dan potensi BUMDES, dengan prioritas pada:
- Pendampingan usaha BUMDES;
 - Pengembangan potensi BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa.
- 9) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif, dengan prioritas pada:
- Pendampingan usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan bagi rumah tangga miskin;
 - Peningkatan akses permodalan, pengelolaan usaha bagi rumah tangga miskin;
 - Peningkatan produktivitas petani rumah tangga miskin / buruh tani.
- 10) Peningkatan penyerapan tenaga kerja, dengan prioritas pada:
- Perluasan lapangan kerja;
 - Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan, dengan prioritas pada:

- Peningkatan kualitas pendidikan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan;
 - Peningkatan fungsi dan peran perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang mudah dijangkau.
- 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan prioritas pada:
- Peningkatan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan;
 - Peningkatan kualitas keluarga melalui perluasan cakupan layanan keluarga berencana dan pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial, dengan prioritas pada:
- Penurunan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat; Penguatan sistem layanan dan pendataan PPKS untuk ketepatan sasaran dan intervensi program;
 - Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender;
 - Peningkatan pemenuhan hak anak;
 - Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 4) Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga, dengan prioritas pada:
- Peningkatan kecakapan pemuda di bidang pariwisata , pertanian dan pendukungnya;
 - Peningkatan prestasi olahraga
- d. **Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah** melalui:
- 1) Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan prioritas pada:
- Pengoptimalan pengelolaan keuangan aset daerah;
 - Pengoptimalan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang sah;
 - Peningkatan kualitas kerja perencanaan;
 - Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan;
 - Pengoptimalan peran legislatif dalam penyusunan kebijakan;
 - Peningkatan kualitas pengawasan.
- 2) Perwujudan pemerintahan yang kapabel, dengan prioritas pada:
- Peningkatan manajemen pengelolaan SDM dan kinerja aparatur;
 - Peningkatan tata kelola informasi;
 - Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik

- 3) Penguatan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik, dengan prioritas pada:
 - peningkatan layanan informasi publik yang inklusif.
- 4) Peningkatan pelayanan publik, dengan prioritas pada:
 - Percepatan pencapaian SPM;
 - Pengembangan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat;
 - Peningkatan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik.
- 5) Peningkatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan prioritas pada:
 - Peningkatan keamanan dari bencana, kebakaran dan kekerasan;
 - Peningkatan stabilitas keamanan Masyarakat.
- 6) Peningkatan pemenuhan hak-hak politik, dengan prioritas pada:
 - Peningkatan partisipasi politik masyarakat sesuai prinsip demokrasi.
- 7) Peningkatan toleransi kehidupan bermasyarakat tata kelola informasi, dengan prioritas pada:
 - Peningkatan semangat toleransi terhadap keberagaman
- e. **Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengurangan risiko bencana** melalui:
 - 1) Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan, dengan prioritas pada:
 - Konservasi lahan berbasis ekonomi;
 - Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
 - 2) Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dengan prioritas pada:
 - Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 - 3) Peningkatan kinerja layanan persampahan, dengan prioritas pada:
 - Peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan;
 - Reformasi pengelolaan sampah sistemik hulu hilir terintegrasi.
 - 4) Perluasan wilayah yang berketahanan bencana, dengan prioritas pada:
 - Peningkatan ketangguhan menghadapi bencana.

1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1.1.3.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk mewujudkan pelayanan bermutu pada masyarakat yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat, masuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat terutama pada Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Maka dari itu SPM dapat diartikan sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar disebutkan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam menentukan target tahunan pencapaian SPM harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pada perhitungan pembiayaan, pemerintah daerah melakukan pemetaan pembiayaan karena terdapat sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam penerapan SPM. Hal ini ditujukan untuk tercapainya efektivitas penerapan SPM serta meningkatkan peran serta seluruh elemen untuk bersama-sama mewujudkan penyediaan layanan dasar sehingga akan berdampak pada peningkatan jumlah capaian layanan SPM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, SPM diharapkan dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan layanan dasar. Kebijakan pembangunan diintegrasikan dengan rencana pencapaian SPM dan alokasi pendanaan diarahkan untuk

prioritas pencapaian penyediaan layanan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal.

1.1.3.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembar Daerah Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga

Dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 47).

1.1.3.3. KEBIJAKAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, bahwa kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) atau bersama masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Visi pembangunan daerah untuk tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”. Adapun penyusunan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Wonosobo yang akan ditempuh dalam upaya mencapai visi pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.	Membangun harmoni sosial dalam masyarakat, Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	Meningkatnya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat,	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan Perda dan Perkada	100%
				Jumlah kasus yang ditindak lanjuti	100%
Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	Program pengelolaan pendidikan	APK PAUD 3-6 tahun	63,98 angka
				Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ paket A	100 angka

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.				Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ paket B	94,90 angka
				Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A	99,50 angka
				Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ paket B	84,49 angka
				Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani	45%
				Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal	25%
				Persentase sekolah ramah anak	32%
				Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	80,93%
				Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	79,88%
				Persentase PAUD (TK/ RA/KB/SPS) yang terakreditasi	36,67%
				Persentase anak usia 5	80,77%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				(lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	
				Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	75,85%
				Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	100%
				Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	100%
				Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar	25,30%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	98,00%
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir assesment nasional	55%
				Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	100%
				Persentase PAUD yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	100%
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio kecukupan guru kelas SD	1 angka
				Rasio ketercukupan guru SMP	1 angka
			Program Pengendalian perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	61,11%
				Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang	5,79%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	pendidikan dasar	
				Persentase puskesmas terakreditasi utama dan paripurna	41,67%
				Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar SPM	88,34%
				Rata-rata capaian SPM puskesmas	88,36%
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
				Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,47%
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				Cakupan jaminan kesehatan masyarakat miskin	98,86%
				Persentase sarana air minum yang sesuai standar	81,32%
				Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	80%
				Prevalensi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	8,15%
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	100%
				Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	3,59%
				Prevalensi gizi buruk pada anak balita	0,17%
				Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	2,19%
				Persentase orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar	85%
				Persentase orang berisiko HIV yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar	100%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				Persentase penduduk usia produktif (15-59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	90%
				Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	80,75%
				Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	44,24%
				Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
				Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	89%
				Angka kesakitan penyakit tidak menular	12,50%
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	39,48%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	2,05 angka
			Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio posyandu per satuan balita	1,95 angka
				Persentase posyandu dengan strata mandiri	83%
		Meningkatnya kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial (%)	77,28%
				Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100%
				Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
				Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100%
				Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna social di luar panti	100%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata.	Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah yang berkualitas, Meningkatkan perkembangan wilayah	Meningkatnya layanan akses air limbah domestik layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Limbah Domestik Layak	63,58 %
				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Sanitasi (Tempat BAB)	95 %
				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman	14,33 %
		Meningkatnya layanan akses air minum layak,	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak	100,00 %
		Tersedianya perumahan dan kawasan pemukiman layak huni,	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%
				Jumlah rumah tangga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%
Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang	Terwujudnya wilayah yang berketahanan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh	3,06%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.	tanggap terhadap perubahan iklim dan mengurangi tingkat risiko bencana yang terintegrasi dari hulu ke hilir			layanan informasi rawan bencana	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,02%
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0,77%
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (<i>response time</i>)	75%
				Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan yang dibentuk dan dilatih oleh unit damkar dalam waktu tanggap (<i>Response Time</i>)	22%

1.1.3.4. ARAH KEBIJAKAN

Penjabaran program pembangunan sebagai implementasi dari kebijakan umum pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

a. Urusan Pendidikan

Arah kebijakan Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
-Peningkatan kualitas pendidikan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan -Peningkatan fungsi dan peran perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang mudah dijangkau	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	Menjamin pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	-Pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas serta peningkatan literasi masyarakat -Peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun		
	Rata rata lama sekolah		

b. Urusan Kesehatan

Arah Kebijakan Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENERAPAN SPM	ARAH KEBIJAKAN
-Peningkatan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan -Peningkatan kualitas keluarga melalui perluasan cakupan layanan keluarga berencana dan pemberdayaan Masyarakat	Angka keselamatan ibu	Menjamin pemenuhan SPM pada pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin	Peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan
	Angka kelangsungan hidup bayi	Menjamin pemenuhan SPM pada pelayanan kesehatan ibu bayi baru lahir	Peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan
	Prevalensi stunting	Menjamin pemenuhan SPM pada pelayanan kesehatan anak usia balita dan anak usia sekolah dasar	Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat secara berkelanjutan
	Angka kesakitan	Menjamin pemenuhan SPM pada pelayanan kesehatan usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi,	Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan

PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENERAPAN SPM	ARAH KEBIJAKAN
		ODGJ, penderita DM, terduga TB dan orang beresiko HIV	
	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) di Puskesmas	Menjamin pemenuhan SPM pada sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas	Peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Arah kebijakan Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Intergrasi dan Sinkronisasi program pemicu kesehatan dengan lokasi program layanan akses air limbah domestik	Indeks Sanitasi	Memperluas cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi dengan prinsip kolaborasi melalui percepatan peningkatan akses layanan prinsip kolaborasi melalui percepatan peningkatan akses layanan pengelolaan air limbah domestik layak	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bagi desa/kawasan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/ di bawah rata-rata Kabupaten Wonosobo			
Percepatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disesuaikan karakteristik fisik wilayah			
Percepatan implementasi layanan lumpur tinja terjadwal dan tidak terjadwal			
Peningkatan kerjasama pendanaan dengan berbagai pihak bagi perluasan akses sanitasi			
Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku	Indeks Layanan Air Minum	Meningkatnya cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum melalui peningkatan akses layanan air minum layak yang berkelanjutan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Penerapan pendekatan berbasis masyarakat di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM			

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Koordinasi dan sinkronisasi upaya penyelamatan konservasi mata air dan kawasan resapan air			
Fasilitasi kerjasama kolaborasi untuk perluasan akses air minum			

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Arah Kebijakan Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	- Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH - Jumlah rumah tidak layak huni - Jumlah rumah yang tidak dihuni - Rasio rumah dan KK - Jumlah rumah pembangunan baru	- Pengalokasian anggaran penerapan SPM - Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pencapaian SPM - Pendataan dan penghitungan kebutuhan yang dilakukan secara berkelanjutan - Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan	Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah yang berkualitas

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Arah Kebijakan Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	- Persentase penanganan gangguan tibuntranmas yang diselesaikan - Persentase penanganan pelanggaran	- Pengalokasian anggaran penerapan SPM - Meningkatkan pemenuhan SPM terkait gangguan tibuntranmas	"Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"

	perda yang diselesaikan • Persentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran peraturan daerah		
--	--	--	--

f. Urusan Sosial

Arah Kebijakan Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENERAPAN SPM	ARAH KEBIJAKAN
Menurunkan Angka Kemiskinan	Cakupan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan terhadap jumlah keseluruhan PPKS	Pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Percepatan Pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
		Pemberian layanan rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti.	
		Pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti.	
		Pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti.	
		Pemberian layanan rehabilitasi sosial pada saat tanggap darurat bencana dan pasca tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	

1.1.3.5. KEBIJAKAN ANGGARAN SPM

Pada Tahun 2025, penganggaran kegiatan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal per urusan dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Urusan	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Lainnya
1.	Pendidikan		23.361.260.928	
2.	Kesehatan		3.829.332.560	
3.	Pekerjaan Umum		3.915.000.000	
4.	Perumahan Rakyat		643.831.380	
5.	Trantibumlinmas		6.139.954.772	
6.	Sosial		1.155.789.150	
	Jumlah		39.045.168.790	

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Tabel Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,63	71,50	1,23
2.	Angka Kemiskinan	15,28%	13,34%	14,54
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,02%	3,99%	0,75
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,57	5,02	9,85
5.	PDRB Per Kapita	Rp27.190.000	Rp28.720.000	5,63
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,334	0,375	12,28

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 (diolah)

A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas manusia. Secara umum keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia dapat ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan sebagai upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) secara menyeluruh serta menentukan level pembangunan di suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu Kesehatan (Umur Panjang dan Hidup Sehat), Pengetahuan (Akses ke Pengetahuan) dan Standar Hidup Layak. IPM dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah dan juga sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Gambar 2.1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo



(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2025)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2025 mencapai 71,50 Angka tersebut mengalami Peningkatan 0,87 poin dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 70,63. Selama kurun waktu 2022 hingga Tahun 2025, dengan mengalami kenaikan Rata-Rata sebesar 0,86 persen per Tahun. Pada Tahun 2022 hingga Tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia mengalami Peningkatan 0,49 poin dengan persentase kenaikan sebesar 0,49 persen, sedangkan pada kurun waktu Tahun 2023 hingga Tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan 0,45 dengan persentase kenaikan sebesar 0,64 persen. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, Pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Keempat komponen tersebut menunjukkan perubahan nilai menuju nilai yang lebih baik pada tahun 2022 sampai tahun 2025, seiring dengan tingkat pembangunan fisik dan non-fisik yang terdapat di Kabupaten Wonosobo. Nilai perkembangan nilai per komponen dalam penilaian IPM tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo
Menurut Komponen Tahun 2022-2025

Uraian	Satuan	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,89	74,01	74,25	74,56
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,78	11,80	11,81	12,05

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,88	6,89	6,90	6,91
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP)	Rp (000)	11.108	11.577	11.980	12.552
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,69	70,18	70,63	71,50

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Komposit Indeks Pembangunan Manusia yaitu meliputi AHH, HLS, dan RLS di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2022 hingga Tahun 2025 mengalami kenaikan. Peningkatan IPM di Kabupaten Wonosobo didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya, baik Umur Harapan Hidup (UHH) dengan mengalami peningkatan 0,31 Poin dengan persentase kenaikan sebesar 0,42 persen, Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan 0,24 Poin dengan persentase kenaikan sebesar 2 persen, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan 0,01 Poin dengan persentase kenaikan sebesar 0,14 persen, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) mengalami peningkatan 572 Poin dengan persentase kenaikan sebesar 4,8 persen dan Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan 0,87 Poin dengan persentase kenaikan sebesar 1,23 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat kabupaten Wonosobo semakin meningkat dari Tahun-Tahun sebelumnya.

Tabel 2.1.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se-Karesidenan Kedu
Tahun 2022-2025

No	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
1.	Provinsi Jawa Tengah	72,9	73,39	73,87	74,77
2.	Kabupaten Magelang	70,96	71,56	72,10	73,09
3.	Kota Magelang	80,39	81,17	82,15	82,92
4.	Kabupaten Purworejo	73,67	74,35	75,16	75,93
5.	Kabupaten Temanggung	70,77	71,33	71,86	72,52
6.	Kabupaten Kebumen	71,29	71,88	72,48	73,17
7.	Kabupaten Wonosobo	69,69	70,18	70,63	71,50

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

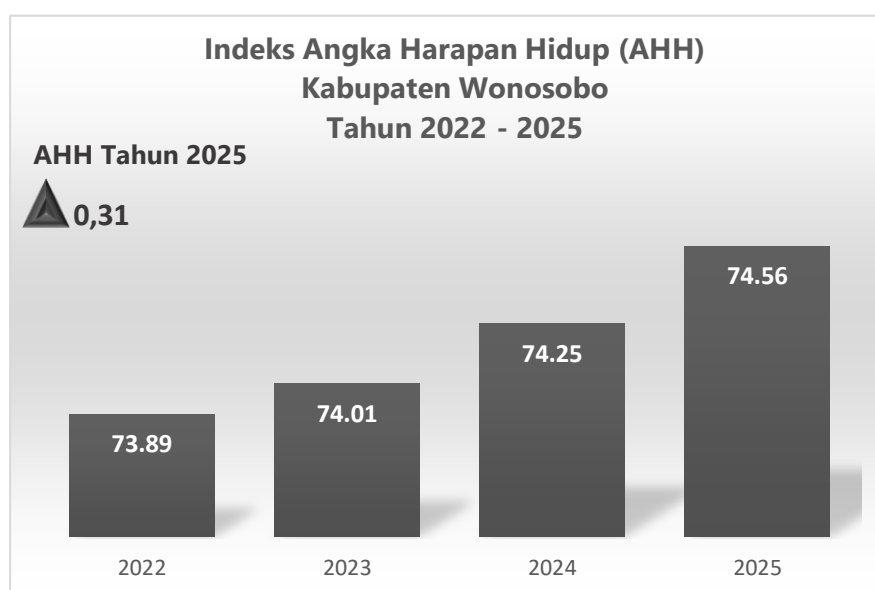
Dibandingkan dengan Kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Kedu dan Provinsi

Jawa Tengah, nilai IPM Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 berada di urutan terendah dan jauh di bawah rata- rata. Dalam kurun waktu 2024 hingga Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan 0,9 Poin dengan persentase kenaikan sebesar 1,2 Persen, Kabupaten Magelang mengalami peningkatan 0,99 Poin dengan persentase kenaikan sebesar 1,4 Persen, Kota Magelang mengalami peningkatan 0,77 Poin dengan persentase kenaikan sebesar 0,94 Persen, Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan 0,77 Poin dengan persentase kenaikan sebesar 1,02 Persen, Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan 0,66 Poin dengan persentase kenaikan sebesar 0,92 Persen, Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan 0,69 Poin dengan persentase kenaikan sebesar 0,95 Persen, dan Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan 0,87 Poin dengan persentase kenaikan sebesar 1,2 Persen. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan IPM yang lebih tinggi dari Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kebumen. Namun demikian Nilai IPM Tahun 2025 Kabupaten Wonosobo masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Kedu dan Provinsi Jawa Tengah dengan 71,50 Poin.

1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi Angka Harapan Hidup di Kabupaten.

Gambar 2.2
Indeks Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022 - 2025



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2025

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) Kabupaten Wonosobo terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama empat tahun terakhir, dari 2022 hingga 2025, Umur Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan 0,67 Poin dengan persentase Rata-Rata kenaikan sebesar 0,3 Persen Per Tahun. Pada Tahun 2024 hingga Tahun 2025 merupakan Tahun dengan Peningkatan Umur Harapan Hidup tertinggi dengan peningkatan 0,31 Poin dengan Persentase Kenaikan sebesar 0,42 Persen.

Tabel 2.1.4
Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan
Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2025

Nama Tempat	Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten/Kota se Eks- Karesidenan Kedu, Nasional dan Jawa Tengah (Tahun)			
	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	74,58	74,69	74,91	75,24
Kabupaten Kebumen	74,85	74,98	75,22	75,56
Kabupaten Purworejo	75,20	75,37	75,64	76,06
Kabupaten Wonosobo	73,89	74,01	74,25	74,56
Kabupaten Magelang	74,28	74,44	74,68	74,93
Kabupaten Temanggung	75,70	75,77	75,94	76,16
Kota Magelang	77,02	77,22	77,54	78,03

Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan di setiap Tahunnya. Namun demikian untuk Angka Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Kedu dan Provinsi Jawa Tengah dengan 71,50 Poin. Dalam kurun waktu Tahun 2024 hingga Tahun 2025 Angka Harapan Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan 0,33 Poin dengan Persentase kenaikan sebesar 0,44 Persen, Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan 0,34 Poin dengan Persentase kenaikan sebesar 0,45 Persen, Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan 0,42 Poin dengan Persentase kenaikan sebesar 0,55 Persen, Kabupaten Magelang mengalami peningkatan 0,25 Poin dengan Persentase kenaikan sebesar 0,33 Persen, Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan 0,22 Poin dengan Persentase kenaikan sebesar 0,29 Persen, Kota Magelang mengalami peningkatan 0,49 Poin dengan Persentase kenaikan sebesar 0,63 Persen dan Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan 0,31 Poin dengan Persentase kenaikan sebesar 0,41 Persen. Dapat disimpulkan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 mengalami peningkatan lebih tinggi dari Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung.

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas.

Gambar 2.3
Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022-2025



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Wonosobo terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama empat tahun terakhir, dari 2022 hingga 2025, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan 0,27 Poin dengan persentase Rata-Rata kenaikan sebesar 0,76 Persen Per Tahun. Pada Tahun 2024 hingga Tahun 2025 merupakan Tahun dengan Peningkatan Umur Harapan Hidup tertinggi dengan peningkatan 0,24 Poin dengan Persentase Kenaikan sebesar 2,03 Persen.

Tabel 2.1.5
Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan
Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2025

Nama Tempat	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu dan Jawa Tengah (Tahun)			
	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	12,81	12,85	12,86	13,05
Kabupaten Kebumen	13,36	13,37	13,39	13,42
Kabupaten Purworejo	13,52	13,53	13,55	13,58
Kabupaten Wonosobo	11,78	11,80	11,81	12,05
Kabupaten Magelang	12,58	12,61	12,62	12,83
Kabupaten Temanggung	12,55	12,61	12,62	12,63
Kota Magelang	14,31	14,40	14,62	15,86

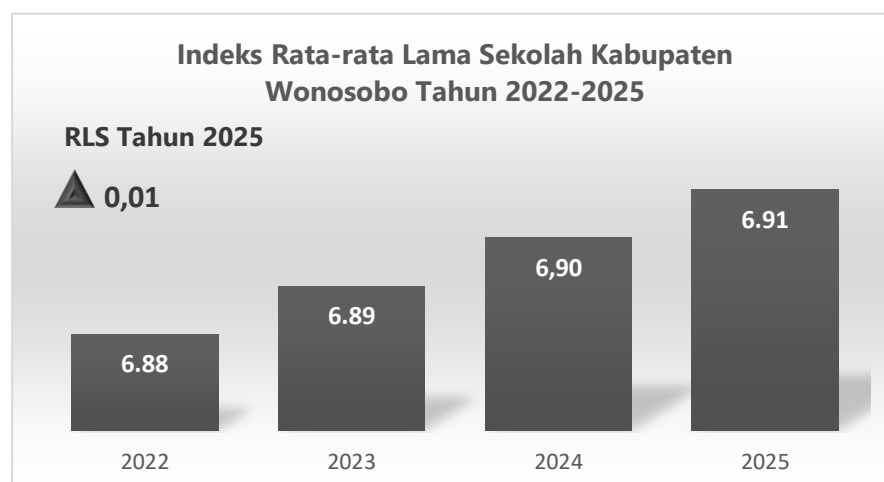
Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2025

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 adalah 12,05 Tahun. Nilai tersebut masih di bawah dibandingkan dengan Kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Kedu dan Provinsi Jawa Tengah. Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah 13,05 Tahun mengalami kenaikan 0,19 Poin dengan Persentase kenaikan 1,48 Persen, Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan 0,03 Poin dengan Persentase kenaikan 0,22 Persen, Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan 0,03 Poin dengan Persentase kenaikan 0,22 Persen, Kabupaten Magelang mengalami kenaikan 0,21 Poin dengan Persentase kenaikan 1,67 Persen, Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan 0,01 Poin dengan Persentase kenaikan 0,08 Persen, Kota Magelang mengalami kenaikan 1,24 Poin dengan Persentase kenaikan 8,48 Persen dan Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan 0,24 Poin dengan Persentase kenaikan 2 Persen. Dapat disimpulkan bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 mengalami peningkatan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Namun demikian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Kabupaten Wonosobo masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Kedu dan Provinsi Jawa Tengah dengan 12,05 Poin.

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam semua jenjang pendidikan, dari SD hingga perguruan tinggi. jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah.

Gambar 2.4
Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022-2025



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2025

Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas di Wonosobo, Jawa Tengah sebesar 6,91 tahun pada 2025. RLS penduduk Wonosobo meningkat 0,01 tahun (0,14%) dibanding tahun sebelumnya yang selama 6,9 tahun. Sementara, dalam lima tahun terakhir RLS tersebut naik 0,1 tahun (1,47%). Namun demikian masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 8,15 tahun pada 2025. LS tersebut menunjukkan rata-rata penduduk Wonosobo hanya sekolah sampai jenjang kelas 6 SD.

Tabel 2.1.6
Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Wilayah Eks
Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2025

Nama Tempat	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu dan Jawa Tengah (Tahun)			
	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	7,93	8,01	8,02	8,15
Kabupaten Kebumen	7,85	7,86	7,87	7,89
Kabupaten Purworejo	8,32	8,46	8,65	8,74
Kabupaten Wonosobo	6,88	6,89	6,90	6,91
Kabupaten Magelang	7,81	7,82	7,83	8,04
Kabupaten Temanggung	7,41	7,50	7,53	7,61
Kota Magelang	10,94	11,20	11,43	11,44

Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2025

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 adalah 6,91 Tahun. Nilai tersebut masih di bawah dibandingkan dengan Kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Kedu dan Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah 8,15 Tahun mengalami kenaikan 0,13 Poin dengan Persentase kenaikan 1,6 Persen, Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan 0,02 Poin dengan Persentase kenaikan 0,25 Persen, Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan 0,09 Poin dengan Persentase kenaikan 1 Persen, Kabupaten Magelang mengalami kenaikan 0,21 Poin dengan Persentase kenaikan 2,68 Persen, Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan 0,08 Poin dengan Persentase kenaikan 1 Persen, Kota Magelang mengalami kenaikan 0,01 Poin dengan Persentase kenaikan 0,09 Persen dan Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan 0,01 Poin dengan Persentase kenaikan 0,14 Persen. Dapat disimpulkan bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 mengalami peningkatan lebih tinggi dari Kota Magelang dengan persentase kenaikan 0,14 Persen dibandingkan dengan Kota Magelang dengan 0,09 Persen di Tahun 2025. Namun demikian Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Kabupaten Wonosobo masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Kedu dan Provinsi

Jawa Tengah dengan 6,91 Poin. Nilai Rata-Rata lama Sekolah tertinggi Kabupaten/Kota se Eks- Karesidenan Kedu dan Jawa Tengah di Tahun 2025 adalah Kota Magelang dengan nilai 11,44 atau setingkat kelas 1 SMA (Kelas 10).

4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP)

Standar hidup layak menjelaskan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya konsumsi per- kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama.

Gambar 2.5
Indeks Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022-2025



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2025

Pengeluaran per-kapita di sesuaikan di Wonosobo meningkat dari Rp 11.108 pada tahun 2022 menjadi Rp 12.552 pada tahun 2025. Selama empat tahun terakhir, dari 2022 hingga 2025, Pengeluaran per-kapita di sesuaikan Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan 1.444 Poin dengan persentase Rata-Rata kenaikan sebesar 4,16 Persen Per Tahun. Pada Tahun 2024 hingga Tahun 2025 merupakan Tahun dengan Peningkatan Pengeluaran per-kapita tertinggi dengan peningkatan 572 Poin

dengan Persentase Kenaikan sebesar 4,77 Persen.

Tabel 2.1.7
Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/ Kota Wilayah Eks
Karesidenan Kedu terhadap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025

Nama Tempat	Pengeluaran Riil Per Kapita per Tahun Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu dan Jawa Tengah (Ribu Rupiah)			
	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	11.377	11.835	12.276	12.746
Kabupaten Kebumen	9.282	9.734	10.176	10.658
Kabupaten Purworejo	10.671	11.110	11.584	12.085
Kabupaten Wonosobo	11.108	11.577	11.980	12.552
Kabupaten Magelang	10.011	10.493	10.926	11.343
Kabupaten Temanggung	9.773	10.108	10.519	10.995
Kota Magelang	12.816	13.175	13.619	14.023

Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2025

Pengeluaran per-kapita di sesuaikan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 adalah 12.552 Tahun. Nilai tersebut masih di bawah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 12.746 Tahun. Pengeluaran per-kapita di sesuaikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah 12.746 Tahun mengalami kenaikan 470 Poin dengan Persentase kenaikan 3,83 Persen, Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan 482 Poin dengan Persentase kenaikan 4,74 Persen, Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan 501 Poin dengan Persentase kenaikan 4,32 Persen, Kabupaten Magelang mengalami kenaikan 417 Poin dengan Persentase kenaikan 3,82 Persen, Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan 476 Poin dengan Persentase kenaikan 4,53 Persen, Kota Magelang mengalami kenaikan 404 Poin dengan Persentase kenaikan 3 Persen dan Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan 572 Poin dengan Persentase kenaikan 4,77 Persen. Dapat disimpulkan bahwa Pengeluaran per-kapita di sesuaikan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 mengalami peningkatan lebih tinggi dari Pengeluaran per-kapita di sesuaikan Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu dan Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian Angka Pengeluaran per-kapita di sesuaikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Kabupaten Wonosobo masih rendah dibandingkan dengan

B. Angka Kemiskinan

Pengukuran angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan juga dapat dilihat menggunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Jika semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi.

1. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Gambar 2.6
Indeks Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022-2025



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2025

Dari Data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 sebesar 106,29 ribu orang, menurun 15,2 ribu orang terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2024, hal tersebut merupakan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya dimana di Kurun Waktu Tahun 2022 hingga Tahun 2023 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten

Wonosobo hanya mengalami penurunan 4,41 ribu orang dan di Tahun 2023 hingga Tahun 2024 hanya mengalami penurunan 2,21 ribu orang.

Tabel 2.1.8
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota Wilayah
Eks Karesidenan Kedu Tahun 2025

Nama Tempat	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Wonosobo	128,11	123,70	121,49	106,29
Kabupaten Kebumen	196,16	195,45	187,95	162,54
Kabupaten Purworejo	82,64	81,28	78,02	72,18
Kabupaten Magelang	145,33	144,49	143,80	132,21
Kabupaten Temanggung	73,04	72,96	68,77	62,05
Kota Magelang	8,65	7,45	7,25	6,93

Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu tertinggi di Tahun 2025 adalah Kabupaten Kebumen dengan Jumlah Kemiskinan 162,54 ribu orang, sedangkan Kabupaten Wonosobo berada di urutan ketiga tertinggi untuk Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Tahun 2025 dengan Jumlah Kemiskinan 106,29 ribu orang. Namun demikian Kabupaten Wonosobo berada di urutan kedua dalam penurunan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Tahun 2025 dengan penurunan yang signifikan sejumlah 15,2 ribu orang dibawah Kabupaten Kebumen dengan penurunan sejumlah 25,41 ribu orang. Nilai Jumlah Penduduk Miskin yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak orang di suatu wilayah yang hidup dalam kondisi yang serba kekurangan dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebaliknya, nilai Jumlah Penduduk Miskin yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah relatif lebih baik.

2. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase Penduduk Miskin menunjukkan statistik yang digunakan untuk mengukur proporsi populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan.

Gambar 2.7
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022-2025



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2025

Persentase penduduk miskin Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 tercatat sebesar 13,34 persen, menurun sebanyak 1,94 persen dibanding persentase penduduk miskin tahun 2024. Pada Tahun 2025 ini merupakan Tahun dengan penurunan persentase penduduk miskin yang paling signifikan dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya, pada Tahun 2022 hingga Tahun 2023 untuk persentase penduduk miskin Kabupaten Wonosobo hanya mengalami penurunan 0,59 persen, sedangkan di Tahun 2023 hingga Tahun 2024 mengalami penurunan 0,3 persen.

Tabel 2.1.9
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Wilayah
Eks Karesidenan Kedu Tahun 2025

Nama Tempat	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Wonosobo	16,17	15,58	15,28	13,34
Kabupaten Kebumen	16,41	16,34	15,71	13,58
Kabupaten Purworejo	11,53	11,33	10,87	10,06
Kabupaten Magelang	11,09	10,96	10,83	9,90
Kabupaten Temanggung	9,33	9,26	8,67	7,78
Kota Magelang	7,10	6,11	5,94	5,68

Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2025

Secara persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu tertinggi dan penurunan persentase Kemiskinan yang paling signifikan dalam kurun waktu Tahun 2024 hingga Tahun 2025 adalah Kabupaten Kebumen dengan Persentase

13,58 persen dengan angka penurunan sebesar 2,13 persen. Sedangkan Kabupaten dengan persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu terendah adalah Kota Magelang dengan Persentase 5,68 persen dengan angka penurunan sebesar 0,26 persen.

3. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Gambar 2.8
Garis Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022-2025



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2025

Garis kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 486.105,- /kapita/bulan meningkat dibandingkan dengan garis kemiskinan tahun 2024 yaitu sebesar Rp 456.351,-/kapita/ bulan. Artinya Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 meningkat sebesar 6,52 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan pada kurun waktu Tahun 2023 hingga Tahun 2024 Garis Kemiskinan meningkat sebesar 7,35 persen dan di Tahun 2022 hingga Tahun 2023 mengalami peningkatan 6,49 persen. Dapat disimpulkan bahwa Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo selalu mengalami peningkatan dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025.

Tabel 2.1.10
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Wilayah
Eks Karesidenan Kedu Tahun 2025

Nama Tempat	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------

Kabupaten Wonosobo	399.180	425.105	456.351	486.105
Kabupaten Kebumen	416.004	451.678	471.824	502.841
Kabupaten Purworejo	393.731	427.622	459.253	496.812
Kabupaten Magelang	377.497	411.129	431.289	454.591
Kabupaten Temanggung	354.012	388.369	416.086	443.089
Kota Magelang	575.130	602.794	626.614	662.129

Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu tertinggi Tahun 2025 adalah Kota Magelang sebesar Rp662.129,-/kapita/bulan sedangkan terendah adalah Kabupaten Temanggung sebesar Rp443.089,-/kapita/bulan. Sementara untuk Persentase Kenaikan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu tertinggi Tahun 2025 adalah Kabupaten Purworejo dengan kenaikan sebesar 8,18 persen sedangkan untuk Kabupaten dengan tingkat persentase kenaikan terendah adalah Kabupaten Magelang dengan kenaikan 5,40 persen.

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. akan tetapi juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus dapat menurunkan tingkat kedalaman dan keparahannya. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai IKK, semakin besar kesenjangan tersebut, artinya penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan membutuhkan lebih banyak usaha atau bantuan untuk keluar dari kemiskinan, sehingga menjadikannya penting untuk alokasi anggaran.

Gambar 2.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022-2025



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2025 adalah 2,25. Dalam kurun waktu Tahun 2024 hingga Tahun 2025 Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami penurunan 0,16 poin dan dalam Kurun waktu Tahun 2022 hingga Tahun 2023 mengalami penurunan 0,58 poin, sedangkan pada kurun waktu Tahun 2023 hingga Tahun 2024 mengalami penurunan 0,19 poin. Dalam di simpulkan bahwa Indeks Kedalam terus mengalami penurunan dalam kurun waktu Tahun 2022 hingga Tahun 2025 dari 3,18 di Tahun 2022 menjadi 2,25 di Tahun 2025, mengalami penurunan 0,93 poin.

Tabel 2.1.11
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Wilayah

Eks Karesidenan Kedu Tahun 2025

Nama Tempat	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Wonosobo	3,18	2,60	2,41	2,25
Kabupaten Kebumen	3,41	2,89	2,35	1,95
Kabupaten Purworejo	1,31	1,78	1,08	1,54
Kabupaten Magelang	1,66	1,73	1,23	1,04
Kabupaten Temanggung	1,06	0,99	0,97	0,67
Kota Magelang	0,47	0,74	0,92	0,53

Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu tertinggi Tahun 2025 adalah

Kabupaten Wonosobo dengan 2,25 poin sedangkan terendah adalah Kota Magelang dengan 0,53 poin. Sementara untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu yang mengalami kenaikan dalam kurun Waktu 2024 hingga 2025 adalah Kabupaten Purworejo dengan kenaikan 0,46 poin, sedangkan Kabupaten/Kota yang lainnya mengalami penurunan. Untuk Kabupaten/Kota dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tertinggi adalah Kabupaten Kebumen dengan nilai penurunan 0,4 poin.

5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 2.10
Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022-2025



Sumber:

BPS Kab. Wonosobo, 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2025 adalah 0,54. Dalam kurun waktu Tahun 2024 hingga Tahun 2025 Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan 0,06 poin dan dalam Kurun waktu Tahun 2022 hingga Tahun 2023 mengalami penurunan 0,23 poin, sedangkan pada kurun waktu Tahun 2023 hingga Tahun 2024 mengalami penurunan 0,03 poin. Dalam di simpulkan bahwa Indeks Kedalam terus mengalami penurunan dalam kurun waktu Tahun 2022 hingga Tahun 2025 dari 0,86 di Tahun 2022 menjadi 0,54 di Tahun 2025, mengalami penurunan 0,32 poin.

Tabel 2.1.12
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Wilayah

Eks Karesidenan Kedu Tahun 2025

Nama Tempat	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Wonosobo	0,86	0,63	0,60	0,54
Kabupaten Kebumen	1,02	0,75	0,48	0,40
Kabupaten Purworejo	0,24	0,43	0,18	0,34
Kabupaten Magelang	0,41	0,41	0,23	0,17
Kabupaten Temanggung	0,19	0,17	0,18	0,10
Kota Magelang	0,06	0,12	0,19	0,09

Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu tertinggi Tahun 2025 adalah Kabupaten Wonosobo dengan 0,54 poin sedangkan terendah adalah Kota Magelang dengan 0,09 poin. Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu yang mengalami kenaikan dalam kurun Waktu 2024 hingga 2025 adalah Kabupaten Purworejo dengan kenaikan 0,16 poin, sedangkan Kabupaten/Kota yang lainnya mengalami penurunan. Untuk Kabupaten/Kota dengan penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tertinggi adalah Kota Magelang dengan nilai penurunan 0,1 poin.

C. ANGKA PENGANGGURAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Selain itu, TPT juga menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di suatu daerah. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen yang berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Gambar 2.11
Tingkat Pengangguran di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022-2025



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2022 dengan nilai 5,01% dan tahun 2025 yang diproyeksikan memiliki nilai sebesar 3,99%. Sehingga dari kurun waktu Tahun 2022 hingga Tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan 1,02 persen.

Tabel 2.1.13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Wilayah
Eks Karesidenan Kedu Tahun 2025

Nama Tempat	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Wonosobo	5,01	4,95	4,02	3,99
Kabupaten Kebumen	5,92	5,11	5,07	4,95
Kabupaten Purworejo	4,45	4,02	3,89	3,72
Kabupaten Magelang	4,97	4,42	3,55	3,52
Kabupaten Temanggung	2,54	2,32	2,35	2,31
Kota Magelang	6,71	5,25	4,40	4,31

Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu tertinggi Tahun 2025 adalah Kabupaten Kebumen dengan 4,95 persen sedangkan terendah adalah Kabupaten Temanggung sebesar 2,31 persen. Untuk Kabupaten/Kota dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi Tahun 2025 adalah Kabupaten Purworejo dengan nilai penurunan sebesar 0,17 persen.

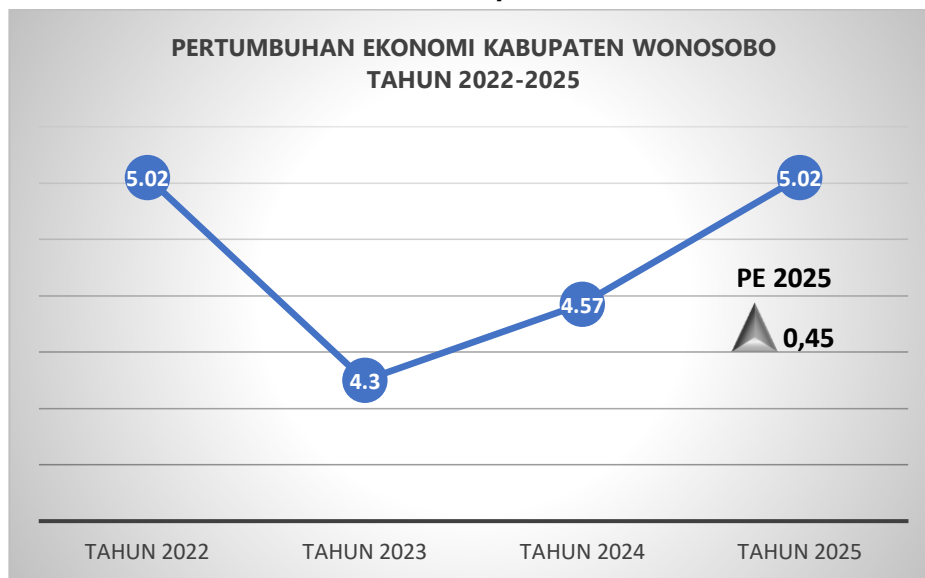
D. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk sebesar 951.550 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 485.251 jiwa dan penduduk perempuan 466.299 jiwa. Tingkat persentase jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Wonosobo sebesar 98.134 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2025 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,02 %.

Gambar 2.12

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022-2025



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2025

E. PENDAPATAN PER KAPITA

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Tabel 2.1.14
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo ADHB Menurut
Pengeluaran 2022-2025 (Persen)

PDRB Pengeluaran Sektor	Distribusi PDRB Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)			
	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	76,87	78,09	78,12	77,60
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	1,99	2,04	2,25	2,22
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,24	7,06	6,82	6,67
Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,05	18,61	18,98	19,21
Perubahan Inventori	1,74	1,73	1,02	0,97
Net Ekspor Barang dan Jasa	-6,89	-7,52	-7,19	-6,66
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2025

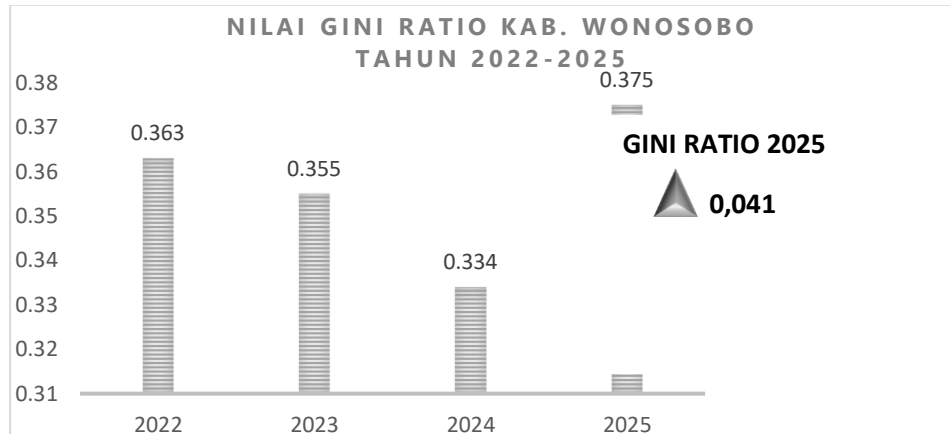
Distribusi PDRB Kabupaten Wonosobo dari tahun 2024 hingga tahun 2025 mengalami Penurunan di beberapa sektor seperti sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mengalami penurunan sebesar 0,52 Persen, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga mengalami penurunan sebesar 0,03 Persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami penurunan sebesar 0,15 Persen, dan perubahan Inventori mengalami penurunan 0,05 Persen. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan ada di sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto mengalami kenaikan sebesar 0,23 Persen. Angka PDRB riil per kapita dapat menjadi indikator yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

F. KETIMPANGAN PENDAPATAN

Nilai Gini Ratio Kabupaten Wonosobo selama periode tahun 2022-2025 mengalami penurunan. Pada tahun 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,363. Angka ini menurun 0,008 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2023 yang sebesar 0,355 dan menurun 0,021 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2024 yang sebesar 0,334 sedangkan di Gini Ratio Tahun 2025 senilai 0,375 mengalami kenaikan sebesar 0,041.

Nilai Gini Ratio Kabupaten Wonosobo dari tahun 2022-2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.13
Nilai Gini Ratio Kabupaten Wonosobo Tahun 2022-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2025

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen penduduk berpendapatan rendah;
- ketimpangan sedang jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen penduduk berpendapatan menengah;
- serta ketimpangan rendah jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut distribusi pengeluaran kriteria Bank Dunia tahun 2024 dan 2025 dapat kami sajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1.16
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Distribusi Pengeluaran Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Wonosobo (Persen), 2024 dan 2025

Distribusi Pengeluaran Kriteria Bank Dunia	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan	
	2024	2025
40 persen penduduk berpendapatan rendah/ 40 percent of low-income residents	20,27	18,65
40 persen penduduk berpendapatan menengah/ 40 percent of medium income residents	37,90	35,99
20 persen penduduk berpendapatan tinggi/ 20 percent of high income residents	41,83	45,36
Jumlah/Total	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2025

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran keberhasilan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdiri dari indikator keluaran dan hasil.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 121 indikator kinerja pada Tahun 2025, secara umum menunjukkan capaian yang baik, dimana sebagian besar indikator telah mencapai target, dengan 36 indikator mencapai 100 persen. Hasil tersebut telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan dinyatakan disetujui.

Selanjutnya, capaian kinerja disajikan berdasarkan indikator kinerja kunci keluaran dan hasil pada masing-masing urusan pemerintahan.

A. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam menghasilkan output pada masing-masing urusan pemerintahan.

Secara umum, capaian IKK Keluaran Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar indikator telah memenuhi target. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif sesuai perencanaan. Hasil capaian tersebut telah direviu oleh APIP dan dinyatakan disetujui.

Selanjutnya, rincian capaian indikator kinerja kunci keluaran disajikan pada tabel berikut.

B. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 2.2.1

Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	Pendidikan	1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	25.111	90.63	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	27.708			
		2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	124.944	94.89	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	131.675			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	8.829	78.38	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	11.264			
		4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	1.788	68.72	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah seluruh toilet	2.602			
		5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	2.998	67.69		
				Jumlah ruang kelas	4.429			
2	Kesehatan	1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	8	0.09	Dinas Kesehatan	
				Jumlah ibu melahirkan tahun N	8.624			
		2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	8.190	17.95	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	45.633			
		3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	8.825	100.00	Dinas Kesehatan	
				Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	8.825			
		4	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	8.615	97.62	Dinas Kesehatan	
				Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	8.825			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	8.460	95.95	Dinas Kesehatan	
				Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	8.817			
		6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	48.421	100.00	Dinas Kesehatan	
				Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	48.421			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	116.990	100.00	Dinas Kesehatan	
				Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	116.990			
		8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	408.213	100.00	Dinas Kesehatan	
				Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	408.213			
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	117.392	100.00	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	117.392			
		10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	108.975	100.00	Dinas Kesehatan	
				Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	108.975			
		11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	7.230	100.00	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	7.230			
		12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.328	100.00	Dinas Kesehatan	
				Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2.328			
		13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	11.711	100.00	Dinas Kesehatan	
				Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	11.711			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	14.127	93.00	Dinas Kesehatan	
				Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	15.191			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	5.156	72.62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	7.100			
		2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	627.000	65.43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	958.314			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	860.096	90.39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Jumlah total penduduk kabupaten/kota	951.550			
		4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	154.774	71.97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Jumlah rumah di kabupaten/kota	215.060			
		5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	1	100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
			pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	1			
		6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Tidak Dapat Dilaksanakan			
		7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	213	100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	213			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	4	100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	4			
		9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	590	92.77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	636			
		10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	310	96.57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	321			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	35	100.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	35			
		2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	79.31	79.31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	100			
		3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	1.001	4.75	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	21.060			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	4	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	4			
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	3	100.00	Satpol PP	
				Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3			
		2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	62	100.00	Satpol PP	
				Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	62			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	21	100.00	BPBD	
				Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	21			
		4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.377	100.00	BPBD	
				Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	3.377			
		5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	501	100.00	BPBD	
				Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	501			
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	48	70.59	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	68			
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	302	15.28	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1.977			
		2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	767	20.93	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	3.665			
		3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	443	13.33	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	3.324			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Sumber Data Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	120	100.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	120			
		5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	196	100.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	196			
		6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	54.492	39.40	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	138.300			

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 2.2.2

Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	7	100.00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	7			
		2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	96	41.56	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				Jumlah perusahaan	231			
		3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan	3.979	100.00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
			mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota			
				Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	3.979		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	42	100.00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
				Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	42		
		2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	87	100.00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
			mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	87			
9	Pangan	1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	12.527	27.96	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				Target jumlah cadangan pangan	44.810			
10	Pertanahan	1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	3.214.419	40.23	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	7.989.493			
		2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	219.920.093	21.31	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1.032.070.000			
		3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	0	0.00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	6			

No	Ururan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
11	Lingkungan Hidup	1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	29	82.86	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	35			
		2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	69.116,4	49.75	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	138.926,31			
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	242.605	99.29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	244.334			
		2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	164.777	71.71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	229.795			
		3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2	100.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				2 dokumen	2			
		4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	714.030	99.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	721.168			
		5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	7.761	100.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	7.761			
		6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	291.557	58.45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	498.793			
		7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi	Akta perceraian yang diterbitkan	17.374	71.53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
			yang melaporkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	24.288			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	100			
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	2	11.11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	18			
		3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	18	94.74		
				Jumlah kerja sama desa yang ditangani	19			
14	Pengendalian Penduduk dan	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	2.23	103.72		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
	Keluarga Berencana		per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	2.15		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	98.318	69.24	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
				Total pasangan usia subur usia 15-49 tahun	141.993			
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	5.75	57.96	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
				Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	9.92			
15	Perhubungan	1	Konektivitas Kabupaten/Kota	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)	1	1.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0.316	0.32	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	4	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	4			
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	40	100.00	Diskominfo	
				Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	40			
		2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	45	69.23	Diskominfo	
				Jumlah layanan publik	65			
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	597.516	93.10	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
			publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	kebijakan dan program prioritas dan pemerintah daerah kabupaten/kota				
				Jumlah penduduk	641.777			
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	14.741.622.155	3722.77	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
				Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	385.626.590			
		2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	25.238	79.95	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
				Σ Usaha mikro	31.569			
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	915.170.451.276	24.71	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	733.842.610.095			
		2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	352.483.143.953	140.99		
				Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal	250.000.000.000			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan				
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	60	75.00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	80			
		2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	76.470	35.64	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	214.535			
		3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	3	3.06	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional	98			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	80	47.62		
				Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	168			
20	Statistik	1	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	1.291	100.00	Diskominfo	
				Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	1.291			
21	Persandian	1	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	435	47.39	Diskominfo	
				Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	918			
22	Kebudayaan	1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	121	100.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	121			
		2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	140.760	1.82		
				Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	138.240			
23	Perpustakaan	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	57.3	57.30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	20.41	20.41	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	91.13	91.13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Tabel 2.2.3

Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)	
Urusan Pemerintahan Pilihan									
25	Kelautan dan Perikanan	1	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	27.14	27.14	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
		2	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	10.323,927			111.96	
				Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	9.221,15				
26	Pariwisata	1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	139.963.740 .006	76.80	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
				Realisasi investasi Tahun N	182.232.990 .118				

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	3.733	164.75	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				Jumlah wisatawan asing tahun N-1	1.410			
		3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	3.137.225	28.81	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				Jumlah wisatawan tahun N-1	2.435.569			
27	Pertanian	1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	214.842,4	-4.27	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				Produksi tanaman pangan tahun N-1	224.431,74			
		2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	672.129,5	36.53	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				Produksi hortikultura tahun N-1	492.291,5			
		3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	30.622,104	74.05		
				Produksi komoditas peternakan tahun N-1	17.594,077			

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	256.04	100.00		
				Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	256.04			
28	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-
30	Perdagangan	1	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	4.972	30.19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
				Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	16.471			

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
31	Perindustrian	1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	14.7	14.7	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	17.324	82.09	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
			melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	21.104			
		3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	21.104	4.17	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan DPMPTSP	
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	20.259			
		4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	202.579.796.636	81.90	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan DPMPTSP	
				Total investasi seluruh sektor	247.345.813.639			
32	Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 2.2.4

Indikator Kinerja Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
33	Perencanaan	1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	17	100.00	BPPKAD	
				Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17			

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
34	Keuangan	1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	738.686.165.017,5	36.51	BPPKAD	
				Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2.023.100.803.480			
		2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	383.397.964.048	19.25	BPPKAD	
				Realisasi pendapatan daerah	1.991.793.147.605			

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	1.187.363.039.118	61.06	BPPKAD	
				Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	1.944.444.261.783			
		4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	475.804.287.735	28.85	BPPKAD	
				Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	1.649.390.366.880			
35	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.257	67.76	BKD	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.855			
36	Penelitian dan Pengembangan	1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	99	100.00	BAPPEDA	
				Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	99			
37	Fungsi Pengawasan	1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	4	4.00	BAPPEDA	
		2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	5	5.00	BAPPEDA	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	4	4.00	BAPPEDA	
		4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	15	53.57	BAPPEDA	
				Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	28			
38	Pengadaan	1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	40	40.00	PBJ	
		2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	23.35	23.35	PBJ	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	21.6	21.60	PBJ	
39	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat	Tepat	BPKAD	
		2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	7	53.85	BPKAD	
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	13			
40	Pelayanan Publik	1	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	96.97	96.97	Bagian Organisasi	

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah mewajibkan semua entitas pemerintahan untuk melaporkan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas APBN/APBD yang telah dilaksanakan setiap tahunnya. Laporan Kinerja ini merupakan ringkasan komprehensif yang menyajikan capaian kinerja secara sistematis berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dan didukung pendanaan melalui APBN maupun APBD. Dokumen ini disusun dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh setiap entitas akuntabilitas kinerja, mulai dari pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga perangkat daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.

Selanjutnya, sesuai dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021, bahwa pemerintah kabupaten/kota dan provinsi tidak menyusun laporan kinerja tersendiri, namun disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal tersebut sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang penyederhanaan laporan. Informasi laporan kinerja pemerintah daerah yang terdapat dalam LPPD tetap mencakup perencanaan kinerja dan capaian akuntabilitas kinerja. Kaidah penyusunan uraian laporan kinerja yang menjadi bagian dalam LPPD tersebut tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun penyusunan LKjIP 2025 merupakan masa transisi antara RPJMD 2021–2026 dan RPJMD 2025–2029, sehingga substansi dan pengukuran capaian kinerja dalam dokumen ini masih mengacu pada target, sasaran, dan indikator yang ditetapkan dalam RPJMD 2021–2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, sekaligus menjadi jembatan menuju penyesuaian arah kebijakan dan indikator kinerja pada RPJMD 2025–2029. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pertama Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang mengusung visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu “Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”, kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan indikator beserta rencana pendanaannya yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun sebagai respon atas kondisi, kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan indikator dan target kinerja Daerah melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 bermaksud untuk memberikan gambaran tentang target pencapaian Visi dan Misi Daerah masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021-2026. Tingkat

keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran dan indikator program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai sekaligus menjadi jembatan menuju penyesuaian arah kebijakan dan indikator kinerja pada RPJMD 2025–2029.

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan secara spesifik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, indikator kinerja menjadi dasar dalam penilaian kinerja pada setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, indikator kinerja juga berfungsi sebagai parameter dalam menentukan prioritas pembangunan serta sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Dalam implementasinya, target indikator kinerja tahunan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati sebagai komitmen pencapaian kinerja pemerintah daerah. Perjanjian Kinerja Bupati Wonosobo Tahun 2025 memuat 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis dengan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja beserta target yang harus dicapai pada tahun 2025. Target kinerja yang diperjanjikan tersebut tidak hanya mencerminkan hasil pelaksanaan program pada tahun berjalan, tetapi juga mencakup outcome dari kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga menjamin kesinambungan kinerja dari waktu ke waktu. Selanjutnya, capaian atas indikator-indikator kinerja tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2025, yaitu “Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah” sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kabupaten Wonosobo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat				
1	Menguatnya penjaminan hak politik sesuai dengan prinsip demokrasi	Indeks hak politik	Angka	70,27

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	Meningkatnya toleransi kehidupan bermasyarakat	Indeks toleransi	Angka	87
3	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)	Indeks rasa aman	Angka	85
4	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	81,08
		Nilai SAKIP	Angka	72,47
		Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,59
5	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel	Indeks merit	Angka	300
		Indeks SPBE	Angka	3,02
6	Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	97,65
7	Meningkatnya pelayanan publik	Nilai ketercapaian SPM layanan dasar	Angka	100
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Angka	91,82
Misi 2: Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi				
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor dominan	Laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB	%	5,22
		Laju pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	%	3,50
		Laju pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB	%	3,40
2	Berkembangnya potensi sektor pariwisata	Rata-rata pengeluaran belanja (<i>spending of money</i>) wisatawan	Rp/orang	1.000.000
3	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi investasi daerah (trilyun rupiah)	trilyun (Rp)	7,38

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4	Meningkatnya pertumbuhan UMKM, koperasi dan lembaga ekonomi desa	Persentase usaha mikro naik kelas	%	0,021
		Pertumbuhan koperasi sehat	%	2,45
		Pertumbuhan strata BUMDes	%	17,98
5	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif	Rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat kelompok pendapatan 40 persen terendah	Rp/bln	496.900
6	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,50
Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern				
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Angka	10,69
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Angka	74,27
3	Meningkatkanya kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial	Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	65,23
		Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM)	%	0,725
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,96
4	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Indeks pembangunan pemuda	Angka	54
Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata				
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat kemantapan jalan	%	65
2	Meningkatnya tingkat akses dan kualitas fasilitas sanitasi	Indeks sanitasi	Angka	77,08

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan air minum	Indeks layanan air minum	Angka	91
4	Meningkatnya kualitas dan keberlanjutan sistem irigasi dalam mendukung sektor pengelolaan sumber daya air	Indeks kinerja sistem irigasi	Angka	69,8
5	Meningkatnya keselamatan lalu lintas jalan	Indeks keselamatan lalu lintas jalan	Angka	75,15
6	Tersedianya perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni	%	75,5
7	Meningkatnya aksesibilitas, konektivitas dan penataan ruang wilayah	Indeks aksesibilitas wilayah	Angka	1,26
		Indeks penataan ruang	Angka	97,5
		Rasio konektivitas wilayah	Angka	93,25
Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang				
1	Meningkatnya kualitas air, udara, tutupan lahan	Indeks kualitas air	Angka	51,17
		Indeks kualitas udara	Angka	91,9
		Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	57,55
2	Meningkatnya efektivitas kinerja layanan persampahan	Persentase sampah yang dikelola	%	60
3	Terwujudnya wilayah yang berketahanan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,845

Di samping sasaran strategis, indikator kinerja dan target, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 juga mencantumkan program dan anggaran tahun 2025. Program dan anggaran tersebut sebagai pendukung utama upaya pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

Namun di Tahun 2025 terdapat beberapa kali perubahan kebijakan anggaran program melalui Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Berikut merupakan Tabel Program dan Anggaran sebelum dan sesudah perubahan.

Tabel 2.3.2
Program dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Tahun Anggaran 2025

Program	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.150.580.988.202,00	Rp1.124.047.534.489,50
Program Pengelolaan Pendidikan	Rp158.399.838.000,00	Rp149.809.842.042,00
Program Pengembangan Kurikulum	Rp335.000.000,00	Rp235.000.000,00
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp145.000.000,00	Rp72.800.000,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp126.906.862.658,00	Rp103.555.816.018,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp877.867.200,00	Rp784.946.900,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp1.086.985.000,00	Rp733.759.310,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp580.671.796,00	Rp322.947.576,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp6.090.000.000,00	Rp5.324.348.000,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp1.100.000.000,00	Rp1.100.000.000,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp1.825.000.000,00	Rp2.815.000.000,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp770.000.000,00	Rp900.000.000,00
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp772.458.380,00	Rp653.252.000,00
Program Penyelenggaraan Jalan	Rp72.422.348.000,00	Rp89.181.945.136,00
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp164.190.000,00	-
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp1.606.000.000,00	Rp1.096.280.000,00
Program Pengembangan Perumahan	Rp645.000.000,00	Rp643.831.380,00

Program	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
Program Kawasan Permukiman	Rp193.725.000,00	Rp75.408.040,00
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp165.000.000,00	Rp205.000.000,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp14.117.523.952,00	Rp16.722.573.863,00
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp35.474.617,00	Rp31.135.142,00
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp2.728.999.580,00	Rp2.306.732.125,00
Program Penanggulangan Bencana	Rp1.495.000.000,00	Rp1.086.030.526,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp2.255.000.000,00	Rp1.947.375.600,00
Program Pemberdayaan Sosial	Rp667.000.000,00	Rp582.748.282,00
Program Rehabilitasi Sosial	Rp1.370.000.000,00	Rp1.133.375.066,00
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp7.167.027.900,00	Rp7.506.267.120,00
Program Penanganan Bencana	Rp195.000.000,00	Rp96.229.684,00
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp3.555.000.000,00	Rp6.730.543.621,00
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp555.000.000,00	Rp315.000.000,00
Program Hubungan Industrial	Rp235.000.000,00	Rp140.000.000,00
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp850.000.000,00	Rp508.102.000,00
Program Perlindungan Perempuan	Rp130.000.000,00	Rp96.400.000,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp260.000.000,00	Rp141.418.903,00
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp20.000.000,00	Rp7.500.000,00
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp220.000.000,00	Rp103.150.000,00
Program Perlindungan Khusus Anak	Rp81.920.000,00	Rp52.000.000,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp75.000.000,00	Rp45.000.000,00
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp125.000.000,00	Rp70.000.000,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp140.000.000,00	Rp100.000.000,00

Program	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp134.936.492,00	Rp125.282.492,00
Program Penatagunaan Tanah	Rp73.270.000,00	Rp60.771.895,00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp240.000.000,00	Rp180.137.516,00
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp696.200.000,00	Rp471.325.094,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp1.799.672.414,00	Rp1.525.858.871,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp25.000.000,00	Rp10.590.388,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp50.000.000,00	Rp50.718.950,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp80.000.000,00	Rp31.942.631,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp10.000.000,00	Rp4.075.000,00
Program Pengelolaan Persampahan	Rp9.934.466.900,00	Rp10.066.294.109,00
Program Pendaftaran Penduduk	Rp1.065.000.000,00	Rp835.317.350,00
Program Pencatatan Sipil	Rp185.000.000,00	Rp77.100.000,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp130.149.360,00	Rp78.399.360,00
Program Penataan Desa	Rp1.896.600.000,00	Rp1.612.765.900,00
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp140.000.000,00	Rp73.336.940,00
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp4.152.710.000,00	Rp3.559.254.852,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp730.000.000,00	Rp556.427.270,00
Program Pengendalian Penduduk	Rp544.478.000,00	Rp444.298.800,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp5.551.142.000,00	Rp5.099.239.956,00
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp5.123.200.000,00	Rp5.049.723.600,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp10.142.517.536,00	Rp8.476.565.934,00

Program	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
Program Pengelolaan Pelayaran	Rp182.201.492,00	Rp169.820.350,00
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp3.440.148.960,00	Rp4.254.667.558,00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp1.582.089.631,00	Rp1.222.159.410,00
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp43.692.000,00	Rp14.895.260,00
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp87.239.680,00	Rp40.610.467,00
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp65.000.000,00	Rp94.064.018,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp340.000.000,00	Rp602.519.297,00
Program Pengembangan UMKM	Rp800.000.000,00	Rp800.000.000,00
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp100.000.000,00	Rp65.379.400,00
Program Promosi Penanaman Modal	Rp35.000.000,00	Rp8.450.000,00
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp122.500.000,00	Rp77.466.900,00
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp145.500.000,00	Rp38.228.040,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp650.000.000,00	Rp430.000.000,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp7.140.000.000,00	Rp9.280.000.000,00
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp350.000.000,00	Rp230.000.000,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp86.400.000,00	Rp22.260.000,00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp59.000.000,00	Rp24.880.000,00
Program Pengembangan Kebudayaan	Rp2.455.000.000,00	Rp4.293.708.953,00
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp70.000.000,00	Rp51.143.600,00
Program Pembinaan Perpustakaan	Rp1.161.859.218,00	Rp972.211.778,00
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp25.530.000,00	-
Program Pengelolaan Arsip	Rp327.216.660,00	Rp197.329.969,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp80.000.000,00	Rp30.000.000,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp1.125.000.000,00	Rp880.000.000,00

Program	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp1.879.325.592,00	Rp1.626.613.553,00
Program Pemasaran Pariwisata	Rp1.195.000.000,00	Rp843.704.776,00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp245.000.000,00	Rp286.361.670,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp435.000.000,00	Rp319.689.000,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp6.979.024.300,00	Rp8.031.053.381,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp1.213.994.300,00	Rp1.063.994.300,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp100.525.000,00	Rp85.000.000,00
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp100.000.000,00	Rp70.000.000,00
Program Penyuluhan Pertanian	Rp890.000.000,00	Rp1.098.960.000,00
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp17.544.990,00	Rp61.650.438,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp845.783.375,00	Rp1.303.466.651,00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp1.700.000.000,00	Rp1.597.206.018,00
Program Pengembangan Ekspor	Rp32.000.000,00	Rp35.048.421,00
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp110.000.000,00	Rp58.313.135,00
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp20.000.000,00	Rp9.155.396,00
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp477.000.000,00	Rp400.000.000,00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp50.000.000,00	Rp24.065.362,00
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp50.000.000,00	-
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp4.692.768.038,00	Rp4.629.463.270,00
Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp1.987.211.165,00	Rp1.605.344.546,00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp5.711.240.000,00	Rp4.231.455.000,00

Program	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp640.000.000,00	Rp360.739.320,00
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp1.083.097.265,00	Rp645.739.254,00
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp381.287.252.600,00	Rp376.147.213.678,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp960.000.000,00	Rp761.832.513,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp3.943.490.397,00	Rp2.990.115.662,00
Program Kepegawaian Daerah	Rp1.439.420.000,00	Rp1.882.864.481,00
Program Riset Dan Inovasi Daerah	Rp475.000.000,00	Rp269.310.000,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp707.504.000,00	Rp545.401.482,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp140.000.000,00	Rp105.590.000,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp1.826.060.606,00	Rp1.781.320.606,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp18.305.456.903,00	Rp18.960.939.845,50
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp1.941.734.652,00	Rp1.903.187.127,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp1.408.935.103,00	Rp1.303.442.204,00
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp780.000.000,00	Rp1.165.663.484,00
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp1.674.400.000,00	Rp1.823.034.450,00
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp1.750.000.000,00	Rp1.604.555.725,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp425.000.000,00	Rp89.684.253,00
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp425.000.000,00	Rp978.268.148,00

2.3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja daerah memuat sasaran pembangunan beserta indikator sasaran yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikator tersebut menjadi dasar dalam

menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025, yang diukur berdasarkan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021–2026 serta mempertimbangkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025. Dengan demikian, terdapat beberapa penyesuaian target terhadap dokumen RKPD Kabupaten Wonosobo 2025. Dalam dokumen tersebut ditetapkan sebanyak 41 indikator sasaran yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.

Selanjutnya, pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dengan membandingkan realisasi terhadap target pada setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan capaian indikator kinerja tersebut menggunakan dua rumus pengukuran sebagai berikut.

- (1) Indikator bermakna positif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- (2) Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, sehingga menggunakan rumus panjang.

$$\frac{\text{target}(\text{realisasi target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Tabel 2.3.3
Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	2025				Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian		
1	2		3	4	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya pemenuhan hak-hak politik	1	Indeks Hak Politik	Angka	70,27	70	99,62%	Sangat Tinggi	70,27	99,62%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	2025				Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian		
1	2		3	4	8	9	10	11	12	13
2	Meningkatnya toleransi kehidupan bermasyarakat	2	Indeks Toleransi	Angka	87	79,87	91,80%	Sangat Tinggi	87	91,80%
3	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	3	Indeks Rasa Aman	Angka	85	75,44	88,75%	Tinggi	85	88,75%
4	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	81,08	76,39	94,22%	Sangat Tinggi	80	95,49%
		5	Nilai SAKIP	Angka	72,47	68,12	94,00%	Sangat Tinggi	72,47	94,00%
		6	Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,59	2,788	77,66%	Tinggi	3,59	77,66%
5	Mewujudkan pemerintahan yang kapabel	7	Indeks Merit	Angka	300	289,5	96,50%	Sangat Tinggi	300	96,50%
		8	Indeks SPBE	Angka	3,02	4,14	137,09 %	Sangat Tinggi	3,02	137,09 %
6	Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	97,65	98,28	100,65 %	Sangat Tinggi	95	103,45 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	2025				Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian		
1	2		3	4	8	9	10	11	12	13
7	Meningkatnya pelayanan publik	#	Nilai ketercapaian SPM layanan dasar	Angka	100	99,79	99,79%	Sangat Tinggi	100	99,79%
		#	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,82	93,5	101,83 %	Sangat Tinggi	84,5	110,65 %
8	Meningkatnya pertumbuhan sektor dominan	#	Laju Pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB	%	5,22	4,29	82,18%	Tinggi	2,00-4,00	3406,00 %
		#	Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	%	3,50	5,37	153,43 %	Sangat Tinggi	3,50-5,00	107,40 %
		#	Laju Pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB	%	3,40	4,17	166,80 %	Sangat Tinggi	2,50-4,00	104,25 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	2025				Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian		
1	2		3	4	8	9	10	11	12	13
9	Berkembangnya potensi sektor pariwisata	#	Rata-rata pengeluaran belanja (<i>Spending of money</i>) wisatawan	(Rp/orang	1.000.000	629.325	62,93%	Rendah	1.000.000	62,93%
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi	#	Realisasi investasi daerah	trilyun Rp	7,38	8,29	112,33 %	Sangat Tinggi	3,9	212,56 %
11	Meningkatnya pertumbuhan UMKM, koperasi dan lembaga ekonomi desa	#	Persentase usaha mikro naik kelas	%	0,021	0,012	57,14%	Rendah	0,6	2,00%
		#	Pertumbuhan koperasi sehat	%	2,45	19,28	786,9%	Sangat Tinggi	2,33	827,47 %
		#	pertumbuhan strata BUMDes	%	17,98	23	127,92 %	Sangat Tinggi	16,67	137,97 %
12	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif	#	Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat 40 persen pendapatan terendah	Rp/bln	496.900	568.683	114,45 %	Sangat Tinggi	401.392	141,68 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	2025				Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian		
1	2		3	4	8	9	10	11	12	13
13	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	#	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,50	3,99	86,00%	Tinggi	2,90-3,50	86,00%
14	Meningkatnya kualitas pendidikan	#	Indeks Pendidikan	Angka	10,69	10,34	96,73%	Sangat Tinggi	10,69	96,73%
15	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	#	Indeks Kesehatan	Angka	74,27	74,56	100,39 %	Sangat Tinggi	72,72	102,53 %
16	Meningkatnya kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial	#	Cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	65,23	83,74	128,38 %	Sangat Tinggi	65,22	128,40 %
		#	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,725	0,78	107,59 %	Sangat Tinggi	0,721	108,18 %
		#	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,96	93,02	100,06 %	Sangat Tinggi	92,96	100,06 %
17	Meningkatnya prestasi	#	Indeks Pembangunan	Angka	54	54,08	100,15 %	Sangat Tinggi	54	100,15 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	2025				Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian		
1	2		3	4	8	9	10	11	12	13
	pemuda dan olahraga		unan Pemuda							
18	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	#	Tingkat kemantapan jalan	%	65	65,43	100,66 %	Sangat Tinggi	65	100,66 %
19	Meningkatnya layanan akses air limbah domestik layak	#	Indeks Sanitasi	Angka	77,08	58,5	75,90%	Tinggi	77,08	75,90%
20	Meningkatnya layanan akses air minum layak	#	Indeks layanan air minum	Angka	91	84,62	92,99%	Sangat Tinggi	91	92,99%
21	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	#	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Angka	69,8	65,44	93,75%	Sangat Tinggi	69,8	93,75%
22	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	#	Indeks Keselamatan Lalu Lintas	Angka	75,15	100	133,07 %	Sangat Tinggi	75,15	133,07 %
23	Tersedianya perumahan dan kawasan permukiman layak huni	#	Persentase permukiman layak huni	%	75,5	96,47	127,77 %	Sangat Tinggi	75	128,63 %
24	Meningkatnya aksesibilitas wilayah, konektivitas wilayah dan	#	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Angka	1,26	0,95	75,40%	Tinggi	1,26	75,40%
		#	Rasio Konektivitas	Angka	93,25	100	107,24 %	Sangat Tinggi	97	103,09 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	2025				Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian		
1	2		3	4	8	9	10	11	12	13
	penataan ruang wilayah		tas Wilayah							
		#	Indeks Penataan Ruang	Angka	97,5	84	86,15%	Tinggi	93,25	90,08%
25	Meningkatnya kualitas air, udara, tutupan lahan	#	Indeks Kualitas Air	Angka	51,17	75,66	147,86 %	Sangat Tinggi	51,16	147,89 %
		#	Indeks Kualitas Udara	Angka	91,9	80,39	87,48%	Tinggi	91,9	87,48%
		#	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	57,55	62,12	107,94 %	Sangat Tinggi	57,55	107,94 %
26	Meningkatnya pengelolaan sampah	#	Persentase sampah yang terkelola	%	60	51,43	85,72%	Tinggi	60	85,72%
27	Meningkatnya ketahanan bencana	#	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,845	0,89	105,33 %	Sangat Tinggi	0,84	105,95 %

Berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, capaian atau realisasi kinerja untuk masing-masing indikator dapat disajikan sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Capaian kinerja tersebut selanjutnya diklasifikasikan ke dalam skala peringkat kinerja yang terdiri atas kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Pengelompokan tingkat capaian kinerja ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 2.3.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% – 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja tersebut, realisasi/capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2025 dapat diklasifikasikan dalam tabel rekapitulasi skala capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3.5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Indikator	Persentase
1	Sangat Tinggi	30	73,17%
2	Tinggi	9	21,95%
3	Sedang	0	0,00%
4	Rendah	2	4,88%
5	Sangat Rendah	0	0,00%
	JUMLAH	41	100,00%

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 41 indikator yang telah ditetapkan, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang sangat baik. Sebanyak 30 indikator atau 73,17% berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan 9 indikator atau 21,95% berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan mampu dicapai secara optimal oleh perangkat daerah, sehingga secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun berjalan dapat dikatakan berjalan efektif dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Namun demikian, masih terdapat 2 indikator atau 4,88% yang berada pada kategori rendah, yaitu indikator Rata-rata pengeluaran belanja (*Spending of money*) wisatawan dan Indikator Persentase usaha mikro naik kelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa target kinerja yang belum tercapai secara optimal dan

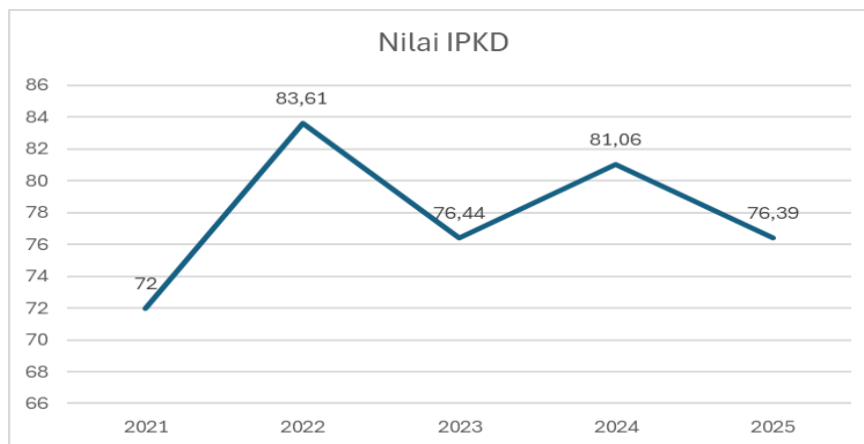
memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian tersebut serta upaya perbaikan melalui penguatan koordinasi, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih ditingkatkan.

Selanjutnya penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator sasaran sebagaimana uraian-uraian sebagai berikut:

1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran yang menunjukkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah, meliputi aspek perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan anggaran, transparansi, akuntabilitas, pengendalian internal, serta kualitas pelaporan keuangan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah berjalan efektif, efisien, dan sesuai prinsip *good governance*. Adapun dimensi-dimensi yang digunakan untuk mengukur IPKD adalah: (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) kondisi keuangan daerah, dan (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi Daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/509 Tahun 2025 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 IPKD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebesar 76,39 (B). Angka ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan tahun 2025 yaitu sebesar 81,08 dengan capaian 94,22%. IPKD Tahun 2025 menurun sebesar 5,76% dibandingkan IPKD Tahun 2024 yang terealisasi sebesar 81,08. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 80, IPKD Tahun 2025 80 telah mencapai 95,49%. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan belum memenuhi target tahunan, secara komparatif capaian IPKD Kabupaten Wonosobo tetap menunjukkan kinerja yang kompetitif karena menempati peringkat ke-2 dari 29 kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.3.3
Trend Nilai IPKD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2025

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan IPKD Tahun 2025 berdasarkan klaster menurut kemampuan keuangan daerah, yaitu: Kabupaten Kategori Kemampuan Keuangan Daerah "Sedang", Kabupaten Kategori Kemampuan Keuangan Daerah "Rendah", Kabupaten Kategori Kemampuan Keuangan Daerah "Sangat Rendah", Kota Kategori Kemampuan Keuangan Daerah "Sangat Tinggi", Kota Kategori Kemampuan Keuangan Daerah "Tinggi", Kota Kategori Kemampuan Keuangan Daerah "Sedang" dan Kota Se-Jawa Tengah Kategori Kemampuan Keuangan Daerah "Rendah". Kabupaten Wonosobo masuk dalam klaster kabupaten Kategori Kemampuan Keuangan Daerah "Sedang".

Tabel 2.3.6

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024, TAHUN UKUR 2025										
A. Kabupaten Kategori Kemampuan Keuangan Daerah Sedang										
NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	TEGAL	11,7635	13,2292	14,5313	20,0000	8,0000	10,0000	77,5239	CUKUP BAIK	B
2.	WONOSOBO	10,8914	14,3750	13,1250	20,0000	8,0000	10,0000	76,3914	CUKUP BAIK	B
3.	KUDUS	14,1900	8,2292	14,5313	20,0000	8,0000	10,0000	74,9504	CUKUP BAIK	B
4.	DEMAK	13,2936	9,1667	13,5938	20,0000	8,0000	10,0000	74,0540	CUKUP BAIK	B
5.	BOYOLALI	13,1214	6,4417	12,6563	20,0000	8,0000	10,0000	70,2194	CUKUP BAIK	B
6.	BREBES	9,4233	8,5069	10,7813	20,0000	8,0000	10,0000	66,7115	CUKUP BAIK	B

B. Kabupaten Kategori Kemampuan Keuangan Daerah Rendah

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	KLATEN	13,7531	9,4444	14,5313	20,0000	8,0000	10,0000	75,7288	CUKUP BAIK	B
2.	GROBOGAN	13,8607	8,7847	15,0000	20,0000	8,0000	10,0000	75,6454	CUKUP BAIK	B
3.	SEMARANG	14,5194	14,3750	11,7188	20,0000	8,0000	6,6700	75,2831	CUKUP BAIK	B
4.	KEBUMEN	14,0484	9,5833	13,5938	20,0000	8,0000	10,0000	75,2255	CUKUP BAIK	B
5.	PURWOREJO	13,3731	9,5833	13,5938	20,0000	8,0000	10,0000	74,5502	CUKUP BAIK	B
6.	CILACAP	14,6087	9,1667	12,1875	20,0000	8,0000	10,0000	73,9629	CUKUP BAIK	B
7.	SUKOHARJO	11,9201	9,0625	13,5938	20,0000	8,0000	10,0000	72,5763	CUKUP BAIK	B
8.	JEPARA	10,8990	9,4097	14,0625	20,0000	8,0000	10,0000	72,3713	CUKUP BAIK	B
9.	BLORA	11,1071	9,3750	13,5938	20,0000	8,0000	10,0000	72,0758	CUKUP BAIK	B
10.	BATANG	13,5336	9,0625	10,7813	20,0000	8,0000	10,0000	71,3773	CUKUP BAIK	B
11.	PATI	12,6272	5,4167	13,5938	20,0000	8,0000	10,0000	69,6376	CUKUP BAIK	B
12.	MAGELANG	8,8515	9,0625	13,5938	20,0000	8,0000	10,0000	69,5078	CUKUP BAIK	B
13.	TEMANGGUNG	12,1824	9,3750	11,2500	20,0000	4,0000	10,0000	66,8074	CUKUP BAIK	B
14.	KARANGANYAR	10,6287	8,2060	7,9688	20,0000	8,0000	10,0000	64,8035	CUKUP BAIK	B

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
15.	KENDAL	9,9122	6,9792	13,1250	20,0000	4,0000	10,0000	64,0164	CUKUP BAIK	B
16.	BANYUMAS	10,2900	7,9861	11,7188	20,0000	4,0000	10,0000	63,9948	CUKUP BAIK	B
17.	BANJARNEGARA	6,3409	9,5833	11,7188	20,0000	4,0000	10,0000	61,6430	CUKUP BAIK	B

C. Kabupaten Kategori Kemampuan Keuangan Daerah Sangat Rendah

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	WONOGIRI	13,5869	8,5417	14,0625	20,0000	8,0000	10,0000	74,1910	CUKUP BAIK	B
2.	SRAGEN	14,5820	8,9236	12,6563	20,0000	8,0000	10,0000	74,1619	CUKUP BAIK	B
3.	PEKALONGAN	12,0904	9,4097	12,1875	20,0000	4,0000	10,0000	67,6877	CUKUP BAIK	B
4.	PEMALANG	11,3261	8,6458	11,2500	20,0000	8,0000	6,6700	65,8919	CUKUP BAIK	B
5.	PURBALINGGA	10,0564	9,0625	12,6563	20,0000	4,0000	10,0000	65,7751	CUKUP BAIK	B
6.	REMBANG	6,8814	8,5764	7,5000	20,0000	4,0000	10,0000	56,9578	CUKUP BAIK	B

D. Kota Kategori Kemampuan Keuangan Daerah Sangat Tinggi

NO.	KOTA	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	KOTA SEMARANG	13,7431	14,5833	15,0000	20,0000	20,0000	10,0000	93,3264	BAIK	A
2.	KOTA SURAKARTA	11,8235	13,4375	14,5313	20,0000	12,0000	6,6700	78,4623	CUKUP BAIK	B
3.	KOTA MAGELANG	10,2563	7,8819	14,0625	20,0000	12,0000	10,0000	74,2007	CUKUP BAIK	B

E. Kota Kategori Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi

NO.	KOTA	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	KOTA SALATIGA	10,4940	0,0000	10,3125	20,0000	8,0000	10,0000	58,8065	CUKUP BAIK	B

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/509 Tahun 2025

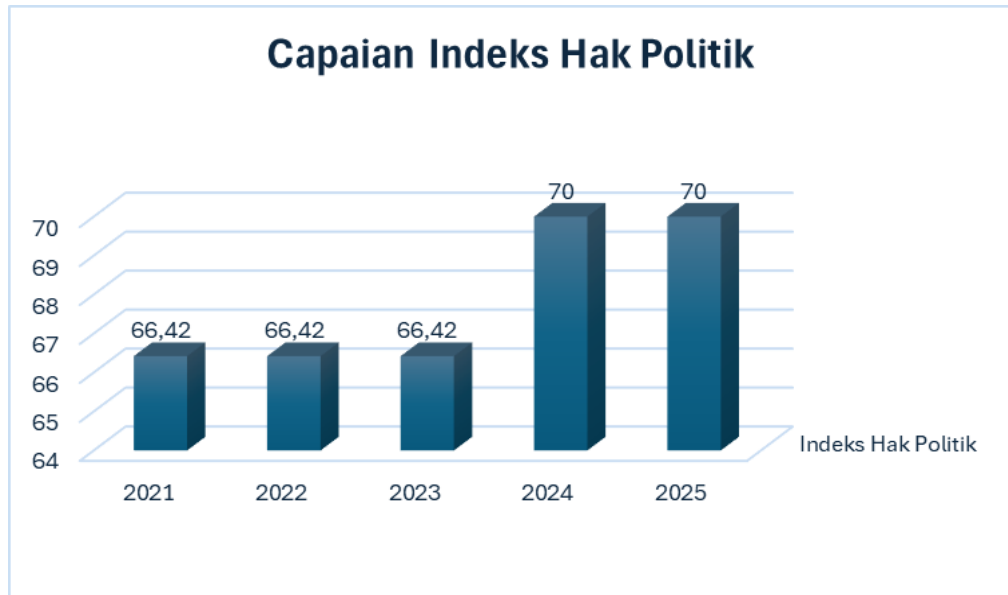
Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, konsistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, serta perolehan opini WTP atas LKPD dari BPK. Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat capaian maksimal seperti belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, kualitas belanja yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome), fluktuasi penyerapan anggaran, serta perlunya penguatan kapasitas SDM dan sistem pengendalian

intern pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang selaras dengan RPJMD, meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, mengoptimalkan pemanfaatan sistem keuangan berbasis elektronik, meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja daerah, serta memperkuat fungsi pengawasan internal guna mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

2) Indeks Hak Politik

Indeks hak politik adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana warga negara menikmati dan dapat menggunakan hak-hak politiknya secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak politik mencakup kemampuan warga untuk: (1) Memilih dan dipilih dalam pemilihan umum; (2) Terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik; (3) Berkumpul dan berorganisasi secara bebas; (4) Menyatakan pendapat serta mengkritik kebijakan pemerintah tanpa takut dihukum. Indeks ini biasanya digunakan untuk melihat kualitas demokrasi di suatu wilayah, semakin tinggi indeksnya, makin kuat partisipasi dan perlindungan hak politik warganya.

Pada Tahun 2025, Indeks Hak Politik Kabupaten Wonosobo terealisasi sebesar 70. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik masyarakat sudah cukup baik namun belum optimal. Capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 70,27, dengan tingkat pencapaian sebesar 99,62%. Nilai tersebut sama dengan capaian Tahun 2024, yang menunjukkan adanya konsistensi kinerja, meskipun belum mengalami peningkatan pada tahun berjalan. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 70,23, capaian Tahun 2025 telah mencapai 99,62%, sehingga secara umum sudah mendekati target yang direncanakan. Gambaran perkembangan Indeks Hak Politik dari tahun 2021-2025 di Wonosobo dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3.1

Capaian Indeks Hak Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2025

Perkembangan Indeks Hak Politik Kabupaten Wonosobo selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2021 sampai dengan 2023, indeks tercatat sebesar 66,42. Selanjutnya pada Tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 70 dan bertahan pada angka yang sama di Tahun 2025. Namun jika dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 79,81, capaian Kabupaten Wonosobo masih dibawah capaian nasional dan perlu ditingkatkan di Tahun 2026.

Capaian Indeks hak politik pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorongnya tercapainya nilai 70 antara lain adanya pendidikan politik yang baik melalui sekolah dan sosialisasi pemilu, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum maupun musyawarah desa, kebebasan berpendapat yang terjamin, serta dukungan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan partisipatif. Namun, masih terdapat faktor penghambat belum tercapainya Indeks Hak Politik secara maksimal antara lain seperti rendahnya literasi politik sebagian masyarakat, keterbatasan akses informasi terutama di wilayah pedesaan, adanya tekanan sosial dalam menentukan pilihan politik, serta kendala administrasi kependudukan yang memengaruhi hak pilih warga. Oleh karena itu, strategi peningkatan indeks hak politik dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan politik secara berkelanjutan, perluasan akses informasi dan internet desa, penyediaan forum aspirasi publik yang rutin, perbaikan layanan administrasi kependudukan, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil untuk mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan berkualitas.

3) Indeks Toleransi

Indeks toleransi adalah ukuran yang menunjukkan tingkat sikap saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun antar kelompok masyarakat, baik berdasarkan agama, suku, budaya, maupun pandangan sosial-politik. Indeks ini menggambarkan sejauh mana masyarakat mampu menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Indeks Toleransi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebesar 79,87, angka ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan Tahun 2025 yaitu sebesar 87 dengan capaian 91,80%, nilai tersebut sama dengan capaian Tahun 2024 yang menunjukkan adanya konsistensi kinerja, meskipun belum mengalami peningkatan pada tahun berjalan. Nilai tersebut menggambarkan bahwa masyarakat pada umumnya sudah mampu menerima, menghargai, dan hidup berdampingan dengan perbedaan, baik perbedaan agama, suku, budaya, maupun pandangan sosial lainnya. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 87, Indeks Toleransi Tahun 2025 telah mencapai 91,80%. Sebagai daerah dengan keberagaman agama dan budaya, Wonosobo memiliki potensi kerukunan yang kuat, namun tetap perlu penguatan agar toleransi tetap terjaga di tengah perkembangan sosial dan arus informasi digital.

Tabel berikut merupakan gambaran perkembangan Indeks Toleransi dari tahun 2021-2025 di Wonosobo.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Toleransi	79,5	81	73	79,87	79,87

Di tingkat nasional Indeks Toleransi berkorelasi dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). IKUB Nasional pada tahun 2025 tercapai sebesar 77,89. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, Indeks Toleransi Kabupaten Wonosobo telah tercapai lebih dari realisasi nasional.

Tingginya capaian Indeks Toleransi di Kabupaten Wonosobo tidak lepas dari upaya Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah dengan menyelenggarakan kegiatan lintas agama yang cukup tinggi intensitasnya serta penguatan sistem demokrasi. Indeks toleransi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong seperti kuatnya budaya gotong royong, peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan, serta adanya kegiatan lintas komunitas yang mempererat hubungan sosial. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman tentang keberagaman pada sebagian masyarakat, penyebaran hoaks

dan ujaran kebencian melalui media sosial, serta sikap fanatisme sempit yang dapat memicu perpecahan.

Strategi peningkatan indeks toleransi di Kabupaten Wonosobo dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter dan moderasi beragama, penyelenggaraan dialog dan kegiatan lintas agama maupun budaya secara rutin, peningkatan literasi digital untuk menangkal informasi provokatif, serta pelibatan generasi muda dalam kegiatan sosial yang inklusif agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai.

4) Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat perasaan aman masyarakat dari gangguan kejahatan, konflik sosial, maupun ancaman ketertiban umum. Indeks ini diukur melalui tingkat kriminalitas, efektivitas aparat keamanan, penyelesaian konflik, serta persepsi masyarakat terhadap kondisi keamanan lingkungannya.

Di Kabupaten Wonosobo, capaian Indeks Rasa Aman Tahun 2025 sebesar 75,44 tergolong cukup baik, namun masih berada di bawah target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 85. Dengan demikian, capaian tersebut baru mencapai 88,75% dari target, dan nilainya sama dengan tahun 2024 sehingga menunjukkan konsistensi, tetapi belum mengalami peningkatan. Capaian tersebut menggambarkan kondisi sebagian besar masyarakat merasa kondisi lingkungan tempat tinggalnya relatif aman dari gangguan keamanan, kriminalitas, maupun potensi konflik sosial. Jika dibandingkan dengan tren 2021–2025, terlihat adanya penurunan dari tahun 2021 (81,5) ke 2022 (73,84), kemudian peningkatan bertahap hingga stagnan pada 2024–2025 di angka 75,44. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya percepatan peningkatan indeks agar dapat mencapai target RPJMD Tahun 2026 sebesar 85.



Gambar 2.3.2

Trend Indeks Rasa Aman Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2025

Capaian Indeks Rasa aman cenderung naik selama 4 tahun meskipun di tahun 2022 terdapat penurunan yang cukup signifikan. Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian nasional, berdasarkan Survei Gallup 2025 capaian nasional sebesar 89. Hal ini menunjukkan capaian Kabupaten Wonosobo masih berada di bawah capaian nasional sehingga perlu ditingkatkan kembali.

Faktor pendukung capaian indeks ini di Tahun 2025 antara lain kuatnya budaya gotong royong, kepedulian sosial masyarakat, peran aktif aparat keamanan dalam menjaga ketertiban, serta keberadaan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Sementara itu, faktor penghambat belum tercapainya kinerja maksimal meliputi potensi kriminalitas tertentu, kenakalan remaja, keterbatasan pengawasan di wilayah terpencil, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan bersama, serta kerentanan bencana alam mengingat kondisi geografis Wonosobo yang rawan tanah longsor.

Oleh karena itu, strategi peningkatan yang dapat dilakukan meliputi penguatan patroli rutin dan siskamling, pemasangan penerangan jalan dan CCTV di titik rawan, pembinaan generasi muda melalui kegiatan preventif, peningkatan respons cepat terhadap laporan masyarakat, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat manajemen kebencanaan melalui evaluasi dan penyusunan ulang dokumen kontinjensi bencana untuk mempercepat waktu tanggap darurat, serta mendorong pendekatan kolaboratif pentahelix guna menciptakan keamanan sosial yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

5) Nilai SAKIP

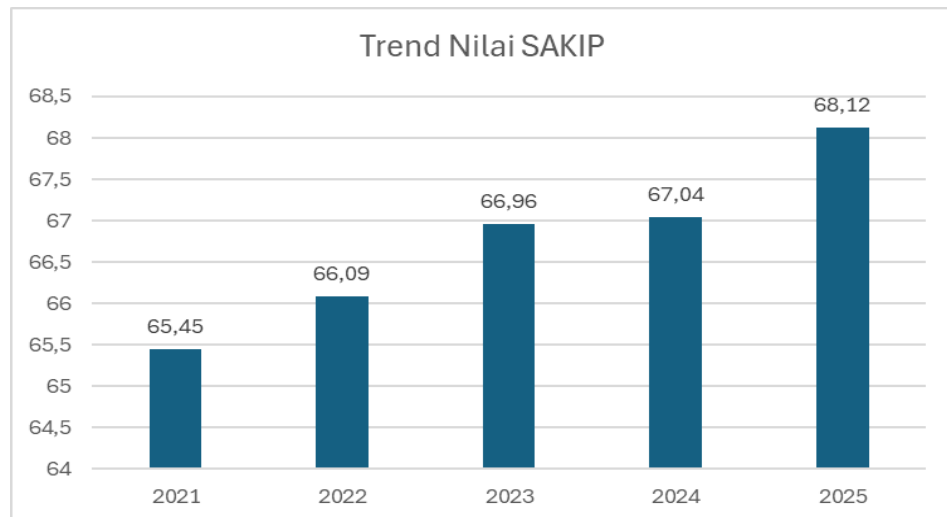
Nilai SAKIP adalah hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian SAKIP umumnya mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja.

Evaluasi SAKIP dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, melalui: analisis sistem yang ada, memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, memberikan solusi atas masalah yang ditemukan, monitoring terhadap sistem yang ada, dan mengumpulkan data dari

luar instansi. Sedangkan komponen evaluasi SAKIP terdiri atas: (1) perencanaan kinerja, (2) pengukuran kinerja, (2) pelaporan kinerja, dan (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil dari evaluasi SAKIP berupa nilai dan predikat yang diberikan kepada masing-masing instansi pemerintah, dengan kategori:

- AA (90-100)
- A (80-90)
- BB (70-80)
- B (60-70)
- D (0-30)
- CC (30-50)

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KEMENPANRB Nomor: B/560/AA.05/2025 Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Nilai SAKIP Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebesar 68,12 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada tingkat pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.



Gambar 2.3.4
Trend Nilai SAKIP Kabupaten Wonosobo 2021-2025

Nilai SAKIP Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebesar 68,12 dengan predikat "B", berada di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 72,47, atau dengan capaian sebesar 94%. Namun demikian nilai tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 67,04. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026, Nilai SAKIP telah mencapai 94%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, capaian Nilai SAKIP Tahun 2025 dibandingkan target masuk dalam kategori kinerja “sangat tinggi”.

Tabel 2.3.7
Nilai SAKIP Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No.	KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP 2025	PREDIKAT
1	2	3	4
1	Banyumas	81.9	A
2	Wonogiri	78.76	BB
3	kota Magelang	76.57	BB
4	Cilacap	74.59	BB
5	Kota Semarang	74.22	BB
6	Kudus	74.07	BB
7	kota Pekalongan	73.28	BB
8	Kota Surakarta	73.24	BB
9	Demak	72.19	BB
10	Kendal	69.79	B
11	Batang	69.34	B
12	kota Tegal	69.26	B
13	Boyolali	69.21	B
14	Kebumen	68.92	B
15	Pemalang	68.88	B
16	Purbalingga	68.29	B
17	Karanganyar	68.21	B
18	Wonosobo	68.12	B
19	Blora	67.73	B
20	Purworejo	67.6	B
21	Salatiga	67.54	B
22	Banjarnegara	67.54	B
23	Sragen	67.53	B
24	Temanggung	67.37	B
25	Sukoharjo	67.33	B
26	Klaten	67.27	B
27	Grobogan	66.48	B
28	Pekalongan	66.4	B
29	Jepara	66.32	B
30	Pati	65.99	B
31	Rembang	65.97	B

No.	KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP 2025	PREDIKAT
32	Tegal	65.88	B
33	Kab Semarang	65.02	B
34	Brebes	64.76	B
35	Magelang	64.05	B

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel di atas, hasil monitoring dan evaluasi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nilai SAKIP Kabupaten Wonosobo berada pada peringkat ke-18. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah baik namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal, peningkatan capaian SAKIP Kabupaten Wonosobo didukung oleh beberapa faktor, antara lain telah dilakukannya perbaikan dokumen RPJMD 2025–2029 yang semakin berorientasi *outcome*, pengembangan Aplikasi Gardu (Garasi Data Utama) sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kinerja hingga level program dan anggaran, publikasi laporan kinerja melalui portal Satu Data sebagai bentuk transparansi, serta pelaksanaan evaluasi internal pada seluruh Perangkat Daerah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah faktor penghambat, seperti belum selarasnya pembaruan RPJMD dan Renstra dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan prinsip kecukupan, belum terpetakannya *crosscutting* kinerja lintas sektor, belum optimalnya cascading kinerja hingga level individu, kualitas analisis dalam LAKIP yang belum komprehensif (termasuk analisis efektivitas dan efisiensi), serta tindak lanjut hasil evaluasi internal yang belum maksimal dan belum didukung kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja. Oleh karena itu, alternatif solusi peningkatan nilai SAKIP dapat dilakukan melalui penyelarasan dan pembaruan IKU secara menyeluruh, penyempurnaan pohon kinerja berbasis *logical framework* dan *Critical Success Factor* (CSF), penguatan integrasi kinerja organisasi dan individu, optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Gardu untuk monitoring dan evaluasi berkala, peningkatan kualitas analisis dalam LAKIP sesuai PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, serta penetapan kebijakan penghargaan dan sanksi berbasis hasil evaluasi guna mendorong budaya kinerja yang lebih akuntabel dan berorientasi hasil.

6) Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat integritas dan praktik antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran IPAK dilakukan melalui survei yang menilai aspek integritas aparatur pemerintah, transparansi kebijakan, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas mekanisme pencegahan dan penanganan korupsi. Indeks ini bertujuan untuk merefleksikan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, sekaligus menjadi instrumen evaluasi dalam mendorong terwujudnya layanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

IPAK Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 terealisasi sebesar 2,78 atau mencapai 77,66% dari target Tahun 2025 sebesar 3,59. Nilai 2,78 menunjukkan bahwa tingkat persepsi masyarakat terhadap praktik antikorupsi berada pada kategori cukup baik, namun masih perlu penguatan. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,05 poin (1,48%) dibandingkan Tahun 2024 yang tercatat sebesar 2,83. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional sebesar 3,4, nilai IPAK Kabupaten Wonosobo masih berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih 0,62 poin. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 3,59, capaian Tahun 2025 telah mencapai 77,66%, yang menunjukkan masih diperlukan upaya percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Perkembangan capaian IPAK Kabupaten Wonosobo Tahun 2021–2025 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun sejak Tahun 2023, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3.5
Capaian IPAK Kabupaten Wonosobo 2021-2025

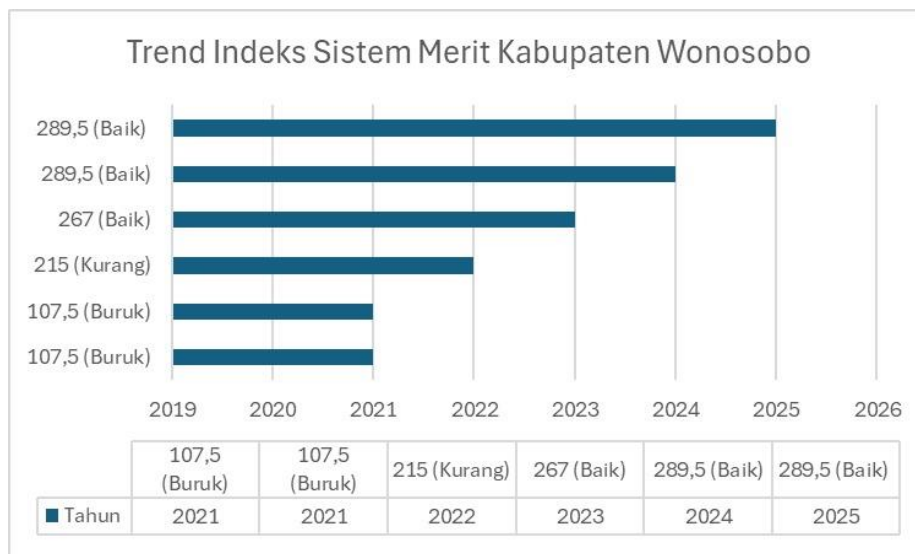
Berdasarkan Tabel diatas, penurunan nilai IPAK pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas dan

upaya pencegahan korupsi di daerah masih perlu diperkuat melalui peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta internalisasi budaya antikorupsi secara berkelanjutan di seluruh perangkat daerah. Penurunan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Kabupaten Wonosobo dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, antara lain masih adanya persepsi masyarakat terhadap praktik pelayanan publik yang belum sepenuhnya transparan, belum optimalnya keterbukaan informasi terkait proses pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan anggaran, serta belum meratanya implementasi zona integritas di seluruh Perangkat Daerah. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat yang belum dimanfaatkan secara maksimal, tindak lanjut laporan yang kurang terpublikasi dengan baik, serta belum kuatnya internalisasi budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kualitas pelayanan yang belum konsisten di seluruh unit layanan, sehingga membentuk persepsi negatif meskipun secara regulatif sistem pengendalian telah tersedia.

Untuk meningkatkan nilai IPAK, Pemerintah Daerah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan data anggaran, pengadaan, dan kinerja secara lebih informatif dan mudah diakses publik. Optimalisasi sistem pengaduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi juga perlu dilakukan, disertai publikasi tindak lanjut sebagai bentuk komitmen terhadap integritas. Selain itu, percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat, serta penerapan reward and punishment berbasis integritas dapat mendorong perubahan budaya kerja. Edukasi antikorupsi kepada aparatur dan masyarakat secara berkelanjutan juga penting untuk membangun kesadaran kolektif, sehingga peningkatan nilai IPAK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

7) Indeks Merit

Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada prinsip kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit bertujuan mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi melalui pengelolaan ASN yang objektif dan transparan. Implementasi sistem merit mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen talenta, penilaian kinerja, hingga perlindungan pegawai. Dengan penerapan sistem merit yang optimal, diharapkan terwujud pemerintahan yang kapabel dan mendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi daerah.



Gambar 2.3.6

Trend Indeks Merit Kabupaten Wonosobo 2021-2024

Pada Tahun 2025, tidak dilaksanakan penilaian Sistem Merit secara nasional dikarenakan adanya perubahan instrumen sehingga capaian kinerja sementara tetap menggunakan capaian Tahun 2024. Pada tahun 2024, Indeks Merit Kabupaten Wonosobo mencapai 289,5 dengan kategori “Baik”, melampaui target tahun 2024 sebesar 270 (107,22%) dan meningkat 8,43% dibandingkan tahun 2023. Capaian tersebut telah mencapai 96,50% dari target akhir RPJMD 2021–2026 sebesar 300 serta menempatkan Wonosobo pada peringkat ke-11 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian Indeks Merit, sehingga capaian tahun 2024 menjadi dasar evaluasi kinerja terakhir.

Capaian tersebut didukung oleh tersusunnya perencanaan kebutuhan ASN berbasis Anjab dan ABK yang terintegrasi dalam SIMPEG, kebijakan pengadaan ASN yang semakin tertata, penyusunan talent pool untuk JPT, JA, dan JF, serta implementasi e-performance yang terintegrasi dengan sistem penghargaan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum optimalnya implementasi manajemen talenta di seluruh perangkat daerah, pelaksanaan coaching dan mentoring yang belum merata, pemetaan talent pool yang sebagian masih manual, serta perlunya penguatan integrasi sistem informasi dan perlindungan pegawai.

Selanjutnya memperhatikan peta kualitas merit sistem di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo berada pada peringkat 11 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kemudian jika melihat capaian Indeks Merit pada daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo, Magelang dan Purworejo berada di atas capaian Indeks Merit tahun 2024, sedangkan Temanggung, Kebumen, Banjarnegara, dan Batang berada di bawah. Berdasarkan rilis dari Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dari seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah baru terdapat 2 kota berpredikat “Sangat Baik” yaitu Kota Magelang dan Kota Pekalongan, serta masih terdapat 1 kabupaten berpredikat “Kurang” yaitu Kabupaten Rembang.

Tabel 2.3.8
Indeks Merit Tahun 2024 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Indeks Merit 2024	Predikat	No	Kabupaten/Kota	Indeks Merit 2024	Predikat
1	Kota Magelang	337,5	Sangat Baik	19	Tegal	271,5	Baik
2	Kota Pekalongan	327,0	Sangat Baik	20	Banjarnegara	270,5	Baik
3	Cilacap	320,0	Baik	21	Brebes	270,5	Baik
4	Wonogiri	312,5	Baik	22	Jepara	265,5	Baik
5	Kota Semarang	312,0	Baik	23	Klaten	265,5	Baik
6	Kota Surakarta	310,5	Baik	24	Kota Tegal	262,5	Baik
7	Sukoharjo	307,0	Baik	25	Pemalang	262,5	Baik
8	Purworejo	302,0	Baik	26	Pekalongan	262,0	Baik
9	Magelang	293,0	Baik	27	Blora	261,5	Baik
10	Banyumas	290,5	Baik	28	Semarang	260,0	Baik
11	Wonosobo	289,5	Baik	29	Temanggung	258,0	Baik
12	Sragen	282,5	Baik	30	Karanganyar	257,0	Baik
13	Demak	282,0	Baik	31	Purbalingga	257,0	Baik
14	Boyolali	278,5	Baik	32	Kendal	255,0	Baik
15	Pati	276,0	Baik	33	Kebumen	253,5	Baik
16	Batang	274,5	Baik	34	Kudus	250,5	Baik
17	Kota Salatiga	274,5	Baik	35	Rembang	222,5	Kurang
18	Grobogan	273,0	Baik				

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Untuk meningkatkan Indeks Merit menuju predikat “Sangat Baik”, diperlukan penguatan manajemen talenta berbasis sistem digital yang terintegrasi, optimalisasi coaching dan mentoring secara menyeluruh, pemanfaatan data kinerja sebagai dasar promosi dan mutasi jabatan secara konsisten, peningkatan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi, serta penguatan kebijakan perlindungan dan pelayanan ASN. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi manajemen ASN yang profesional, adaptif, dan berorientasi kinerja.

8) Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pelaku usaha, serta antarinstansi pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. SPBE bertujuan

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat integrasi sistem dan data pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem elektronik yang terintegrasi. Penyelenggaraan SPBE di Indonesia diatur melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari upaya transformasi digital pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Capaian kinerja pada sasaran strategis terwujudnya pemerintahan yang kapabel dengan indikator Indeks SPBE di Kabupaten Wonosobo menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2025, nilai Indeks SPBE mencapai 4,14 atau 109,23% dari target yang ditetapkan sebesar 3,79 dengan predikat "Sangat Baik", meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 3,79. Capaian tersebut nilai tersebut menggambarkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilaksanakan secara terintegrasi, efektif, dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 3,02, Indeks SPBE Tahun 2025 telah mencapai 137,09%.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks SPBE	2,32	2,96	3,54	3,79	4,14

Adapun perbandingan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten lain di provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja pada Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atas Indeks SPBE.

Tabel 2.3.9 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	PEMPROV JATENG	4,56	Memuaskan
2	KAB BANYUMAS	4,45	Memuaskan
3	KOTA SURAKARTA	4,41	Memuaskan
4	KOTA SEMARANG	4,27	Memuaskan
5	KAB KLATEN	4,22	Memuaskan
6	KAB WONOSOBO	4,14	Sangat Baik
7	KAB DEMAK	4,09	Sangat Baik
8	KAB KARANGANYAR	4,03	Sangat Baik
9	KAB MAGELANG	4,02	Sangat Baik
10	KAB SEMARANG	3,91	Sangat Baik

11	KOTA PEKALONGAN	3,84	Sangat Baik
12	KAB TEMANGGUNG	3,8	Sangat Baik
13	KAB JEPARA	3,75	Sangat Baik
14	KAB BREBES	3,29	Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil capaian atas, dapat dilihat bahwa indeks SPBE Kabupaten Wonosobo masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian indeks SPBE pada Provinsi Jawa Tengah. Nilai Indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 4,56 dengan kategori 'Memuaskan'. Jika dibandingkan, nilai Kabupaten Wonosobo (4,14) masih berada di bawah nilai provinsi. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat integrasi dan tata kelola SPBE di tingkat provinsi secara agregat lebih komprehensif, namun selisih nilai relatif tidak terlalu besar. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat lima entitas dengan kategori 'Memuaskan' yaitu: Provinsi Jawa Tengah (4,56), Kabupaten Banyumas (4,45), Kota Surakarta (4,41), Kota Semarang (4,27), dan Kabupaten Klaten (4,22). Dengan nilai 4,14, Kabupaten Wonosobo berada pada posisi ke-6 secara keseluruhan dari daftar kabupaten/kota yang dibandingkan, serta berada di atas sebagian besar kabupaten lainnya yang memiliki nilai di bawah 4,10.

Peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Wonosobo didukung oleh penguatan kebijakan internal SPBE, perbaikan tata kelola melalui reviu arsitektur dan peta rencana SPBE, optimalisasi pemanfaatan pusat data dan jaringan intranet pemerintah, serta integrasi layanan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Selain itu, peningkatan juga ditunjang oleh pengelolaan manajemen SPBE yang semakin baik serta perluasan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik, seperti aplikasi SIPD, SIMPEG, LPSE, SriKandi, e-SKP, serta berbagai layanan publik digital seperti Laporan Bupati, Satu Data, JDIH, PPDB online, dan layanan perizinan online.

Sementara itu belum tercapainya nilai maksimal disebabkan karena belum optimalnya integrasi seluruh aplikasi pemerintah antar perangkat daerah. Meskipun berbagai layanan telah berbasis digital, dalam praktiknya masih terdapat beberapa sistem aplikasi yang berjalan secara parsial atau belum sepenuhnya terhubung dalam satu arsitektur SPBE yang terintegrasi. Selain itu di Kabupaten Wonosobo juga masih terkendala keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi pada sebagian perangkat daerah. Tidak semua unit kerja memiliki tenaga teknis yang memadai untuk mengelola, mengembangkan, maupun memelihara sistem aplikasi secara optimal.

Meskipun telah mencapai predikat sangat baik, upaya peningkatan berkelanjutan tetap diperlukan, terutama pada penguatan manajemen data, peningkatan kapasitas SDM TIK, penguatan keamanan informasi, optimalisasi manajemen

layanan SPBE, serta pengembangan portal layanan publik terpadu guna mendukung transformasi digital pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.

9) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik oleh badan publik dalam menyediakan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penilaian ini dilakukan melalui evaluasi terhadap berbagai aspek, seperti ketersediaan dan pengelolaan informasi publik, pelayanan permohonan informasi, pengelolaan dokumentasi informasi, serta pemanfaatan media dan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Hasil penilaian biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks atau kategori tertentu yang mencerminkan tingkat keterbukaan badan publik, mulai dari kategori kurang informatif hingga informatif, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Komisi Informasi sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Nilai keterbukaan informasi publik (IKIP) diukur dengan skala 0–100 yang dibagi menjadi beberapa kategori. Nilai IKIP dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga publik. Kategori nilai IKIP Buruk sekali: 0–39, Buruk: 40–59, Sedang: 60–79, Baik: 80–89, Baik sekali: 90–100. Predikat IKIP Informatif: 90–100, Menuju informatif: 80–89,9, Cukup informatif: 60–79,9, Kurang informatif: 40–59,9, Tidak informatif: < 39,9.

Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2025 adalah 98,28, apabila dibandingkan dengan target sebesar 97,65 maka persentase capaian terhadap target terealisasi sebesar 100,65%. Nilai 98,28 menunjukkan bahwa badan publik telah mampu menyediakan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat secara terbuka, cepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perbandingan realisasi dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar 97,61 maka terdapat kenaikan capaian sebesar 0,69%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 95, maka Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 telah mencapai 103,45%.

Adapun rincian realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat pada gambar berikut berikut:



Gambar 2.3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Wonosobo pada periode tahun 2025 dibandingkan dengan capaian Kinerja Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kabupaten Lain di Provinsi Jawa Tengah 2025

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	Kabupaten Sukoharjo	99,45	INFORMATIF
2	Kabupaten Wonosobo	98,36	INFORMATIF
3	Kota Semarang	97,74	INFORMATIF
4	Kabupaten Kendal	97,28	INFORMATIF
5	Kota Surakarta	96,55	INFORMATIF
6	Kabupaten Purbalingga	94,92	INFORMATIF
7	Kota Salatiga	94,78	INFORMATIF
8	Kabupaten Kebumen	93,64	INFORMATIF
9	Kota Magelang	93,49	INFORMATIF
10	Kabupaten Rembang	93,43	INFORMATIF
11	Kota Pekalongan	93,18	INFORMATIF
12	Kota Tegal	92,81	INFORMATIF
13	Kabupaten Cilacap	92,64	INFORMATIF
14	Kabupaten Demak	92,61	INFORMATIF
15	Kabupaten Wonogiri	92,13	INFORMATIF
16	Kabupaten Tegal	91,59	INFORMATIF
17	Kabupaten Karanganyar	91,57	INFORMATIF
18	Kabupaten Semarang	91,38	INFORMATIF
19	Kabupaten Temanggung	91,34	INFORMATIF

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
20	Kabupaten Klaten	90,51	INFORMATIF
21	Kabupaten Jepara	90,45	INFORMATIF
22	Kabupaten Brebes	90,09	INFORMATIF
23	Kabupaten Pati	89,83	MENUJU INFORMATIF
24	Kabupaten Kudus	89,67	MENUJU INFORMATIF
25	Kabupaten Banyumas	88,39	MENUJU INFORMATIF
26	Kabupaten Grobogan	88,25	MENUJU INFORMATIF
27	Kabupaten Blora	87,91	MENUJU INFORMATIF
28	Kabupaten Pemalang	87,58	MENUJU INFORMATIF
29	Kabupaten Purworejo	85,13	MENUJU INFORMATIF
30	Kabupaten Sragen	84,72	MENUJU INFORMATIF
31	Kabupaten Magelang	84,15	MENUJU INFORMATIF
32	Kabupaten Pekalongan	83,95	MENUJU INFORMATIF

Berdasarkan hasil capaian atas nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Wonosobo dapat dilihat bahwa nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Wonosobo lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian nilai Keterbukaan Informasi Publik kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Posisi Kabupaten Wonosobo hanya berada dibawah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan serta perbaikan kualitas pada beberapa aspek sehingga nilai tingkat kematangan menjadi bertambah.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Wonosobo berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif untuk yang ketiga kalinya Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Kabupaten Wonosobo juga mencatatkan prestasi gemilang dengan menjadi Kabupaten/Kota Terbaik ke-Dua di Jawa Tengah.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Wonosobo dalam meraih predikat Badan Publik "Informatif" serta menempati peringkat ke-2 Kabupaten/Kota terbaik se-Jawa Tengah pada tahun 2025 dalam Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah merupakan hasil dari penguatan tata kelola keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas layanan komunikasi publik. Pencapaian tersebut didukung oleh strategi memulai seluruh tahapan evaluasi lebih awal seperti penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal sebelum uji publik; peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh rekomendasi perbaikan; serta penguatan sinergi antar PPID Pelaksana dalam percepatan tindak lanjut permohonan informasi.

Keberhasilan ini juga ditopang oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik yang semakin efektif, terlihat dari peningkatan kualitas pengelolaan website dan media sosial perangkat daerah dengan rata-rata nilai keterbukaan informasi yang meningkat dari 86,80 pada tahun 2024 menjadi 93,70 pada tahun 2025, meningkatnya jumlah pemohon informasi publik melalui portal Sobopedia dari 81 menjadi 184 pemohon, serta meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat melalui Portal Lapor Bupati dari 613 aduan pada tahun 2024 menjadi 1.061 aduan pada tahun 2025 dengan tingkat tindak lanjut mencapai 100% dan waktu respons yang semakin cepat. Selain itu, jangkauan diseminasi informasi publik juga meningkat signifikan dengan jumlah pengunjung website pemerintah daerah yang naik dari 83.883 menjadi 187.514 kunjungan, yang menunjukkan meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan informasi pemerintah daerah.

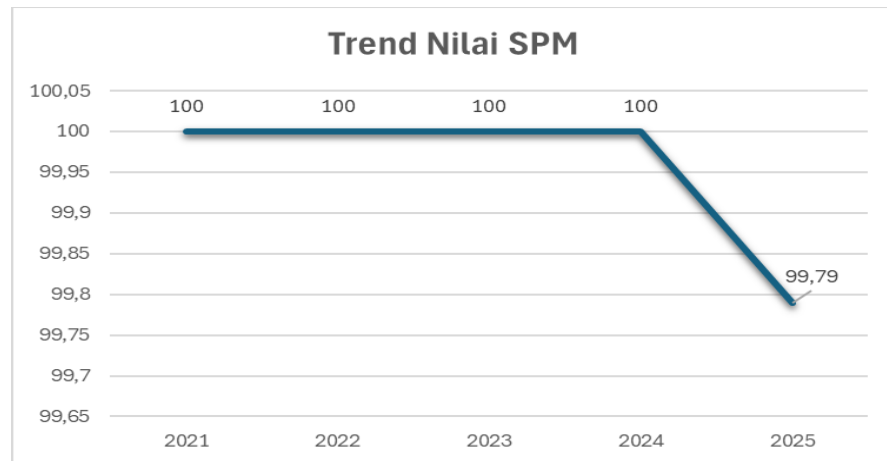
Selanjutnya untuk meningkatkan capaian Keterbukaan Informasi Publik ke depannya perlu diterapkan beberapa strategi antara lain 1). Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemutakhiran data informasi publik secara berkala, sehingga informasi yang tersedia selalu relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat, 2) Memperkuat kapasitas PPID di seluruh perangkat daerah, baik melalui pelatihan pengelolaan informasi publik, penguatan pemahaman terhadap regulasi keterbukaan informasi, maupun peningkatan kemampuan pengelolaan media informasi digital, 3) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan integrasi sistem informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi publik secara lebih cepat dan transparan melalui satu platform yang terintegrasi, serta 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan informasi publik.

10) Nilai Ketercapaian SPM Layanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Penerapan SPM menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam menjamin tersedianya pelayanan dasar pada urusan wajib, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Capaian penerapan SPM layanan dasar di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 mencapai 99,79%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator layanan dasar telah terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, capaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang telah mencapai 100%, sehingga terdapat gap sebesar 0,21% terhadap target maksimal. Persentase realisasi Tahun 2025 terhadap target sebesar

99,79%, sementara itu capaian realisasi atas target akhir RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 99,79%. Berikut merupakan nilai ketercapaian SPM Layanan Dasar dari Tahun 2021 sampai dengan 2025:



Gambar 2.3.8

Trend Nilai SPM Kabupaten Wonosobo 2021-2025

Capaian SPM selama 5 Tahun terakhir telah mencapai 100% namun di tahun 2025 menurun menjadi 99,79%. Meskipun menurun capaian SPM Tahun 2025 telah jauh lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 68,76 atau kategori tuntas muda. Selanjutnya, selisih capaian di Tahun 2025 tersebut pada dasarnya menunjukkan masih terdapat sebagian kecil indikator layanan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi, baik dari sisi jangkauan penerima layanan maupun pemenuhan standar mutu pelayanan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh dinamika perubahan jumlah sasaran layanan, keterbatasan akses layanan pada wilayah tertentu, serta kendala teknis dalam pemenuhan indikator maupun pelaporan kinerja layanan dasar. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian 99,79% masih menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo mampu mempertahankan tingkat pemenuhan pelayanan dasar pada kategori sangat tinggi dan mendekati target maksimal. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional yang berada pada angka 68,76 persen, kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo menunjukkan hasil yang jauh lebih tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar di Kabupaten Wonosobo telah berjalan dengan baik dan berada di atas rata-rata nasional.

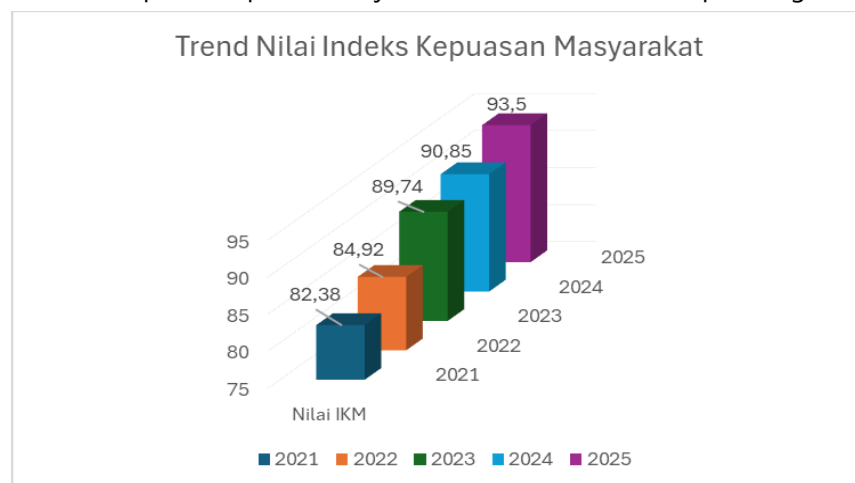
Selanjutnya, untuk meningkatkan capaian SPM agar mencapai 100% perlu dilakukan beberapa hal, yakni: 1) Mengupayakan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis SPM, 2) Melakukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah terutama timeline waktu pelaporan, 3) Melakukan pemutakhiran dan validasi data sasaran layanan secara berkala serta pengumpulan data yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa layanan benar-benar menjangkau

masyarakat yang membutuhkan, 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyelenggara layanan dasar melalui peningkatan kompetensi ASN serta 5) Menyusun dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM untuk memantau perkembangan capaian indikator secara lebih akurat.

11) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. IKM diperoleh melalui survei kepada pengguna layanan dengan menilai berbagai unsur pelayanan, seperti persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, kompetensi dan perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Hasil pengukuran IKM menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik dan menjadi bahan evaluasi bagi instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Pelaksanaan survei ini mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Realisasi capaian kinerja IKM Tahun 2025 sebesar 93,5 dari target 91,82. Capaian sebesar 93,5 menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat sebagai pengguna layanan merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan pemerintah. Persentase realisasi Tahun 2025 terhadap target sebesar 101,83%, nilai IKM Tahun 2025 juga meningkat sebesar 2,92% dibandingkan dengan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar 90,85, sementara itu capaian realisasi atas target akhir RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 110,65%. Berikut merupakan capaian kinerja IKM dari Tahun 2021 sampai dengan 2025.



Gambar 2.3.9
Trend Nilai IKM Kabupaten Wonosobo 2021-2025

Tren Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Wonosobo menunjukkan peningkatan yang konsisten, yang menggambarkan adanya upaya berkelanjutan dari berbagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Capaian tersebut patut diapresiasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang semakin responsif, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan aplikasi SKM Wonosobo sebagai media pengumpulan data survei secara digital juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data survei secara lebih sistematis. Namun demikian, dalam perspektif metodologis tren peningkatan nilai IKM tersebut perlu dipahami secara kontekstual terutama berkaitan dengan tingkat coverage survei dan representativitas sampel responden. Pada beberapa OPP, jumlah responden yang berpartisipasi dalam survei belum proporsional jika dibandingkan dengan jumlah pengguna layanan yang memperoleh produk layanan selama periode pengukuran SKM. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias responden (response bias) sehingga nilai IKM yang relatif tinggi belum menggambarkan tingkat keterwakilan persepsi pengguna layanan secara komprehensif.

Keterbatasan representativitas data tersebut juga memiliki implikasi terhadap pemanfaatan hasil SKM sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy), khususnya dalam proses analisis hasil survei dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh masing-masing OPP. Idealnya, hasil SKM digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja layanan yang mampu memetakan kebutuhan, pengalaman, dan ekspektasi pengguna layanan untuk kemudian diterjemahkan dalam prioritas perencanaan serta penganggaran peningkatan kualitas layanan. Namun demikian, tingkat partisipasi responden belum mencerminkan populasi pengguna layanan secara memadai, sehingga analisis yang dihasilkan belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi pelayanan publik secara komprehensif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pengumpulan data SKM terutama melalui pendekatan berbasis data pengguna layanan sebagai kerangka sampling menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas representasi data survei, memperkuat validitas analisis kebijakan, serta memastikan bahwa SKM berfungsi secara optimal sebagai mekanisme partisipasi resiprokal antara pemerintah dan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

12) Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian pada PDRB

Laju pertumbuhan sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat perubahan atau peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian dalam suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya. Indikator ini menggambarkan kinerja dan dinamika perkembangan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian, yang meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, serta perikanan. Laju pertumbuhan sektor pertanian dihitung berdasarkan perubahan nilai PDRB sektor pertanian pada harga konstan sehingga mencerminkan pertumbuhan riil tanpa dipengaruhi oleh faktor inflasi. Data dan pengukuran PDRB sektor pertanian umumnya disusun dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai dasar analisis perkembangan ekonomi daerah dan penyusunan kebijakan pembangunan sektor pertanian.

Laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebesar 4,29. Laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB sebesar 4,29% menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian dalam perekonomian daerah mengalami peningkatan sebesar 4,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan mengalami perkembangan yang positif. Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan Tahun 2025 yaitu sebesar 5,22 dengan persentase capaian 82,18%, Laju pertumbuhan sektor pertanian Tahun 2025 juga menurun sebesar 17,66% dibandingkan dengan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar 5,21. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 2,00-4,00, Laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB Tahun 2025 telah mencapai 3.406%. Berikut merupakan data perkembangan capaian kinerja Laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB Wonosobo Tahun 2021-2025:



Gambar 2.3.10

Laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Wonosobo 2021-2025

Dari data perbandingan tersebut di atas, Laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Wonosobo pada tahun berjalan tercatat sebesar 4,29 persen, menurun dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 5,21 persen. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,06 di Tahun 2025, capaian Kabupaten Wonosobo telah lebih tinggi dibandingkan Laju Pertumbuhan sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah.

Penurunan capaian kinerja di Tahun 2025 menunjukkan adanya perlambatan kinerja sektor pertanian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi cuaca yang kurang mendukung, fluktuasi harga komoditas pertanian, serta keterbatasan penerapan teknologi dan mekanisasi dalam kegiatan produksi. Meskipun demikian, sektor pertanian masih didukung oleh potensi sumber daya alam yang memadai, komoditas hortikultura unggulan daerah, serta dukungan program pemerintah melalui penyediaan sarana produksi dan kegiatan penyuluhan pertanian.

Selanjutnya, untuk mendorong peningkatan pertumbuhan sektor pertanian ke depan, diperlukan upaya strategis melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih optimal, serta penguatan akses pasar dan pengembangan nilai tambah produk pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.

13) Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB

Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada PDRB merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan industri pengolahan dalam suatu daerah dari tahun ke tahun. Sektor ini mencakup kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang memiliki nilai tambah ekonomi.

Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada PDRB Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,37 persen, melebihi target tahunan sebesar 3,50 persen sehingga persentase realisasi mencapai 153,43 persen. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada PDRB sebesar 5,37% menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah mengalami peningkatan sebesar 5,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan bahwa aktivitas produksi dan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi mengalami perkembangan yang cukup baik. Selain itu, capaian ini juga melampaui target akhir RPJMD yang sebesar 107,40 persen, menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,42 persen. Tren realisasi indikator ini

menunjukkan fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2025, dengan nilai capaian berturut-turut sebesar 4,72 (2021), 2,16 (2022), 4,68 (2023), 1,42 (2024), dan 5,37 (2025), menggambarkan dinamika pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Wonosobo yang mampu bangkit dan menunjukkan kinerja positif pada tahun terakhir. Berikut merupakan perkembangan capaian/realisasi Indikator Laju Pertumbuhan dari Tahun 2021-2025:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	4,72	2,16	4,68	1,42	5,37

Capaian selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, namun meningkat signifikan di tahun 2025. Capaian Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB Kabupaten Wonosobo di Tahun 2025 sama dengan capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni di angka 5,37%.

Peningkatan signifikan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong, antara lain meningkatnya aktivitas industri kecil dan menengah, khususnya industri pengolahan hasil pertanian lokal, meningkatnya permintaan pasar terhadap produk olahan, serta adanya dukungan dari program pemerintah daerah dalam bentuk fasilitas produksi, pelatihan, dan pendampingan usaha industri. Selain itu, keberadaan bahan baku lokal yang melimpah dan adanya penguatan jaringan pemasaran dan distribusi turut mendorong pertumbuhan sektor ini.

Meski capaian sangat positif, beberapa faktor penghambat masih perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan teknologi dan mesin produksi modern, akses permodalan yang masih terbatas bagi pelaku usaha, fluktuasi harga bahan baku dan produk olahan, serta persaingan dengan produk industri dari luar daerah. Faktor-faktor tersebut berpotensi membatasi pertumbuhan industri pengolahan jika tidak ditangani secara strategis.

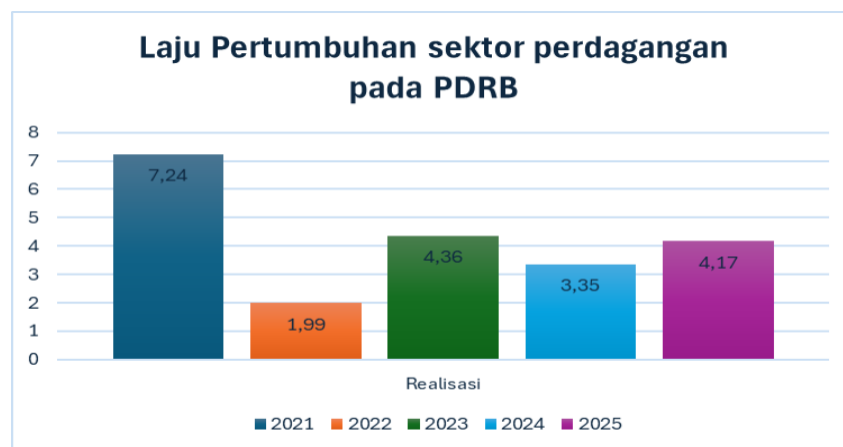
Untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan ke depan, beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan meliputi 1) Peningkatan kapasitas dan modernisasi sarana produksi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna; 2). Pengembangan industri berbasis komoditas unggulan lokal dan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah; 3). Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha industri kecil dan menengah, termasuk akses

permodalan melalui kemitraan atau lembaga keuangan; serta 4) Penguatan akses pasar dan promosi produk lokal baik di tingkat regional maupun nasional. Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan sektor industri pengolahan Kabupaten Wonosobo dapat terus tumbuh, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

14) Laju Pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB

Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan pada PDRB adalah tingkat persentase perubahan nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan perdagangan dalam suatu daerah dari tahun ke tahun. Nilai tambah ini mencakup aktivitas jual-beli barang dan jasa baik secara grosir, eceran, maupun perdagangan antar daerah yang termasuk dalam lapangan usaha perdagangan besar, perdagangan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta perdagangan jasa.

Laju pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,17 persen, melebihi target tahunan sebesar 3,40 persen, sehingga persentase realisasi mencapai 166,80 persen. Pencapaian ini juga melampaui target akhir RPJMD yang sebesar 104,25 persen, menunjukkan kinerja sektor perdagangan yang cukup tinggi dan melebihi ekspektasi perencanaan. Laju pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB sebesar 4,17% menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan baik perdagangan besar maupun eceran mengalami peningkatan sebesar 4,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menggambarkan bahwa kegiatan distribusi barang dan jasa dalam perekonomian daerah berkembang secara positif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini meningkat signifikan sebesar 24,84 persen dari capaian tahun 2024 yang tercatat 3,35 persen, menunjukkan adanya tren positif pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Wonosobo dalam beberapa tahun terakhir. Berikut merupakan data capaian indikator Laju pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2025:



Gambar 2.3.11

Laju pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB Kabupaten Wonosobo 2021-2025

Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2025 didorong oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya daya beli masyarakat, ekspansi usaha perdagangan baik skala kecil maupun menengah, serta peningkatan aktivitas distribusi dan perdagangan modern di berbagai pusat perbelanjaan dan pasar tradisional. Selain itu, dukungan pemerintah daerah dalam bentuk fasilitas dan regulasi yang kondusif, termasuk program pembinaan UMKM dan kemudahan perizinan usaha, turut mendorong pertumbuhan sektor perdagangan.

Meski demikian, beberapa faktor penghambat masih perlu diperhatikan, seperti fluktuasi harga kebutuhan pokok, persaingan dengan produk dari luar daerah, keterbatasan infrastruktur perdagangan di beberapa wilayah, serta akses permodalan bagi pelaku usaha skala mikro dan menengah yang masih terbatas.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan ke depan, beberapa strategi dapat dilakukan, antara lain: penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan manajemen dan pemasaran, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, peningkatan akses pasar bagi produk lokal, serta perluasan kerja sama dengan sektor distribusi dan e-commerce. Dengan strategi-strategi tersebut, sektor perdagangan di Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat terus tumbuh, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

15) Rata-rata Pengeluaran Belanja (*Spending of money*) Wisatawan

Rata-rata Pengeluaran Belanja (*Spending of Money*) Wisatawan adalah rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh seorang wisatawan selama melakukan kunjungan wisata di suatu daerah dalam periode tertentu. Pengeluaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan selama berwisata, seperti biaya transportasi lokal, akomodasi, konsumsi makanan dan minuman, tiket masuk objek wisata, pembelian cendera mata, serta pengeluaran lain yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan besarnya kontribusi ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas wisatawan terhadap perekonomian daerah, sehingga semakin tinggi rata-rata pengeluaran wisatawan maka semakin besar pula dampak ekonomi yang diberikan bagi sektor pariwisata dan sektor pendukung lainnya.

Rata-rata pengeluaran belanja (*spending of money*) wisatawan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1.000.000 per kunjungan, namun realisasi yang dicapai sebesar Rp629.325, sehingga persentase kinerja terhadap target tahunan mencapai 62,93 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan di Kabupaten Wonosobo masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Demikian pula jika dibandingkan dengan target akhir

RPJMD, realisasi indikator ini baru mencapai 62,93 persen, sehingga masih diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan nilai pengeluaran wisatawan selama berkunjung ke daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata di Kabupaten Wonosobo masih didominasi oleh wisatawan dengan pola kunjungan singkat (short trip) atau wisata harian, sehingga pengeluaran yang dikeluarkan wisatawan relatif terbatas dan lebih banyak difokuskan pada kebutuhan dasar seperti transportasi, konsumsi, dan tiket masuk objek wisata. Selain itu, sebagian besar wisatawan masih memilih alternatif akomodasi dan konsumsi dengan biaya yang relatif terjangkau, sehingga rata-rata pengeluaran wisatawan belum mencapai nilai yang diharapkan. Realisasi kinerja dari tahun 2021-2025 cukup fluktuatif sebagaimana data di bawah ini:



Gambar 2.3.12

Rata-rata Pengeluaran Belanja (*Spending of money*) Wisatawan Kabupaten Wonosobo 2021-2025

Rata-rata Pengeluaran Belanja di Kabupaten Wonosobo selama 3 Tahun terakhir cenderung menurun. Faktor penghambat yang memengaruhi rendahnya capaian indikator tersebut, antara lain terbatasnya variasi paket wisata yang mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan, keterbatasan fasilitas dan amenitas wisata, serta belum optimalnya pengembangan produk wisata bernilai tambah yang dapat mendorong peningkatan pengeluaran wisatawan.

Beberapa faktor pendorong yang mendukung peningkatan pengeluaran wisatawan antara lain daya tarik destinasi wisata alam yang cukup populer, meningkatnya kunjungan wisatawan domestik, serta berkembangnya usaha ekonomi kreatif dan UMKM di sekitar kawasan wisata yang menyediakan berbagai produk kuliner dan souvenir khas daerah. Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi rendahnya capaian indikator tersebut, antara lain terbatasnya variasi paket wisata yang mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan, keterbatasan fasilitas dan amenitas wisata, serta belum

optimalnya pengembangan produk wisata bernilai tambah yang dapat mendorong peningkatan pengeluaran wisatawan.

Untuk meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan ke depan, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain melalui pengembangan paket wisata terintegrasi yang dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan, peningkatan kualitas amenities seperti akomodasi, kuliner, dan fasilitas pendukung pariwisata, serta penguatan promosi produk ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Selain itu, pengembangan event pariwisata dan atraksi budaya juga dapat menjadi daya tarik tambahan yang mendorong wisatawan untuk berbelanja dan memanfaatkan lebih banyak layanan selama berada di Kabupaten Wonosobo, sehingga nilai pengeluaran wisatawan dapat meningkat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

16) Realisasi Investasi Daerah

Nilai investasi daerah adalah total nilai penanaman modal yang masuk dan direalisasikan di suatu wilayah dalam periode tertentu, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai investasi ini mencerminkan besarnya modal yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti pembangunan fasilitas produksi, pembelian peralatan, pengembangan usaha, serta kegiatan ekonomi lainnya yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator nilai investasi daerah digunakan untuk menggambarkan tingkat daya tarik dan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi suatu daerah serta kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi investasi Daerah Tahun 2025 berada pada angka Rp. 915.170.451.276, capaian tersebut melebihi target yaitu Rp. 733.900.000.000 sehingga persentase ketercapaian atas target sebesar 124,69%. Capaian Tahun 2025 meningkat sebesar 24,69% dibandingkan capaian 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 733.842.610.095. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 3,9 Triliyun maka capaian terhadap target RPJMD sebesar 236,72% Berikut merupakan data perbandingan realiasi Tahun 2023-2025:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi dalam (Rupiah)		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Realisasi investasi daerah	814.982.531.940	733.842.610.095	915.170.451.276

Capaian nilai investasi Kabupaten Wonosobo berada pada peringkat ke-32 untuk tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Posisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi daerah masih perlu terus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan daerah lainnya. Pada peringkat di bawah Kabupaten Wonosobo terdapat Kabupaten Purworejo, yang kemudian diikuti oleh Kota Magelang.

Realisasi investasi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 berhasil mencapai target Renstra, yang didorong oleh beberapa faktor pendorong, antara lain kemudahan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS, kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan melalui LKPM, serta tersedianya berbagai bentuk investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk usaha mikro dan kecil. Dukungan pemerintah melalui regulasi dasar dan fasilitasi investasi juga mendorong pelaku usaha untuk menanamkan modal dan menjalankan operasional produksi dengan lebih cepat.

Meski capaian investasi tinggi, sejumlah faktor penghambat masih perlu diperhatikan, seperti kondisi ekonomi makro yang kurang stabil, iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif akibat regulasi dan birokrasi, persaingan antar daerah, keterbatasan sumber daya manusia terampil, kesulitan pengadaan lahan, rendahnya jumlah pelaku usaha menengah besar, serta masih kurang optimalnya pelaporan LKPM dan sosialisasi insentif investasi. Untuk meningkatkan realisasi investasi lebih lanjut, strategi yang dapat dilakukan meliputi penyederhanaan regulasi dan perizinan, peningkatan sosialisasi kebijakan insentif, penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan, penyediaan akses lahan dan modal yang lebih mudah, serta alokasi anggaran promosi investasi yang memadai guna menarik lebih banyak investor dan mendorong pertumbuhan investasi berkelanjutan.

17) Persentase Usaha Mikro Naik Kelas

Persentase Usaha Mikro Naik Kelas adalah persentase usaha mikro yang berhasil berkembang menjadi usaha kecil atau meningkat kapasitas usahanya dalam periode tertentu, yang mencerminkan keberhasilan program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro untuk meningkatkan skala, omzet, dan daya saing usaha. Dalam konteks ini, "naik kelas" berarti peningkatan skala usaha dari kategori usaha mikro ke kategori usaha yang lebih besar, Usaha mikro dapat naik kelas apabila usaha dengan omzet tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar atau aset lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta.

Pada tahun 2025, persentase usaha mikro yang naik kelas di Kabupaten Wonosobo mencapai 0,012 persen, atau sebesar 57,14 persen dari target tahunan sebesar 0,021 persen. Capaian ini masih tergolong rendah dan jauh di bawah target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 0,6 persen, dengan persentase realisasi terhadap

target akhir RPJMD hanya mencapai 2,00 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan skala dan kapasitas usaha mikro masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu mendapat perhatian lebih serius agar kontribusi usaha mikro naik kelas dapat meningkat secara signifikan di masa mendatang. Berikut merupakan capaian persentase usaha mikro naik kelas Kabupaten Wonosobo dari Tahun 2021-2025:



Gambar 2.3.13

Persentase Usaha Mikro Naik Kelas Kabupaten Wonosobo 2021-2025

Persentase usaha mikro naik kelas di Kabupaten Wonosobo yang masih rendah. Jika persentase usaha mikro naik kelas di Kabupaten Wonosobo hanya tercapai 0,012%, maka capaian tersebut dapat dikategorikan sangat rendah dibandingkan potensi jumlah usaha mikro yang ada. Secara nasional sendiri, proporsi usaha mikro yang berhasil naik kelas masih sekitar 3,06%. Capaian tersebut menggambarkan sebagian besar pelaku usaha mikro masih berada pada skala usaha yang sangat kecil, informal, dan belum berkembang menjadi usaha kecil yang lebih produktif.

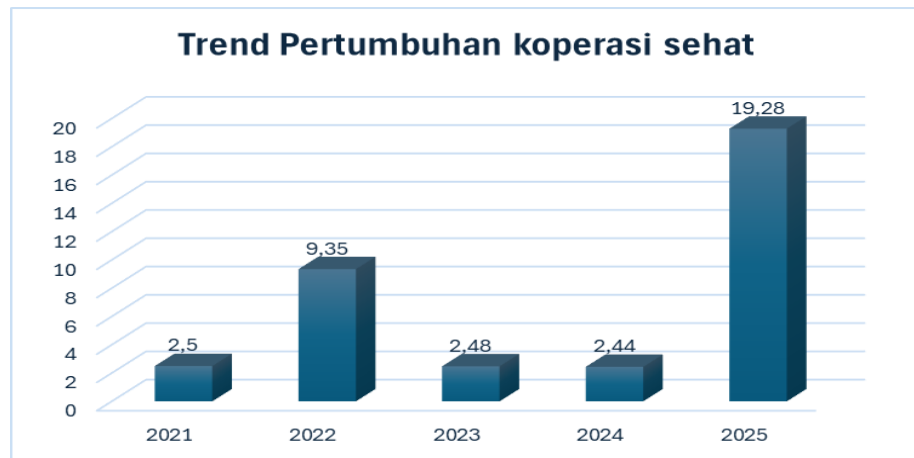
Rendahnya capaian tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti 1). Masih banyak usaha mikro yang belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, atau izin usaha lainnya, 2) Adanya kesulitan dalam akses permodalan seperti alat produksi, kapasitas produksi maupun pengembangan kemasan dan branding, 3) Manajemen usaha masih menggunakan cara tradisional dan berbasis kekeluargaan tanpa memperhatikan pencatatan keuangan yang rapi, strategi pemasaran maupun inovasi produk, 4) Hambatan dalam memperluas akses pasar, 4) Rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi terutama yang berdomisili di daerah pedesaan.

Diperlukan penanganan khusus atas kinerja kenaikan kelas usaha mikro dengan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada, antara lain: 1). Memperkuat program pendampingan usaha secara intensif dan berkelanjutan agar pelaku

usaha mikro tidak hanya memperoleh pelatihan secara teoritis tetapi juga mendapatkan bimbingan praktis dalam pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, peningkatan kualitas produk, serta strategi pemasaran, 2) Percepatan legalisasi usaha mikro perlu terus didorong melalui fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi produk seperti PIRT, halal, maupun pendaftaran merek dagang, 3) Memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui fasilitasi kemitraan dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan nonbank, maupun program pembiayaan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat, 4) Pembentukan kluster usaha berbasis potensi unggulan daerah sesuai dengan karakteristik Kabupaten Wonosobo seperti hortikultura, olahan pangan dan sektor pariwisata serta 5) Melakukan transformasi digital dan memperkuat penyebaran informasi agar pelaku usaha dapat memanfaatkan platform digital dalam kegiatan pemasaran, transaksi, maupun promosi produk.

18) Pertumbuhan koperasi sehat

Pertumbuhan koperasi sehat adalah peningkatan jumlah koperasi yang menjalankan prinsip tata kelola yang baik, memiliki kinerja keuangan yang stabil, serta mampu memberikan manfaat dan layanan optimal kepada anggotanya dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan kualitas dan keberlanjutan perkembangan koperasi di suatu wilayah. Pada tahun 2025, pertumbuhan koperasi sehat di Kabupaten Wonosobo mencapai 19,28 persen, jauh melampaui target tahunan sebesar 2,45 persen dengan capaian sebesar 786,9 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran 2,44 hingga 9,35 persen. Capaian tersebut juga jauh melampaui target akhir RPJMD sebesar 2,33 persen, dengan persentase realisasi terhadap target akhir RPJMD mencapai 827,47 persen, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola, kinerja, dan keberlanjutan koperasi di Kabupaten Wonosobo, yang berkontribusi positif pada pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan anggota koperasi. Berikut merupakan trend capaian indikator pertumbuhan koperasi sehat dari Tahun 2021-2025:



Gambar 2.3.14

Pertumbuhan koperasi sehat Kabupaten Wonosobo 2021-2025

Laju pertumbuhan koperasi sehat di Kabupaten Wonosobo selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan meningkat secara signifikan di tahun 2025. Pertumbuhan koperasi sehat yang sangat tinggi di Kabupaten Wonosobo didorong oleh faktor-faktor seperti peningkatan kesadaran anggota koperasi akan pentingnya tata kelola yang baik, dukungan pelatihan dan pendampingan dari pemerintah daerah, serta implementasi manajemen koperasi yang profesional dan transparan. Selain itu, meningkatnya akses permodalan dan pemanfaatan teknologi informasi juga turut memperkuat kinerja koperasi.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan koperasi, rendahnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, serta tantangan dalam mengembangkan produk dan layanan koperasi agar lebih kompetitif di pasar. Selain itu, masih ada koperasi yang mengalami kendala dalam adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan koperasi sehat, strategi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kapasitas SDM pengelola dan anggota melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan mekanisme tata kelola dan transparansi, diversifikasi produk dan layanan koperasi sesuai kebutuhan pasar, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Dukungan kebijakan dan fasilitasi dari pemerintah daerah juga sangat penting untuk mendorong koperasi berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi anggotanya.

19) Pertumbuhan strata BUMDes

Pertumbuhan strata BUMDes adalah indikator yang menggambarkan peningkatan tingkat perkembangan atau klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari strata yang lebih rendah ke strata yang lebih tinggi dalam periode tertentu.

Klasifikasi strata BUMDes umumnya didasarkan pada beberapa aspek seperti kinerja usaha, tata kelola kelembagaan, kapasitas manajemen, aset usaha, serta kontribusi terhadap perekonomian desa. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pembinaan dan pengembangan BUMDes dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa serta memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat desa. Capaian angka pertumbuhan strata BUMDes Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2025 tercatat sebesar 23, melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 17,98, sehingga persentase realisasi capaian mencapai 127,92 persen. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang terealisasi sebesar 17,91, maka terjadi peningkatan sebesar 27,99 persen. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang sebesar 16,67, capaian tahun 2025 telah mencapai 137,97 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja pengembangan dan peningkatan kapasitas BUMDes di Kabupaten Wonosobo berjalan dengan sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berikut merupakan capaian kinerja pertumbuhan strata Bumdes dari tahun 2021-2025:



Gambar 2.3.15

Pertumbuhan strata BUMDes Kabupaten Wonosobo 2021-2025

Kondisi tersebut mencerminkan semakin berkembangnya peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa di Kabupaten Wonosobo, baik dalam pengelolaan unit usaha, peningkatan tata kelola kelembagaan, maupun kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat desa. Peningkatan strata BUMDes ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah, penguatan kapasitas pengelola BUMDes melalui pelatihan dan fasilitasi usaha, serta semakin berkembangnya unit usaha BUMDes yang berbasis potensi lokal seperti sektor perdagangan, jasa, dan pengelolaan potensi wisata desa.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes, belum optimalnya manajemen usaha dan tata kelola kelembagaan pada sebagian BUMDes, serta keterbatasan akses permodalan dan jaringan pemasaran yang dapat mendukung pengembangan unit usaha BUMDes secara lebih luas.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut ke depan, diperlukan beberapa alternatif strategi, antara lain melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan manajemen BUMDes, peningkatan kompetensi pengelola melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, pengembangan unit usaha yang berbasis potensi unggulan desa, serta perluasan akses kerja sama dan kemitraan usaha dengan berbagai pihak. Selain itu, dukungan kebijakan dan fasilitasi dari pemerintah daerah juga perlu terus diperkuat agar BUMDes di Kabupaten Wonosobo dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

20) Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat 40 persen pendapatan terendah

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat 40 persen pendapatan terendah adalah rata-rata jumlah pengeluaran yang dikeluarkan setiap individu dalam satu bulan pada kelompok masyarakat yang termasuk dalam 40 persen dengan tingkat pendapatan terendah dalam suatu wilayah. Pengeluaran tersebut mencakup kebutuhan konsumsi rumah tangga seperti makanan, minuman, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta menjadi salah satu ukuran dalam memantau kondisi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di suatu daerah. Realisasi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat pada kelompok 40 persen pendapatan terendah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 tercatat sebesar Rp568.683, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp496.900, sehingga persentase realisasi terhadap target mencapai 114,45 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang sebesar Rp496.875, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,45 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar Rp401.392, capaian Tahun 2025 telah mencapai 141,68 persen, yang menandakan bahwa indikator ini telah melampaui target yang direncanakan. Secara umum, perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat pada kelompok 40 persen pendapatan terendah di Kabupaten Wonosobo dalam

beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat, yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat 40 persen pendapatan terendah di Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2025:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat 40 persen pendapatan terendah	Rp. 394.619	Rp. 459.976	Rp. 522.415	Rp. 496.875	Rp. 568.683

Peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat pada kelompok 40 persen pendapatan terendah di Kabupaten Wonosobo didorong oleh meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro, serta adanya dukungan berbagai program pemerintah berupa bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang turut meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti fluktuasi harga kebutuhan pokok, keterbatasan akses permodalan dan kesempatan kerja, serta ketergantungan sebagian masyarakat pada sektor pertanian yang rentan terhadap kondisi cuaca. Oleh karena itu, diperlukan strategi melalui penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses permodalan dan pengembangan usaha mikro, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar pendapatan dan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

21) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Pengangguran terbuka mencakup penduduk usia kerja yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi

ketenagakerjaan serta tingkat penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian suatu daerah. Capaian realisasi TPT Tahun 2025 sebesar 3,99 dari target 3,50, yang berarti bahwa persentase realisasi Tahun 2025 atas target sebesar 86%. Sementara itu persentase realisasi atas target akhir RPJMD sebesar 86%. Tingkat pengangguran terbuka Wonosobo dari Tahun 2021 sampai dengan 2025 cenderung terus mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan analisa positif, artinya tingkat pengangguran terus menurun selama 4 tahun terakhir. Berikut merupakan perkembangan capaian TPT Kabupaten Wonosobo:



Gambar 2.3.16

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo 2021-2025

Selanjutnya, berdasarkan data BPS Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo tercatat memiliki TPT sebesar 3,99 persen. Angka ini berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 4,66 persen, sehingga menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Wonosobo relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah sekitar, tingkat pengangguran di Kabupaten Wonosobo juga tergolong cukup rendah dan stabil, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah yang memiliki TPT sangat rendah seperti Kabupaten Wonogiri, Temanggung, dan Boyolali. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Wonosobo berjalan cukup baik, meskipun tetap diperlukan upaya peningkatan kesempatan kerja dan penguatan sektor ekonomi produktif untuk menekan angka pengangguran secara berkelanjutan. Berikut merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen) Tahun 2025:

Tabel 2.3.11

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen) Tahun 2025

No.	Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen)
1	3300 PROVINSI JAWA TENGAH	4.66
2	3301 Kabupaten Cilacap	7.4
3	3302 Kabupaten Banyumas	6.26
4	3303 Kabupaten Purbalingga	4.83
5	3304 Kabupaten Banjarnegara	5.39
6	3305 Kabupaten Kebumen	4.95
7	3306 Kabupaten Purworejo	3.72
8	3307 Kabupaten Wonosobo	3.99
9	3308 Kabupaten Magelang	3.52
10	3309 Kabupaten Boyolali	2.97
11	3310 Kabupaten Klaten	3.88
12	3311 Kabupaten Sukoharjo	4.32
13	3312 Kabupaten Wonogiri	2.16
14	3313 Kabupaten Karanganyar	3.26
15	3314 Kabupaten Sragen	3.49
16	3315 Kabupaten Grobogan	3.12
17	3316 Kabupaten Blora	3.61
18	3317 Kabupaten Rembang	2.9
19	3318 Kabupaten Pati	3.71
20	3319 Kabupaten Kudus	3.23
21	3320 Kabupaten Jepara	3.3
22	3321 Kabupaten Demak	4.58
23	3322 Kabupaten Semarang	3.63
24	3323 Kabupaten Temanggung	2.31
25	3324 Kabupaten Kendal	4.6
26	3325 Kabupaten Batang	5.07
27	3326 Kabupaten Pekalongan	3.24
28	3327 Kabupaten Pemalang	6.61
29	3328 Kabupaten Tegal	7.61
30	3329 Kabupaten Brebes	8.07
31	3371 Kota Magelang	4.31
32	3372 Kota Surakarta	4.5
33	3373 Kota Salatiga	3.67
34	3374 Kota Semarang	5.65

No.	Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen)
35	3375 Kota Pekalongan	4.83
36	3376 Kota Tegal	5.82

Penurunan TPT di Kabupaten Wonosobo masih terbatas karena keterbatasan lapangan kerja formal, rendahnya keterampilan sebagian angkatan kerja, serta ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian musiman. Di sisi lain, terdapat faktor pendorong, yaitu penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, berkembangnya UMKM, serta dukungan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menurunkan angka pengangguran lebih lanjut, strategi yang dapat dilakukan meliputi pengembangan sektor ekonomi produktif, peningkatan kualitas pelatihan dan keterampilan kerja, dorongan investasi, serta pemberdayaan UMKM melalui akses permodalan dan perluasan pasar.

22) Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah ukuran kuantitatif yang dihitung berdasarkan gabungan beberapa variabel pendidikan utama, seperti rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, dan tingkat melek huruf, yang digunakan untuk menilai kualitas dan capaian pendidikan di suatu wilayah secara sistematis dan terukur. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memantau perkembangan pendidikan dan mendukung perencanaan kebijakan pendidikan yang efektif.

Pada tahun 2025, Indeks Pendidikan Kabupaten Wonosobo mencapai angka 10,34, mendekati target tahunan sebesar 10,69 dengan capaian sebesar 96,73 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan yang stabil dibandingkan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran 10,16 hingga 10,53. Capaian tersebut juga hampir memenuhi target akhir RPJMD sebesar 10,69, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ini mencerminkan upaya yang konsisten dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan, yang berdampak positif pada perkembangan sumber daya manusia di Kabupaten Wonosobo. Berikut merupakan data perkembangan Indeks Pendidikan Wonosobo Tahun 2021-2025:



Gambar 2.3.17
Indeks Pendidikan Kabupaten Wonosobo 2021-2025

Secara umum, capaian Indeks Pendidikan diperoleh dari 4 (empat) indikator kinerja turunan dengan capaian kinerja masing-masing sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) Harapan lama sekolah adalah salah satu indikator penting dalam dunia pendidikan yang mencerminkan rata-rata tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh seseorang dalam mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah, semakin baik pula akses dan kesempatan belajar yang dimiliki oleh masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2025, capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo menunjukkan progres yang sangat positif dengan angka 12,05 tahun. Capaian ini berhasil memenuhi target tahunan 12,05 dengan tingkat ketercapaian 100,00% (Kategori Sangat Tinggi).

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 11,81 tahun, terdapat peningkatan signifikan sebesar 0,24 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan di Kabupaten Wonosobo semakin membaik dan selaras dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Terhadap Target Akhir Renstra (12,1 tahun), capaian tahun 2025 telah berada pada posisi 99,59%, yang berarti target jangka menengah hampir terpenuhi sepenuhnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang semakin merata serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan sekolah bagi anak usia dini hingga menengah.

2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk usia tertentu dalam menempuh pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga jenjang yang lebih tinggi. Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan sistem pendidikan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin baik pula kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Namun, berbagai faktor seperti aksesibilitas, kondisi ekonomi, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi tantangan dalam meningkatkan angka ini, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang.

Pada tahun 2025, realisasi RLS Kabupaten Wonosobo berada pada angka 6,91 tahun. Angka ini menunjukkan peningkatan tipis dibandingkan tahun 2024 (6,89 tahun), namun masih berada di bawah Target PK tahun 2025 sebesar 7,75 tahun dengan tingkat ketercapaian 89,16%.

Rendahnya tingkat ketercapaian ini disebabkan oleh tantangan demografis, di mana indikator RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas yang mayoritas sudah tidak berada dalam usia sekolah formal. Terhadap Target Akhir Renstra (7,87 tahun), capaian saat ini baru mencapai 87,80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk secara rata-rata baru menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SMP. Meskipun terdapat peningkatan setiap tahunnya, akselerasi RLS memerlukan intervensi khusus pada pendidikan kesetaraan bagi orang dewasa (Pendidikan Non-Formal) untuk mendorong peningkatan angka literasi dan lama sekolah pada populasi dewasa.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam menilai tingkat akses pendidikan di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan persentase anak usia sekolah yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu, yaitu jenjang SD untuk usia 7-12 tahun. Tingginya angka partisipasi sekolah mencerminkan keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan akses pendidikan yang merata serta mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia

sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Pada tahun 2025, realisasi APS usia 7-12 tahun mencapai 99,64%. Jika dibandingkan dengan Target PK tahun 2025 sebesar 99,8%, maka tingkat ketercapaian kinerja berada pada angka 99,84% (Kategori Sangat Tinggi).

Meskipun terdapat penurunan tipis dibandingkan tahun 2024 (99,89%), angka ini tetap menunjukkan konsistensi yang luar biasa dalam pelayanan pendidikan dasar. Terhadap Target Akhir Renstra (100%), capaian tahun 2025 berada pada posisi 99,64%. Tingginya partisipasi pada jenjang ini didukung oleh sebaran Sekolah Dasar yang telah menjangkau seluruh desa di Kabupaten Wonosobo serta program bantuan operasional yang meminimalisir hambatan biaya bagi siswa kurang mampu.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun

APS usia 13-15 tahun menunjukkan partisipasi siswa pada jenjang SMP atau sederajat. Pada tahun 2025, realisasi APS usia 13-15 tahun tercatat sebesar 90,08%. Capaian ini masih berada di bawah Target PK tahun 2025 sebesar 97,6% dengan tingkat ketercapaian 92,30%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 (92,68%), indikator ini mengalami penurunan sebesar 2,6 poin. Hal ini menjadi catatan penting dalam kinerja tahun 2025, di mana tantangan ekonomi pasca-pandemi dan faktor sosial seperti pernikahan dini atau kecenderungan bekerja di usia muda masih menjadi penghambat pada jenjang menengah pertama. Terhadap Target Akhir Renstra (98,15%), capaian saat ini baru berada pada posisi 91,78%. Upaya percepatan melalui penyisiran Anak Tidak Sekolah (ATS) dan optimalisasi program beasiswa/bantuan pendidikan menjadi prioritas utama untuk mengejar ketertinggalan target di tahun mendatang.

Capaian Indeks Pendidikan Tahun 2025 tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta berbagai program bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, keberadaan lembaga pendidikan yang cukup tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Wonosobo serta dukungan program pemerintah seperti bantuan operasional sekolah dan program beasiswa turut membantu meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat. Namun di sisi lain Kabupaten Wonosobo masih menghadapi beberapa permasalahan seperti kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang didominasi wilayah pegunungan menyebabkan akses menuju beberapa satuan pendidikan menjadi relatif lebih sulit bagi

masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi karena faktor ekonomi sehingga anak usia sekolah terkadang lebih memilih untuk bekerja membantu keluarga.

Untuk meningkatkan capaian Indeks Pendidikan diperlukan beberapa strategi atau upaya perbaikan melalui penguatan pendidikan secara berkelanjutan, salah satunya melalui perluasan akses pendidikan terutama di wilayah yang sulit dijangkau dengan memperkuat layanan pendidikan menengah serta penyediaan fasilitas pendukung bagi siswa dari daerah terpencil. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sarpras pendidikan dan pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu perlu terus diperkuat agar tidak terjadi putus sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

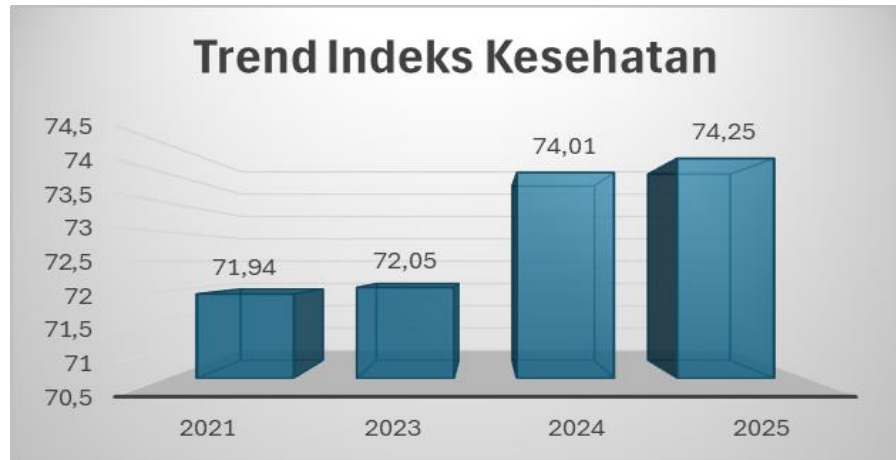
23) Indeks Kesehatan

Indikator Indeks Kesehatan merupakan salah satu indikator kinerja pada sasaran strategis yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Nilai indeks ini dihitung berdasarkan berbagai komponen yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat, termasuk status kesehatan, pelayanan kesehatan, serta faktor penunjang kesehatan lainnya.

Pada tahun 2025, target Indeks Kesehatan yang ditetapkan sebesar 74,27. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai adalah sebesar 74,56, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,39% dari target yang telah ditetapkan. Dengan capaian tersebut, indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Angka 74,56 mencerminkan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, membaiknya akses layanan kesehatan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai Indeks Kesehatan pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 0,31 poin dari tahun 2024 yang tercatat sebesar 74,25, atau meningkat sekitar 0,42%. Tren peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Secara kumulatif, capaian ini juga telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 72,72, dengan tingkat capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 102,53%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Wonosobo berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berikut merupakan data Indeks Kesehatan dari Tahun 2021-2025:



Gambar 2.3.18

Indeks Kesehatan Kabupaten Wonosobo 2021-2025

Pencapaian ini didukung oleh berbagai program dan kegiatan di sektor kesehatan, seperti peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Namun di sisi lain, belum tercapainya Indeks Kesehatan secara maksimal masih dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang sebagian wilayahnya berada di daerah pegunungan menyebabkan akses masyarakat di wilayah terpencil terhadap layanan kesehatan masih menghadapi tantangan, permasalahan kesehatan masyarakat seperti stunting serta penyakit tidak menular.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu meningkatkan kualitas program kesehatan melalui pemanfaatan teknologi kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta penguatan sistem rujukan pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas serta memperkuat sinergi lintas sektor guna mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Kesehatan secara berkelanjutan.

24) Cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

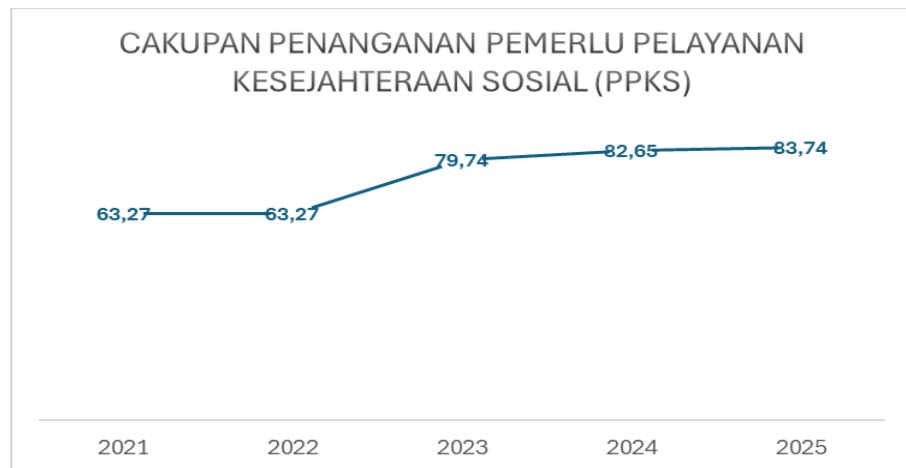
Indikator Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan dan penanganan kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Indikator ini mencerminkan efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial, pemberdayaan, serta rehabilitasi sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Pada tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 65,23%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai adalah

sebesar 83,74%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 128,38% dari target yang telah ditetapkan. Dengan capaian tersebut, indikator ini masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi indikator ini pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 1,09 poin dari tahun 2024 yang sebesar 82,65%, atau meningkat sekitar 1,32%. Tren peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya penanganan dan pelayanan kepada kelompok PPKS di Kabupaten Wonosobo.

Secara kumulatif, capaian pada tahun 2025 juga telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 65,22%, dengan tingkat capaian terhadap target akhir RPJMD mencapai 128,40%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial telah berjalan dengan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut merupakan data Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Tahun 2021-2025:



Gambar 2.3.19

**Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kabupaten Wonosobo 2021-2025**

Cakupan PPKS selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, antara lain melalui peningkatan pendataan dan verifikasi PPKS, penyaluran bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah desa, lembaga sosial, dan masyarakat. Selain itu juga didukung dengan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial melalui berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan bagi kelompok rentan seperti

penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, dan keluarga miskin serta peran tenaga kesejahteraan sosial yang turut serta membantu pelayanan.

Meskipun capaian sudah cukup baik, perlu menjadi perhatian beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya cakupan PPKS yakni dinamika jumlah PPKS yang terus berubah seiring dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga jumlah sasaran yang harus ditangani dapat terus bertambah. Untuk meningkatkan capaian, langkah strategis yang perlu dilakukan ke depan berupa memperkuat pemutakhiran dan integrasi data kesejahteraan sosial agar sasaran penerima layanan dapat diidentifikasi secara lebih akurat dan tepat serta meningkatkan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan pendamping sosial perlu dilakukan agar proses pendampingan dan pelayanan kepada kelompok rentan dapat berjalan lebih efektif.

25) Indeks Desa Membangun (IDM)

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan desa serta efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

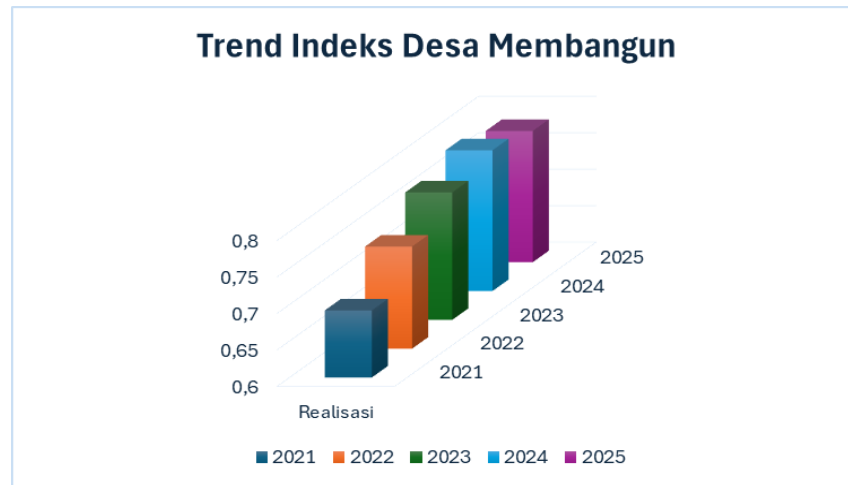
Pada tahun 2025, target nilai IDM yang ditetapkan adalah sebesar 0,725. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai sebesar 0,78, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 107,59% dari target yang telah ditetapkan. Dengan capaian tersebut, indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian di tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum desa-desa di Kabupaten Wonosobo telah berada pada kategori desa maju.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai IDM pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,013 poin dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 0,7930, atau menurun sekitar 1,64%. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2025 masih berada di atas target yang telah ditetapkan, sehingga secara keseluruhan kinerja indikator ini tetap menunjukkan hasil yang baik.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,721, realisasi IDM pada tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan tingkat capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 108,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan desa di Kabupaten Wonosobo secara umum telah berjalan dengan baik serta mampu mendorong peningkatan status perkembangan desa.

Pencapaian indikator ini didukung oleh berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain peningkatan akses pelayanan dasar, penguatan kelembagaan sosial masyarakat, pengembangan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan desa. Program-program tersebut dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas pembangunan desa secara berkelanjutan guna mempertahankan dan meningkatkan nilai IDM, sehingga desa-desa di Kabupaten Wonosobo dapat semakin mandiri, maju, dan sejahtera. Berikut merupakan data perkembangan IDM dari Tahun 2021-2025:



Gambar 2.3.20
Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kabupaten Wonosobo 2021-2025

Trend Indeks Desa Membangun selama 5 tahun terakhir terus meningkat. Namun masih tetap diperlukan upaya yang kuat untuk menangani beberapa permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya capaian IDM, yakni 1) Kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang didominasi wilayah pegunungan menyebabkan beberapa desa masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, 2) Kapasitas pengelolaan ekonomi desa di beberapa wilayah masih belum optimal sehingga potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi desa, 3) Terbatasnya pengembangan usaha ekonomi produktif di desa serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan potensi desa dan

terbatasnya kapasitas SDM yang mampu mengelola perencanaan dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Selanjutnya, untuk meningkatkan capaian IDM di Kabupaten Wonosobo, maka perlu diterapkan strategi-strategi berupa 1) Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pengembangan potensi ekonomi desa agar pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, 2) Mengembangkan usaha produktif masyarakat, penguatan kelembagaan BUMDes, serta pengembangan produk unggulan desa yang memiliki nilai tambah ekonomi dan menjadi ciri khas Kabupaten Wonosobo, 3) Meningkatkan konektivitas infrastruktur antarwilayah desa untuk memperlancar akses distribusi hasil produksi masyarakat serta mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi lokal serta 4) Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan berbagai potensi dan data di cakupan desa.

26) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah (IPG) adalah indikator komposit yang mengukur kesenjangan pencapaian pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) antara perempuan dan laki-laki. IPG mengevaluasi apakah perempuan menikmati hasil pembangunan yang sama dengan laki-laki, dengan nilai mendekati 100 menunjukkan kesetaraan yang lebih tinggi.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebesar 93,02 atau 100,06% dari target Tahun 2025. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024, sementara itu jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 92,96, capaian IPG Tahun 2025 atas target akhir RPJMD sudah tercapai 100,06%. Capaian Indeks Pembangunan Gender pada angka 93,02 menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan pembangunan antara perempuan dan laki-laki sudah cukup baik dan relatif mendekati setara. Untuk mengetahui perkembangan Indeks Pembangunan Gender, berikut merupakan capaian IPG di Kabupaten Wonosobo selama 5 Tahun terakhir:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Gender	92,83	92,83	92,95	92,95	93,02

Capaian IPG Kabupaten Wonosobo cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir dan telah melebihi target RPJMD periode 2021-2026. Capaian tersebut lebih tinggi

dibanding capaian Provinsi Jawa Tengah yang berada di angka 93,00 dan serta kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Tegal di angka 88,85. Namun demikian masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Temanggung yang sudah mencapai angka 96,19.

Peningkatan IPG di Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari 1). Komitmen kebijakan daerah yang mulai mengarah pada pengarusutamaan gender, terutama jika sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah serta pelaksanaan musrembang khusus wanita di Kabupaten Wonosobo. Ketika isu gender tidak berdiri sendiri tetapi melekat pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi, maka dampaknya lebih sistemik, 2) Akses pendidikan dasar yang relatif merata antara laki-laki dan perempuan, 3) Layanan kesehatan ibu dan anak yang semakin membaik melalui puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan desa.

Sementara itu, belum optimalnya capaian IPG mencapai nilai maksimal disebabkan antara lain karena 1). Partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih lebih rendah dibanding laki-laki, terutama di wilayah pedesaan, 2) perkawinan usia anak atau pendidikan yang terhenti di jenjang menengah. Ini berdampak langsung pada lama sekolah perempuan dan kualitas hidup jangka panjang, 3) Keterbatasan data terpilah gender yang akurat di tingkat perangkat daerah.

Selanjutnya untuk meningkatkan capaian IPG ke depannya, perlu dilakukan beberapa strategi antara lain 1) Memperkuat pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk memastikan setiap program strategis memiliki analisis dampak gender. Ini penting agar IPG tidak dipandang sebagai urusan sektoral, melainkan indikator kinerja pembangunan daerah serta 2) Memperkuat sistem data terpilah gender sebagai dasar perumusan kebijakan dan evaluasi kinerja, sehingga peningkatan IPG bisa terukur dan terintegrasi dengan peningkatan nilai SAKIP daerah.

27) Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah berdasarkan berbagai dimensi kehidupan strategis. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kondisi pembangunan pemuda di wilayah tersebut. IPP bukan hanya melihat jumlah pemuda, tetapi kualitas hidup, kapasitas, dan ruang aktualisasi mereka.

Indeks pembangunan pemuda Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 54,08 dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 54, artinya capaian kinerja telah tercapai 100,15% dari target akhir. Angka 54,08 menunjukkan bahwa berbagai aspek pembangunan pemuda seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi kepemimpinan, serta kesetaraan gender

sudah berjalan namun belum optimal. Berikut merupakan data realisasi IPP Kabupaten Wonosobo dari Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Indeks Pembangunan Pemuda	53,5	49,41	51,74	53,1	54,08

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Wonosobo cenderung terus naik dari tahun 2022-2025. Namun demikian masih perlu dilakukan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (74,77) dan juga kabupaten sekitar yakni Kabupaten Cilacap (74,00) dan Kabupaten Kudus (77,94).

Belum maksimalnya capaian Indeks Pembangunan Pemuda antara lain disebabkan adanya 1) Keterbatasan kerja formal pemuda dikarenakan struktur ekonomi Wonosobo masih didominasi sektor pertanian dan informal. Banyak pemuda bekerja sebagai pekerja keluarga, buruh tidak tetap atau mendorong pemuda merantau. Akibatnya, partisipasi kepemudaan dan kepemimpinan lokal menjadi lemah. 2) Akses pendidikan lanjutan dan vokasi yang belum optimal serta 3) Keterbatasan akses teknologi dan keterampilan digital menjadi hambatan daya saing pemuda, terutama di wilayah perdesaan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Pembangunan Pemuda, perlu segera dilaksanakan strategi yang melibatkan kolaborasi dari berbagai sektor, yakni 1) Penguatan kewirausahaan dan ekonomi kreatif pemuda seperti inkubasi bisnis berbasis potensi lokal Wonosobo (pertanian hortikultura, kopi, pariwisata Dieng, ekonomi kreatif) serta fasilitasi akses permodalan mikro, pendampingan bisnis, dan digital marketing, dan 3) Menciptakan ruang partisipasi pemuda dalam perencanaan pembangunan melalui keterlibatan organisasi kepemudaan dalam musrenbang, forum konsultasi publik, dan tim kreatif daerah agar dimensi partisipasi dan kepemimpinan meningkat secara substantif.

28) Tingkat kemantapan jalan

Tingkat kemantapan jalan adalah persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dibandingkan total panjang jalan yang menjadi kewenangan suatu pemerintah daerah dalam periode tertentu. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas infrastruktur jalan yang mendukung konektivitas, mobilitas orang dan barang, serta pertumbuhan ekonomi wilayah.

Tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebesar 65,93% atau tercapai 100,15% dari target Tahun 2025 dan target akhir RPJMD sebesar 65%. Berikut merupakan data realisasi kinerja kemantapan jalan Kabupaten Wonosobo dari Tahun 2021-2025:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Tingkat Kemantapan Jalan	58,82	65,18	64,14	65,93	65,43

Capaian tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Wonosobo cenderung fluktuatif selama 5 tahun ini. Jika dibandingkan dengan kemantapan jalan Provinsi Jawa Tengah dan daerah sekitar, capaian Kabupaten Wonosobo masih perlu ditingkatkan kembali. Untuk capaian Provinsi Jawa Tengah sendiri adalah 94,01% dan capaian daerah sekitar seperti Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang sudah berada di angka 80% dan 86,9%.

Meningkatnya kemantapan jalan di Kabupaten Wonosobo dapat dicapai oleh beberapa hal seperti: 1) Adanya komitmen penganggaran infrastruktur dalam APBD yang meningkat untuk infrastruktur jalan, 2) Dukungan program dari pemerintah pusat dan provinsi (DAK, bantuan keuangan provinsi), yang membantu percepatan peningkatan jalan kabupaten, 3) Sistem pemeliharaan rutin yang berjalan baik, karena jalan lebih murah dipertahankan dalam kondisi mantap daripada diperbaiki saat sudah rusak berat. Namun di sisi lain masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga capaian kemantapan jalan masih belum maksimal, diantaranya 1) Kondisi geografis pegunungan dan curah hujan tinggi yang mempercepat kerusakan jalan serta memicu longsor, serta 2) Keterbatasan fiskal daerah dibanding panjang jaringan jalan kabupaten yang harus dipelihara dikarenakan adanya efisiensi anggaran di Tahun 2025.

Untuk meningkatkan capaian kemantapan jalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, selanjutnya perlu dilakukan strategi seperti: 1) Memperkuat program pemeliharaan rutin dan berkala berbasis prioritas kerusakan dini (preventive maintenance), bukan menunggu rusak berat, 2) Memperkuat konstruksi jalan di wilayah rawan longsor dengan teknologi drainase, talud, dan penguatan lereng, 3) Melakukan optimalisasi sumber pembiayaan alternatif, seperti DAK, bantuan provinsi, atau skema kolaboratif dengan lembaga-lembaga terkait, serta 4) Mengintegrasikan peningkatan jalan dengan pengembangan kawasan ekonomi (pertanian, pariwisata Dieng) untuk memperkuat prioritas penganggaran.

29) Indeks Sanitasi

Indeks Sanitasi adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat akses dan kualitas layanan sanitasi suatu wilayah, meliputi akses jamban layak, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, serta praktik higiene masyarakat. Di Kabupaten Wonosobo, indeks sanitasi sangat dipengaruhi kondisi geografis pegunungan, kepadatan permukiman desa, serta perilaku masyarakat terkait sanitasi dan pengelolaan sampah.

Capaian kinerja Indeks Sanitasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebesar 58,50 dari target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 77,08 atau tercapai 75,90% dari target. Namun demikian realisasi kinerja Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan realiasi Tahun 2024. Indeks Sanitasi berada di angka 58,5 menggambarkan bahwa sebagian masyarakat sudah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak seperti jamban sehat, pengelolaan air limbah rumah tangga, serta perilaku hidup bersih dan sehat namun cakupannya belum merata dan masih terdapat rumah tangga yang menggunakan sanitasi tidak layak atau praktik buang air besar sembarangan. Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Indeks Sanitasi Tahun 2021-2025:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Indeks Sanitasi	45,83	40	45,5	54,5	58,5

Indeks Sanitasi Kabupaten Wonosobo cenderung naik selama 5 tahun terakhir, namun belum mencapai angka maksimal.

Selanjutnya, adapun kenaikan capaian Indeks Sanitasi tidak terlepas dari beberapa faktor seperti 1) Komitmen dan peningkatan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan penghapusan praktik BABS (buang air besar sembarangan), 2) Dukungan pembiayaan dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan program pusat untuk pembangunan jamban sehat, septic tank komunal, serta TPS3R, serta 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak sanitasi terhadap stunting dan kesehatan keluarga. Namun di sisi belum tercapainya Indeks Sanitasi secara maksimal meskipun lingkungan di Pemerintah Kabupaten Wonosobo kaya akan air bersih adalah 1) Kondisi geografis berbukit dan tanah labil yang menyulitkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat, 2) Keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian masyarakat untuk membangun jamban dan septic tank standar dan belum optimalnya sistem pengelolaan sampah terutama di pedesaan, serta 3) Belum maksimalnya kolaborasi dan integrasi antar stakeholder terkait.

Untuk meningkatkan capaian Indeks Sanitasi maka perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan antara lain 1) Memperluas program STBM berbasis pendampingan intensif, bukan hanya pembangunan fisik, 2) Melakukan penguatan sistem pengelolaan sampah desa melalui TPS3R, bank sampah, dan ekonomi sirkular berbasis komunitas, 3) Edukasi berkelanjutan melalui sekolah, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat untuk memastikan perubahan perilaku jangka panjang serta 4). Mendorong skema pembiayaan kolaboratif (APBD, dana desa, CSR, dan swadaya masyarakat) untuk percepatan akses jamban layak dan septic tank.

30) Indeks layanan air minum

Indeks Layanan Air Minum adalah ukuran yang menggambarkan tingkat cakupan, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan air minum kepada masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini umumnya melihat persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak dan aman, baik melalui jaringan perpipaan (PDAM) maupun non-perpipaan terlindungi, sesuai standar nasional yang ditetapkan pemerintah.

Realisasi kinerja Indeks Layanan Air minum Tahun 2025 mencapai 84,62 dari target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 91. Persentase realisasi kinerja atas target Tahun 2025 sebesar 92,99%. Indeks Layanan Air Minum berada di angka 84,62 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memperoleh akses terhadap sumber air minum yang layak dan aman baik melalui jaringan perpipaan maupun sumber air terlindungi lainnya, sehingga kebutuhan dasar air minum relatif telah terpenuhi. Berdasarkan tabel perkembangan kinerja Indeks layanan air minum di bawah, dapat diketahui terjadi penurunan kinerja dibandingkan Tahun 2023. Berikut merupakan data capaian kinerja Indeks Layanan Air Minum Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2025:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks layanan air minum	86	82	87,74	83,17	84,62

Indeks Layanan Air Minum di Kabupaten Wonosobo selama 5 Tahun cenderung fluktuatif, namun capaian di Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan capaian Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan instansi pemerintah daerah sekitar, Indeks Layanan Air Minum Kabupaten Wonosobo telah lebih tinggi dari Kabupaten

Banyumas sebesar 79,51, namun masih di bawah capaian Kabupaten Batang sebesar 96,46 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 95,73.

Meskipun Kabupaten Wonosobo memiliki akses air pegunungan yang melimpah namun belum maksimalnya capaian Indeks Layanan Air Minum dapat disebabkan antara lain 1). Kabupaten Wonosobo didominasi wilayah pegunungan dan perbukitan dengan permukiman tersebar. Kondisi ini membuat pembangunan jaringan perpipaan menjadi mahal dan teknisnya kompleks (tekanan air, kebutuhan pompa, reservoir bertingkat). Wilayah terpencil cenderung tertinggal cakupan layanannya, 2) Kemampuan produksi dan perluasan jaringan BUMD air minum belum tentu sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat, 3) Masih adanya akses non-perpipaan yang belum memenuhi standar aman. Sebagian masyarakat menggunakan sumur gali, mata air terbuka, atau sumber air lain yang secara kuantitas tersedia, tetapi kualitasnya belum memenuhi standar kesehatan, serta 4). Degradasi dan perlindungan sumber air akibat alih fungsi lahan, aktivitas pertanian di hulu, serta perubahan iklim dapat memengaruhi debit dan kualitas mata air.

Selanjutnya berdasarkan faktor penghambat tersebut, maka perlu dilakukan beberapa strategi antara lain: 1) Memperluas akses di kantong wilayah yang belum terlayani. Di Wonosobo, permukiman tersebar dan berada di kontur berbukit, sehingga perlu kombinasi sistem perpipaan PDAM di wilayah padat dan sistem berbasis masyarakat (PAMSIMAS atau gravitasi desa) di wilayah terpencil. Prioritas intervensi sebaiknya berbasis peta desa dengan cakupan terendah, 2) Melakukan perlindungan sumber mata air. Mengingat Wonosobo berada di wilayah hulu dan pegunungan, konservasi daerah tangkapan air sangat krusial. Rehabilitasi hutan, pengendalian alih fungsi lahan, serta kerja sama dengan desa di sekitar sumber air harus menjadi bagian strategi layanan air minum, bukan hanya urusan lingkungan hidup, serta 3) Meningkatkan kualitas menuju standar “air minum aman”. Bukan hanya akses fisik, tetapi juga uji kualitas berkala dan edukasi pengolahan air rumah tangga. Integrasi dengan program kesehatan dan percepatan penurunan stunting bisa memperkuat legitimasi penganggaran.

31) Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat fungsi dan efektivitas suatu sistem irigasi, meliputi kondisi fisik jaringan (bendung, saluran, pintu air), ketersediaan dan keandalan air, operasi dan pemeliharaan, kelembagaan, serta dukungan manajemen dan pendanaan.

Capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 65,44 dari target 69,8 yang berarti persentase realisasi atas target akhir RPJMD tercapai 93,75%. Capaian tersebut menunjukkan kondisi bahwa sistem irigasi sudah berfungsi namun distribusi air belum merata serta perlu penguatan kelembagaan petani pemakai air. Namun demikian capaian

Tahun 2025 sudah lebih tinggi dibandingkan capaian Tahun 2024. Adapun perbandingan capaian kinerja Indeks Kinerja Sistem Irigasi selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	62,75	62,75	65,79	64,71	65,44

Capaian IKSI di Tahun 2025 jauh lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang berada di angka 24,65 serta lebih tinggi dari daerah sekitar seperti Kabupaten Pematang yang berada di angka 62,68.

Berfungsinya irigasi didorong oleh kondisi geografis Wonosobo dengan ketersediaan air alami yang relatif baik karena wilayah pegunungan dan hulu sungai serta adanya dominasi sektor pertanian yang membuat irigasi menjadi prioritas pembangunan. Namun disini lain belum optimalnya capaian IKSI juga dipengaruhi oleh kondisi geografis dengan curah hujan tinggi yang mempercepat sedimentasi, longsor, dan kerusakan saluran serta keterbatasan anggaran operasi dan pemeliharaan (O&P), sehingga perawatan rutin kurang optimal.

Selanjutnya untuk mengatasi kendala dalam mencapai target kinerja, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu melakukan upaya 1). Melakukan rehabilitasi prioritas berbasis kondisi kritis, terutama pada bangunan utama dan saluran primer yang memengaruhi banyak lahan, 2). menormalisasi dan pengendalian sedimentasi secara berkala, terutama di wilayah rawan longsor, serta 3). Melakukan integrasi perencanaan irigasi dengan program ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas hortikultura khas Wonosobo, sehingga memiliki dukungan anggaran kuat dalam RPJMD.

32) Indeks Keselamatan Lalu Lintas

Indeks Keselamatan Lalu Lintas adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keamanan sistem transportasi jalan di suatu wilayah, yang mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi keselamatan pengguna jalan, seperti kecelakaan, kematian, cedera, dan potensi risiko lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas.

Realisasi kinerja Indeks Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2025 sebesar 100 dari target 75,15. Persentase realisasi kinerja Tahun 2025 atas target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 133,07%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pengelolaan keselamatan transportasi telah berjalan optimal serta mencerminkan keberhasilan

berbagai upaya pengendalian risiko kecelakaan, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Berikut merupakan perkembangan Indeks Keselamatan Lalu Lintas dari Tahun 2021-2025:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Indeks Keselamatan Lalu Lintas	64,23	67,6	69,65	92,8	100

Selama 5 (lima) tahun terakhir, capaian Indeks Keselamatan Lalu Lintas cenderung naik. Meningkatkan capaian tersebut tidak terlepas dari upaya penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah terkait pengelolaan keselamatan transportasi serta adanya upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Selain itu, pengendalian titik rawan kecelakaan serta peningkatan pengawasan lalu lintas juga berkontribusi dalam menjaga tingkat keselamatan pengguna jalan.

Namun dengan kondisi Kabupaten Wonosobo dengan geografis wilayah yang didominasi pegunungan, cuaca ekstrem dan peningkatan volume kendaraan pada titik-titik wisata masih memungkinkan adanya risiko keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu tetap perlu diterapkan strategi-strategi antara lain meningkatkan pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan secara berkelanjutan, penataan dan perbaikan titik rawan kecelakaan, peningkatan pengawasan serta penegakan hukum lalu lintas, penguatan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat serta pengintegrasian perencanaan transportasi dengan penataan ruang wilayah juga penting dilakukan guna memastikan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.

33) Persentase permukiman layak huni

Persentase Permukiman Layak Huni merupakan indikator yang menggambarkan proporsi kawasan permukiman yang telah memenuhi standar kelayakan hunian, baik dari aspek kualitas rumah, ketersediaan prasarana dan sarana dasar, serta lingkungan permukiman yang sehat dan aman.

Capaian kinerja di Tahun 2024 sebesar 96,47 dari target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 75,15. Persentase realisasi kinerja atas target sebesar 127,77%. Dengan capaian 96,47% di Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah tinggal di lingkungan permukiman yang memenuhi standar

kelayakan dasar. Berikut merupakan perkembangan capaian kinerja Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Persentase permukiman layak huni	69,5	69,5	87,36	99,44	96,47

Ketercapaian kinerja indikator Persentase Permukiman Layak Huni tidak lepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada penanganan kawasan kumuh dan RTLH. Penangan kumuh serta penanganan RTLH dengan jumlah yang banyak yaitu 1.332 unit rumah, selain itu pada pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian terdapat beberapa kegiatan yang lokus fokusnya tidak pada lokasi kumuh, sehingga pelaksanaannya tidak mengurangi luasan kawasan kumuh secara optimal.

Meskipun kinerja di indikator ini sudah tinggi namun masih perlu strategi untuk memaksimalkan kinerja kedepannya, yakni peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar untuk penyediaan air bersih, sanitasi sehat, akses mobilitas serta elektrifikasi.

34) Indeks Aksesibilitas Wilayah

Indeks Aksesibilitas Wilayah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemudahan suatu wilayah dalam mengakses pusat-pusat pelayanan, kegiatan ekonomi, serta jaringan transportasi yang menghubungkan antarwilayah. Indeks ini umumnya dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan, konektivitas antarwilayah, kemudahan transportasi, serta kedekatan masyarakat dengan pusat pelayanan publik dan kegiatan ekonomi. Semakin tinggi nilai indeks aksesibilitas wilayah, maka semakin baik pula tingkat keterhubungan wilayah tersebut dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa.

Realisasi kinerja di Tahun 2025 sebesar 0,95 dari target 1,26. Persentase realisasi kinerja atas target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 75,40%. Capaian 0,95 di Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah memiliki keterhubungan yang cukup memadai dengan pusat pelayanan dan jaringan transportasi utama. Capaian kinerja dari Tahun 2021-2025 cenderung stagnan namun menurun di tahun 2025, dijabarkan melalui tabel berikut:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Indeks Aksesibilitas Wilayah	1,08	1,08	1,08	1,08	0,95

Penurunan Indeks Aksesibilitas Wilayah di Kabupaten Wonosobo dari 1,08 pada tahun sebelumnya menjadi 0,95 menunjukkan adanya penurunan tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap pusat pelayanan, kegiatan ekonomi, maupun jaringan transportasi. Meskipun nilai tersebut masih tergolong baik, penurunan ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi konektivitas dan aksesibilitas wilayah, baik yang berasal dari kondisi infrastruktur, faktor geografis, maupun dinamika pembangunan wilayah. Faktor penghambat yang berpotensi menyebabkan penurunan indeks antara lain kondisi topografi wilayah yang didominasi daerah pegunungan sehingga mempersulit pengembangan jaringan jalan di beberapa wilayah, kerusakan atau penurunan kualitas infrastruktur jalan akibat cuaca maupun bencana alam seperti longsor, serta belum meratanya kualitas jaringan transportasi di beberapa wilayah pedesaan.

Adapun strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian Indeks Aksesibilitas Wilayah antara lain 1) Menyusun mitigasi dan penanganan kerusakan infrastruktur akibat bencana sebagai dasar prioritas pembangunan dan pengembangan akses jalan, 2) Melakukan pengintegrasian perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur dengan kolaborasi dari seluruh stakeholder yang terlibat serta 3) Melakukan penguatan sistem transportasi lokal seperti pengembangan transportasi pedesaan yang mendukung mobilitas masyarakat.

35) Rasio Konektivitas Wilayah

Rasio Konektivitas Wilayah adalah indikator yang menggambarkan tingkat keterhubungan antar pusat kegiatan (ibu kota kabupaten, kecamatan, kawasan produksi, kawasan wisata, dan pusat pelayanan dasar) melalui jaringan transportasi yang memadai. Rasio ini menunjukkan kondisi wilayah administratif sudah terhubung oleh jaringan jalan dan akses transportasi yang layak.

Realisasi kinerja Rasio Konektivitas Wilayah selama 5 Tahun kebelakang sudah tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kecamatan atau pusat kegiatan strategis sudah terhubung oleh jaringan jalan, tidak ada wilayah administratif yang terisolasi secara struktural serta tersedia akses dasar menuju pusat pelayanan

publik yang tersedia. Berikut merupakan perkembangan Ratio Konektivitas Wilayah Kabupaten Wonosobo selama 5 tahun terakhir:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Rasio Konektivitas Wilayah	100	100	100	100	100

Ketercapaian kinerja indikator Rasio Konektivitas Wilayah tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam memaksimalkan penyelenggaraan jalan untuk mencapai kemantapan jalan melalui 1) Kolaborasi pembangunan infrastruktur dari pusat dan provinsi, 2) Komitmen daerah dalam pembangunan infrastruktur dasar serta akses atas kebutuhan ekonomi seperti pertanian holtikultura dan pariwisata di wilayah Kabupaten Wonosobo. Namun demikian capaian tersebut tetap perlu memperhatikan tantangan yang melekat pada Kabupaten Wonosobo sebagai daerah dataran tinggi seperti jalan rawan longsor dan putus akibat cuaca ekstrem, kemacetan pada titik-titik pariwisata serta besaran biaya pemeliharaan yang besar karena kontur dan curah hujan.

Selanjutnya sebagai langkah preventif perlu dilakukan seperti 1) melakukan penguatan infrastruktur mitigasi longsor (talud, drainase, penguatan lereng) agar konektivitas tidak mudah terputus berkolaborasi dengan BPBD, 2) merumuskan pengembangan transportasi publik atau sistem angkutan pedesaan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat non-pemilik kendaraan, 3) membangun digitalisasi pemetaan jaringan jalan untuk monitoring kerusakan secara cepat dan tepat guna.

36) Indeks Penataan Ruang

Indeks Penataan ruang digunakan untuk mengukur seberapa baik penataan ruang di suatu daerah. Mencakup aspek perencanaan (RTRW/RDTR), pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengawasan dan penegakan aturan tata ruang.

Realisasi kinerja Indeks Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 20245 sebesar 84 (baik) dari target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 97,5, artinya persentase realisasi kinerja atas target sebesar 86,15%. Capaian tersebut menunjukkan kondisi bahwa dokumen RTRW telah selaras dengan kebijakan di atasnya, pemanfaatan ruang sudah cukup terkendali serta perizinan berbasis tata ruang sudah berjalan. Meskipun belum tercapai 100%, terdapat peningkatan

kinerja signifikan dibandingkan Tahun 2024. Berikut merupakan perkembangan Indeks Penataan Ruang Tahun 2021-2025:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Indeks Penataan Ruang	42,5	60	66,75	82,2	84

Capaian Indeks Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo cenderung meningkat positif selama 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Indeks Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebesar 63,08, capaian Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah lebih tinggi.

Capaian Indeks Penataan Ruang di Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari faktor meningkatnya integrasi tata ruang dengan sistem perizinan berbasis OSS serta meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan rencana pembangunan yang mulai memperhatikan kesesuaian tata ruang. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga capaian belum tercapai maksimal, seperti: 1) Adanya tekanan alih fungsi lahan pertanian dan kawasan lindung akibat kebutuhan perumahan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi, 2) Konflik kepentingan antara perlindungan kawasan resapan air dengan kebutuhan investasi, serta 3) Belum ditetapkannya kebijakan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya, untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Penataan Ruang perlu dilakukan beberapa strategi seperti 1) Percepatan penyusunan dan digitalisasi RDTR sebagai dasar kepastian investasi sekaligus pengendalian ruang dan penguatan pengawasan pemanfaatan ruang, termasuk sistem monitoring berbasis GIS dan citra satelit, 2) Melakukan pengendalian ketat terhadap alih fungsi lahan produktif dan kawasan lindung, terutama daerah tangkapan air dan lereng rawan longsor, 3) Melakukan integrasi tata ruang dengan kebijakan mitigasi bencana, mengingat karakter geografis Wonosobo yang rawan longsor serta 4) Melakukan evaluasi dan penguatan kebijakan tata ruang.

2.3.3 Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air digunakan untuk menggambarkan kualitas air berdasarkan berbagai parameter kimia, fisika, dan biologis. Indeks ini menunjukkan apakah kualitas air memenuhi baku mutu untuk peruntukan tertentu seperti air baku, perikanan, irigasi dan lain sebagainya.

Capaian kinerja Indeks Kualitas Air Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebesar 75,66 dari target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 51,17 hal ini berarti persentase

realisasi atas target 2025 sebesar 147,86%. Capaian tersebut menunjukkan kondisi air telah memenuhi baku mutu namun masih rentan pencemaran jika tidak dikendalikan. Berikut merupakan data perkembangan capaian Indeks Kualitas Air dari Tahun 2021-2025:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Indeks Kualitas Air	50,43	50,78	52,5	51,15	75,66

Capaian kinerja Indeks Kualitas Air cenderung meningkat selama 5 Tahun terakhir dan meningkat signifikan di Tahun 2025. Capaian Kabupaten Wonosobo lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 71,78 dan juga lebih tinggi dibandingkan capaian daerah sekitar seperti Kabupaten Batang sebesar 71,36 dan Kabupaten Purbalingga sebesar 57,22. Capaian Indeks Kualitas Air tidak terlepas dari faktor 1) Posisi geografis Kabupaten Wonosobo sebagai wilayah hulu dengan sumber mata air alami yang relatif banyak, 2) Tutupan vegetasi dan kawasan lindung yang masih cukup luas di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Watumalang, Kalibawang dll, serta 3) Kesadaran sebagian masyarakat terhadap perlindungan sumber air karena berkaitan langsung dengan kebutuhan irigasi dan air minum. Namun disisi lain belum maksimalnya capaian Indeks Kualitas Air disebabkan oleh beberapa faktor seperti, 1) Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pertanian sehingga limpasan pupuk dan pestisida dari pertanian hortikultura yang cukup intensif, 2) Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya tertangani, terutama di wilayah perdesaan dan urban serta adanya 3) Sedimentasi akibat erosi lahan miring dan longsor yang meningkatkan kekeruhan air.

Selanjutnya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Wonosobo berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi perlu dilakukan beberapa strategi seperti 1) Penguatan pengelolaan limbah domestik melalui pembangunan septic tank kedap, IPAL komunal, dan perluasan program sanitasi desa. Saat ini telah dilakukan pembentukan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, 2) Meningkatkan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) melalui penghijauan dan pengendalian erosi di lereng pertanian, 3) Melakukan integrasi kebijakan kualitas air dengan penataan ruang dan perlindungan kawasan lindung dan menguatkan pengendalian pencemaran dan rehabilitasi daerah aliran sungai melalui kolaborasi lintas sektor guna menjaga fungsi ekologis wilayah hulu dan meningkatkan kualitas air secara berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.

37) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah indikator yang menggambarkan tingkat kebersihan atau pencemaran udara di suatu wilayah berdasarkan konsentrasi parameter polutan utama.

Realisasi indikator kinerja Tahun 2025 sebesar 80,39, secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas udara tercapai 87,48% dari target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 91,9. Angka 80,39 menunjukkan kondisi bahwa udara sudah relatif bersih namun memiliki potensi risiko mendekati batas aman. Capaian tersebut menurun jika dibandingkan dengan realiasi Tahun 2024 yang mencapai 92,05.

Berikut merupakan data perkembangan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Wonosobo:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Indeks Kualitas Udara	88,64	86,3	88,6	92,05	80,39

Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Wonosobo cenderung fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Wonosobo lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dengan capaian 75 dan beberapa daerah sekitar seperti Kabupaten Pekalongan sebesar 71 dan Kabupaten Purworejo sebesar 63.

Adapun capaian di Tahun 2025 didukung oleh faktor bahwa Kabupaten Wonosobo belum berkembang menjadi kawasan industri besar yang dapat menghasilkan emisi tinggi serta masih luasnya tutupan vegetasi dan kawasan hutan sehingga terjadi penyerapan karbon alami. Namun disisi lain menurunnya Indeks Kualitas Udara di Tahun 2025 dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor, terutama pada jalur wisata seperti akses ke Dieng serta adanya aktivitas pertanian (pembukaan lahan) atau limbah pertanian.

Selanjutnya untuk meningkatkan capaian Indeks Kualitas Udara, perlu dilakukan beberapa hal berdasarkan kendala-kendala yang teridentifikasi seperti 1) Penguatan pengendalian emisi kendaraan melalui uji emisi berkala dan kampanye kendaraan ramah lingkungan serta monitoring kualitas udara secara rutin dan publikasi data sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, dan 2) Meningkatkan ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan sebagai carbon sink alami terutama di jalur-jalur wisata dan sekitar Dieng Plateu dan daerah pertanian kritis.

38) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah indikator yang menggambarkan kondisi dan proporsi tutupan lahan suatu wilayah, terutama terkait keberadaan hutan, vegetasi permanen, lahan terbuka, dan tingkat degradasinya. Indeks ini menunjukkan kondisi dan fungsi ekologis suatu wilayah.

Indeks tutupan lahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 tercapai 62,12 dari target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 57,55 atau terealisasi sebesar 107,94%. Angka 62,12 menunjukkan kondisi vegetasi sudah berfungsi namun terdapat indikasi adanya degradasi atau alih fungsi lahan yang perlu dikendalikan. Capaian realisasi 2025 menurun dibandingkan tahun 2024. Berikut merupakan capaian IKTL selama 2021-2025.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58,36	56,53	47,92	66,67	62,12

Berdasarkan capaian selama 5 Tahun, Indeks Kualitas Tutupan Lahan cenderung fluktuatif dengan capaian paling rendah di tahun 2023. Saat ini belum tersedia data Indeks Tutupan lahan daerah sekitar di tahun 2025, namun jika dibandingkan dengan capaian Indeks Tutupan Lahan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah 2024, capaian IKTL Kabupaten Wonosobo lebih tinggi di mana pada Tahun 2024 IKTL nasional sebesar 61,96 dan IKTL Provinsi Jawa Tengah sebesar 48,37.

Penurunan capaian IKTL Kabupaten Wonosobo di tahun 2025 tidak terlepas dari adanya alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian hortikultura terutama pada lereng curam di daerah pegunungan tanpa konversi tanah yang memadai, adanya erosi/longsor yang mengurangi vegetasi permanen serta belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang di lahan pertanian, pariwisata dan permukiman penduduk. Selanjutnya untuk meningkatkan capaian IKTL ke depannya perlu dilakukan beberapa langkah/strategi seperti 1). Penyusunan kebijakan rehabilitasi dan restorasi lahan pertanian terutama di daerah yang rawan seperti Dataran Tinggi Dieng dan aliran Sungai Serayu, 2) Percepatan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman kembali di lereng curam dan kawasan tangkapan air serta penguatan praktik pertanian konservasi, 3) Memanfaatkan IT melalui penggunaan data citra satelit dan GIS untuk monitoring perubahan tutupan lahan secara berkala.

39) Persentase sampah yang terkelola

Indikator persentase sampah yang terkelola adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sampah yang dihasilkan di suatu daerah dapat dikelola secara efektif, termasuk pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pembuangan yang aman.

Capaian realisasi indikator kinerja di Tahun 2025 adalah 51,43% atau tercapai 85,72% atas target akhir RPJMD sebesar 60%. Capaian di Tahun 2025 menunjukkan bahwa setengah lebih total timbunan sampah sudah tertangani melalui sistem resmi namun sisanya masih belum terkelola dengan optimal. Berikut merupakan capaian indikator persentase sampah terkelola dari tahun 2021-2025:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Persentase sampah yang terkelola	45,51	48,53	41,04	51	51,43

Persentase sampah terkelola di Kabupaten Wonosobo cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan capaian nasional (35%) pengelolaan sampah di Wonosobo jauh lebih baik. Namun jika dibandingkan dengan capaian daerah sekitar seperti Kabupaten Boyolali (61,04%) dan Kabupaten Klaten (52,64%) capaian persentase sampah terkelola di Kabupaten Wonosobo masih perlu ditingkatkan.

Adapun beberapa kendala yang mempengaruhi capaian kinerja persentase sampah terkelola adalah 1) Belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber, seperti rumah tangga ataupun industri serta 2) Keterbatasan armada, sarana TPS, dan kapasitas TPA. Selanjutnya, untuk mengatasi kendala tersebut perlu segera dilakukan beberapa strategi untuk pengelolaan sampah berupa: 1) Melakukan penguatan TPS3R dan bank sampah berbasis desa agar sampah tidak seluruhnya bergantung pada TPA, 2) peningkatan kapasitas dan peremajaan sarana TPA agar pengolahan lebih ramah lingkungan serta membentuk UPTD Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, dan 3) Membentuk regulasi wajib pilah sampah dari sumber serta melakukan edukasi intensif dengan kolaborasi dari berbagai sektor/stakeholder.

40) Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengantisipasi, menghadapi, dan pulih dari berbagai ancaman baik sosial, ekonomi, lingkungan, maupun alam. Indeks ini

biasanya menilai aspek ketahanan sosial, ekonomi, tata kelola, keamanan, serta kapasitas penanggulangan bencana.

Berdasarkan data, realisasi Indeks Ketahanan Daerah pada Tahun 2025 sebesar 0,89 dari target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 0,845 atau tercapai 105,33%. Capaian Tahun 2025 menunjukkan kondisi bahwa sistem sosial di Kabupaten Wonosobo telah relatif stabil, penanganan bencana cukup memadai serta ketahanan ekonomi telah berjalan cukup baik. Berikut merupakan capaian IKD Kabupaten Wonosobo dari Tahun 2021-2025:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,78	0,84	0,88	0,9	0,89

Capaian IKD Kabupaten Wonosobo selama 5 tahun cenderung meningkat, namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2025. Apabila Dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Wonosobo menempati peringkat ke 6 tertinggi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.12

Nilai Indeks Ketahanan Daerah Se-Jawa Tengah Tahun 2025

NO	Kabupaten/Kota	IKD
1	Klaten	0,94
2	Magelang	0,94
3	Banyumas	0,93
4	Kebumen	0,93
5	Boyolali	0,91
6	Wonosobo	0,89
7	Grobogan	0,88
8	Karanganyar	0,86
9	Purworejo	0,85
10	Kota Surakarta	0,83
11	Tegal	0,83
12	Banjarnegara	0,8
13	Pemalang	0,8
14	Demak	0,79
15	Kudus	0,79
16	Cilacap	0,78

17	Wonogiri	0,78
18	Semarang	0,77
19	Kendal	0,74
20	Kota Semarang	0,74
21	Sragen	0,72
22	Pekalongan	0,69
23	Rembang	0,68
24	Sukoharjo	0,68
25	Blora	0,67
26	Kota Tegal	0,64
27	Batang	0,63
28	Kota Pekalongan	0,63
29	Temanggung	0,61
30	Brebes	0,58
31	Purbalingga	0,58
32	Jepara	0,56
33	Kota Magelang	0,53
34	Kota Salatiga	0,52
35	Pati	0,52

Adanya penurunan capaian di tahun 2025 disebabkan oleh penyesuaian analisis peta bencana dari BNPB. Namun, secara umum dengan peringkat 5 dari 35 Kabupaten se-Jawa Tengah dapat tercapai dikarenakan 1) Pengalaman penanganan bencana yang baik, dimana sebagai wilayah pegunungan yang rawan longsor dan cuaca ekstrem, Wonosobo memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi bencana. Pengalaman ini membentuk kesiapsiagaan kolektif, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, 2) Adanya relawan kebencanaan, perangkat desa aktif, serta inisiatif Desa Tangguh Bencana menjadi modal penting dalam memperluas kesiapsiagaan serta 3) Adanya koordinasi lintas sektoral dan kolaboratif antar stakeholder yang terlibat.

Selanjutnya untuk semakin meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Wonosobo perlu melakukan 1) Meningkatkan kualitas peta risiko berbasis data GIS hingga level dusun, 2) Memperluas jumlah desa tangguh bencana dengan pelatihan rutin, 3) menambah sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau masyarakat menggunakan aplikasi <https://sikk.wonosobokab.go.id/> 4) melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya, dengan menyediakan dokumen jalur evakuasi Kecamatan Watumalang dan Sukoharjo serta pembuatan jalur evakuasi mandiri, desa kalikarung, kecamatan kalibawang; 5) melakukan pemantauan berkala hulu sungai, dalam rangka mengurangi risiko banjir bandang dengan membuat

dokumen RPIP didalamnya ada kolom retensi di Dieng; serta 6) melakukan pemulihan pelayanan dasar pemerintah, dengan dasar hukum Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Administrasi Kependudukan.

2.3.3 Realisasi Anggaran per Misi Daerah

Sebagaimana perencanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025, terdapat program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Daerah dan telah dilakukan perubahan anggaran. Program-program tersebut dikelompokkan dalam urusan pemerintahan yang mendukung masing-masing Misi Daerah. Sehingga dapat disajikan tabel realisasi program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.13
Program, Pagu Anggaran dan Realisasi berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	MISI 1: Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Demokratis dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Mempercepat Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat	Rp1.557.037.599.697,00	Rp1.415.138.041.868,00	90,89%
	TUJUAN: Meningkatkan Demokrasi	Rp1.823.034.450,00	Rp1.805.106.750,00	99,02%
	SASARAN: Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Politik	Rp1.823.034.450,00	Rp1.805.106.750,00	99,02%
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp1.823.034.450,00	Rp1.805.106.750,00	99,02%
	TUJUAN: Membangun Harmoni Sosial Dalam Masyarakat	Rp6.144.903.735,00	Rp6.041.051.424,00	98,31%
	SASARAN: Meningkatnya Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Rp2.859.903.462,00	Rp2.837.948.664,00	99,23%
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp1.165.663.484,00	Rp 1.153.146.794,00	98,93%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp89.684.253,00	Rp87.179.730,00	97,21%
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 1.604.555.725,00	Rp1.597.622.140,00	99,57%
SASARAN: Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)		Rp3.285.000.273,00	Rp3.203.102.760,00	97,51%
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp2.306.732.125,00	Rp2.282.421.772,00	98,95%
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp978.268.148,00	Rp920.680.988,00	94,11%
TUJUAN: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik		Rp1.549.069.661.512,00	Rp1.407.291.883.694,00	90,85%
SASARAN: Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel		Rp392.478.259.112,00	Rp363.285.293.669,00	92,56%
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp376.147.213.678,00	Rp348.019.467.927,00	92,52%
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp761.832.513,00	Rp747.540.092,00	98,12%
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp2.990.115.662,00	Rp2.977.600.135,00	99,58%
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp545.401.482,00	Rp516.695.283,00	94,74%
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp105.590.000,00	Rp92.955.166,00	88,03%
6	Program Riset dan Inovasi Daerah	Rp269.310.000,00	Rp252.107.004,00	93,61%
7	Program Penatagunaan Tanah	Rp60.771.895,00	Rp39.097.008,00	64,33%
8	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp125.282.492,00	Rp86.671.368,00	69,18%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
9	Program Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat	Rp4.629.463.270,00	Rp4.504.572.855,00	97,30%
10	Program Perekonomiandan Pembangunan	Rp1.605.344.546,00	Rp1.298.374.798,00	80,88%
11	Program Dukungan Pelaksanaan Tugasdan Fungsi DPRD	Rp4.231.455.000,00	Rp3.801.466.726,00	89,84%
12	Program Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp360.739.320,00	Rp346.274.031,00	95,99%
13	Program Koordinasidan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp645.739.254,00	Rp602.471.276,00	93,30%
SASARAN: Terwujudnya Pemerintahan Yang Kapabel		Rp3.349.493.860,00	Rp3.285.602.556,00	98,09%
1	Program Kepegawaian Daerah	Rp1.882.864.481,00	Rp1.837.761.791,00	97,60%
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp1.222.159.410,00	Rp1.222.095.856,00	99,99%
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp24.880.000,00	Rp24.853.000,00	99,89%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp22.260.000,00	Rp22.136.000,00	99,44%
5	Program Pengelolaan Arsip	Rp197.329.969,00	Rp178.755.909,00	90,59%
SASARAN: Menguatnya Transparansi Informasi Publikdan Pengelolaan Komunikasi Publik		Rp4.254.667.558,00	Rp3.171.115.817,00	74,53%
1	Program Pengelolaan Informasidan Komunikasi Publik	Rp4.254.667.558,00	Rp3.171.115.817,00	74,53%
SASARAN: Meningkatnya Pelayanan Publik		Rp1.148.987.240.982,00	Rp1.037.549.871.652,00	90,30%
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp78.399.360,00	Rp76.716.240,00	97,85%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik	Rp1.781.320.606,00	Rp1.710.886.609,00	96,05%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan	Rp18.960.939.845,50	Rp18.857.912.451,00	99,46%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp1.303.442.204,00	Rp1.275.515.296,00	97,86%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.124.047.534.489,50	Rp1.012.924.120.750,00	90,11%
7	Program Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Rp1.903.187.127,00	Rp1.803.321.863,00	94,75%
9	Program Pendaftaran Penduduk	Rp835.317.350,00	Rp826.003.393,00	98,88%
10	Program Pencatatan Sipil	Rp77.100.000,00	Rp75.395.050,00	97,79%
MISI 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Untuk Mengurangi Kemiskinan Yang Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Koperasi		Rp31.351.291.657,00	Rp21.478.000.301,00	68,51%
TUJUAN: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan		Rp23.066.788.036,00	Rp16.086.530.087,00	69,74%
SASARAN: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Dominan		Rp13.903.953.102,00	Rp10.282.953.271,00	73,96%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp45.000.000,00	Rp44.054.465,00	97,90%
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp70.000.000,00	Rp69.959.350,00	99,94%
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp100.000.000,00	Rp99.379.920,00	99,38%
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp40.000.000,00	Rp39.798.290,00	99,50%
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp30.000.000,00	Rp28.362.500,00	94,54%
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp880.000.000,00	Rp409.266.630,00	46,51%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
7	Program Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp1.063.994.300,00	Rp1.034.581.422,00	97,24%
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewandan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp85.000.000,00	Rp84.948.580,00	99,94%
9	Program Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp70.000.000,00	Rp67.632.305,00	96,62%
10	Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	Rp61.650.438,00	Rp55.137.560,00	89,44%
11	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp1.303.466.651,00	Rp1.193.840.311,00	91,59%
12	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp1.597.206.018,00	Rp1.593.904.006,00	99,79%
13	Program Pengembangan Ekspor	Rp35.048.421,00	Rp34.045.044,00	97,14%
14	Program Standardisasi Perlindungan Konsumen	Rp58.313.135,00	Rp56.758.026,00	97,33%
15	Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp9.155.396,00	Rp8.739.900,00	95,46%
16	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Rp400.000.000,00	Rp371.865.339,00	92,97%
17	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp24.065.362,00	Rp23.120.000,00	96,07%
18	Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp8.031.053.381,00	Rp5.067.559.623,00	63,10%
SASARAN: Berkembangnya Potensi Sektor Pariwisata		Rp7.421.221.552,00	Rp5.112.219.379,00	68,89%
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp4.293.708.953,00	Rp2.370.589.986,00	55,21%
2	Program Pelestarian Pengelolaan Cagar Budaya	Rp51.143.600,00	Rp50.204.600,00	98,16%
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp1.626.613.553,00	Rp1.420.674.948,00	87,34%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
4	Program Pemasaran Pariwisata	Rp843.704.776,00	Rp790.507.982,00	93,69%
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp286.361.670,00	Rp167.768.863,00	58,59%
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp319.689.000,00	Rp312.473.000,00	97,74%
SASARAN: Meningkatnya Pertumbuhan Investasi		Rp189.524.340,00	Rp188.388.691,00	99,40%
1	Program Promosi Penanaman Modal	Rp8.450.000,00	Rp8.450.000,00	100,00%
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp77.466.900,00	Rp77.430.107,00	99,95%
3	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp38.228.040,00	Rp38.151.184,00	99,80%
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp65.379.400,00	Rp64.357.400,00	98,44%
SASARAN: Meningkatnya Pertumbuhan Umkm, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Desa		Rp1.552.089.042,00	Rp502.968.746,00	32,41%
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	Rp602.519.297,00	Rp130.867.664,00	21,72%
2	Program Pengembangan Umkm	Rp800.000.000,00	Rp229.090.812,00	28,64%
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp94.064.018,00	Rp91.827.100,00	97,62%
4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Rp40.610.467,00	Rp36.737.270,00	90,46%
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp14.895.260,00	Rp14.445.900,00	96,98%
TUJUAN: Menurunkan Kesenjangan Pendapatan Masyarakat		Rp8.284.503.621,00	Rp5.391.470.214,00	65,08%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
SASARAN: Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Ekonomi Produktif		Rp1.098.960.000,00	Rp970.345.954,00	88,30%
1	Program Penyuluhan Pertanian	Rp1.098.960.000,00	Rp970.345.954,00	88,30%
SASARAN: Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Daerah		Rp7.185.543.621,00	Rp4.421.124.260,00	61,53%
1	Program Pelatihan Kerjadan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp6.730.543.621,00	Rp4.093.114.021,00	60,81%
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp315.000.000,00	Rp189.390.579,00	60,12%
3	Program Hubungan Industrial	Rp140.000.000,00	Rp138.619.660,00	99,01%
MISI 3: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Berkarakter, Berbudaya, Kreatif, Inovatif, Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Komprehensif Yang Berorientasi Pada Pemenuhan Kebutuhan Ma Kearifan Lokaldan Perkembangan Teknologi Modern		Rp294.428.004.201,00	Rp237.139.138.025,00	80,54%
TUJUAN: Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing		Rp294.428.004.201,00	Rp237.139.138.025,00	80,54%
SASARAN: Meningkatkan Kualitas Pendidikan		Rp150.117.642.042,00	Rp138.320.165.007,00	92,14%
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp149.809.842.042,00	Rp138.048.108.317,00	92,15%
2	Program Pendidikdan Tenaga Kependidikan	Rp72.800.000,00	Rp61.770.000,00	84,85%
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp235.000.000,00	Rp210.286.690,00	89,48%
SASARAN: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Rp115.990.732.160,00	Rp74.609.911.332,00	64,32%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp103.555.816.018,00	Rp62.425.084.620,00	60,28%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp784.946.900,00	Rp765.331.400,00	97,50%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp733.759.310,00	Rp654.587.114,00	89,21%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp322.947.576,00	Rp296.803.640,00	91,90%
5	Program Pengendalian Penduduk	Rp444.298.800,00	Rp427.850.128,00	96,30%
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp5.099.239.956,00	Rp5.023.830.890,00	98,52%
7	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp5.049.723.600,00	Rp5.016.423.540,00	99,34%
SASARAN: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesenjangan Dalam Dimensi Sosial		Rp18.379.629.999,00	Rp17.717.598.041,00	96,40%
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp972.211.778,00	Rp866.755.520,00	89,15%
2	Program Rehabilitasi Sosial	Rp1.133.375.066,00	Rp1.047.722.631,00	92,44%
3	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp75.000.000,00	Rp48.454.657,00	64,61%
4	Program Pemberdayaan Sosial	Rp582.748.282,00	Rp480.188.792,00	82,40%
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp3.559.254.852,00	Rp3.480.614.719,00	97,79%
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp7.506.267.120,00	Rp7.343.788.943,00	97,84%
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp508.102.000,00	Rp507.425.395,00	99,87%
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp52.000.000,00	Rp30.716.410,00	59,07%
9	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp103.150.000,00	Rp102.301.518,00	99,18%
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp7.500.000,00	Rp5.063.860,00	67,52%
11	Program Perlindungan Perempuan	Rp96.400.000,00	Rp93.120.000,00	96,60%
12	Program Penanganan Bencana	Rp96.229.684,00	Rp93.459.800,00	97,12%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
13	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp556.427.270,00	Rp552.535.494,00	99,30%
14	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp73.336.940,00	Rp72.469.593,00	98,82%
15	Program Penataan Desa	Rp1.612.765.900,00	Rp1.576.620.633,00	97,76%
16	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp141.418.903,00	Rp140.844.780,00	99,59%
17	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp1.303.442.204,00	Rp1.275.515.296,00	97,86%
SASARAN: Meningkatkan Kualitas Pemudaran Olahraga		Rp9.940.000.000,00	Rp6.491.463.645,00	65,31%
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp430.000.000,00	Rp383.021.000,00	89,07%
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp9.280.000.000,00	Rp5.878.442.645,00	63,35%
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp230.000.000,00	Rp230.000.000,00	100,00%
MISI 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Untuk Menciptakan Pembangunan Yang Merata		Rp127.395.159.845,00	Rp122.632.964.980,00	96,26%
TUJUAN: Meningkatkan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Yang Berkualitas		Rp125.475.807.495,00	Rp120.926.841.807,00	96,37%
SASARAN: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan		Rp89.181.945.136,00	Rp88.009.758.671,00	98,69%
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp89.181.945.136,00	Rp88.009.758.671,00	98,69%
SASARAN: Meningkatkan Layanan Akses Air Limbah Domestik Layak		Rp2.815.000.000,00	Rp2.798.815.355,00	99,43%
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp2.815.000.000,00	Rp2.798.815.355,00	99,43%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
SASARAN: Meningkatnya Layanan Akses Air Minum Layak		Rp1.100.000.000,00	Rp1.094.364.749,00	99,49%
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp1.100.000.000,00	Rp1.094.364.749,00	99,49%
SASARAN: Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi		Rp6.224.348.000,00	Rp5.882.193.543,00	94,50%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp5.324.348.000,00	Rp4.991.043.385,00	93,74%
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp900.000.000,00	Rp891.150.158,00	99,02%
SASARAN: Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Jalan		Rp8.476.565.934,00	Rp6.884.874.497,00	81,22%
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp8.476.565.934,00	Rp6.884.874.497,00	81,22%
SASARAN: Tersedianya Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni		Rp17.677.948.425,00	Rp16.256.834.992,00	91,96%
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp16.722.573.863,00	Rp15.343.753.344,00	91,75%
2	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp31.135.142,00	Rp30.815.780,00	98,97%
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp205.000.000,00	Rp165.000.000,00	80,49%
4	Program Kawasan Permukiman	Rp75.408.040,00	Rp74.326.200,00	98,57%
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp643.831.380,00	Rp642.939.668,00	99,86%
TUJUAN: Meningkatkan Perkembangan Wilayah		Rp1.919.352.350,00	Rp1.706.123.173,00	88,89%
SASARAN: Meningkatkan Aksesibilitas, Konektivitas dan Penataan Ruang Wilayah		Rp1.919.352.350,00	Rp1.706.123.173,00	88,89%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp169.820.350,00	Rp169.792.810,00	99,98%
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp1.096.280.000,00	Rp900.241.500,00	82,12%
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp653.252.000,00	Rp636.088.863,00	97,37%
MISI 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alamdan Lingkungan Hidup Dengan Tetap Menjaga Keseimbangandan Pelestarian Fungsidan Keberadaannya Dalam Upaya Menopang Kehidupandan Penghidupan Akan Datang		Rp15.374.348.685,00	Rp14.756.728.102,00	95,98%
TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Tanggap Terhadap Perubahan Iklim		Rp12.340.942.559,00	Rp11.795.244.023,00	95,58%
SASARAN: Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan		Rp2.264.058.062,00	Rp2.120.614.851,00	93,66%
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp180.137.516,00	Rp136.447.980,00	75,75%
2	Program Pengendalian Pencemaran/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp471.325.094,00	Rp406.476.557,00	86,24%
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp1.525.858.871,00	Rp1.492.424.629,00	97,81%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungandan Izin Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp50.718.950,00	Rp49.325.530,00	97,25%
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp31.942.631,00	Rp31.865.155,00	99,76%
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp4.075.000,00	Rp4.075.000,00	100,00%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
SASARAN: Meningkatnya Kinerja Layanan Persampahan		Rp10.076.884.497,00	Rp9.674.629.172,00	96,01%
1	Program Pengendalian Bahan Berbahayadan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp10.590.388,00	Rp9.065.785,00	85,60%
2	Program Pengelolaan Persampahan	Rp10.066.294.109,00	Rp9.665.563.387,00	96,02%
TUJUAN: Mengurangi Tingkat Risiko Bencana		Rp3.033.406.126,00	Rp2.961.484.079,00	97,63%
SASARAN: Terwujudnya Wilayah Yang Berketahanan Bencana		Rp3.033.406.126,00	Rp2.961.484.079,00	97,63%
1	Program Penanggulangan Bencana	Rp1.086.030.526,00	Rp1.026.927.355,00	94,56%
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp1.947.375.600,00	Rp1.934.556.724,00	99,34%
JUMLAH		Rp2.025.586.404.085,00	Rp1.811.144.873.276,00	89,41%

Berdasarkan rencana anggaran Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.025.586.404.085,00, realisasi anggaran mencapai Rp1.811.144.873.276,00 atau 89,41% dari total anggaran yang direncanakan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan pembangunan daerah telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap secara optimal.

Dalam konteks pencapaian kinerja pembangunan daerah, realisasi anggaran tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan berbagai indikator pembangunan di Kabupaten Wonosobo melalui komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan, koordinasi yang baik antar perangkat daerah, serta dukungan sistem perencanaan dan penganggaran yang semakin terintegrasi. Sementara itu belum optimalnya penyerapan anggaran hingga 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1) Adanya efisiensi belanja pada beberapa kegiatan, perubahan kebijakan dan penyesuaian program selama tahun anggaran berjalan, 2)

keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, 3) kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang didominasi wilayah pegunungan sehingga pada beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu pelaksanaan yang lebih panjang serta, 4) adanya kendala teknis di lapangan maupun keterbatasan kapasitas pelaksanaan kegiatan.

2.3.4 Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Strategis

Efektivitas anggaran dapat diperoleh dari dengan capaian masing-masing indikator sasaran dibandingkan dengan bagaimana kinerja anggaran pada tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini bahwa masing-masing capaian indikator sasaran telah dikelompokkan dalam masing-masing Misi Daerah, sehingga kinerja anggaran juga diklasifikasikan dengan kelompok yang sama. Berikut ini disajikan tabel efektivitas anggaran terhadap capaian strategis yang telah dikelompokkan per Misi Daerah.

Tabel 2.3.14
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Strategis Tahun 2025

No.	Misi Daerah dan Kriteria Capaian Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	%	Anggaran		
				Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Misi 1	11		1.557.037.599.697	1.415.138.041.868	90,89
a	Sangat Tinggi	9	82			
b	Tinggi	2	18			
c	Sedang	0	0			
d	Rendah	0	0			
e	Sangat Rendah	0	0			
2	Misi 2	10		31.351.291.657	21.478.000.301	68,51
a	Sangat Tinggi	6	60			
b	Tinggi	2	20			
c	Sedang	0	0			
d	Rendah	2	20			
e	Sangat Rendah	0	0			
3	Misi 3	6		294.428.004.201	237.139.138.025	80,54
a	Sangat Tinggi	6	100			
b	Tinggi	0	0			
c	Sedang	0	0			
d	Rendah	0	0			
e	Sangat Rendah	0	0			
4	Misi 4	9		127.395.159.845	122.632.964.980	96,26

a	Sangat Tinggi	6	67			
b	Tinggi	3	33			
c	Sedang	0	0			
d	Rendah	0	0			
e	Sangat Rendah	0	0			
5	Misi 5	5		15.374.348.685	14.756.728.102	95,98
a	Sangat Tinggi	3	60			
b	Tinggi	2	40			
c	Sedang	0	0			
d	Rendah	0	0			
e	Sangat Rendah	0	0			
	JUMLAH	41		2.025.586.404.085	1.811.144.873.276	89,41

Berdasarkan tabel efektivitas anggaran terhadap capaian strategis tahun 2025 di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Pada Misi 1 dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp1.557.037.599.697 dengan realisasi Rp1.415.138.041.868 atau 90,89%. Capaian kinerja pada misi ini tergolong sangat baik, dimana dari 11 indikator, sebanyak 9 indikator (82%) berada pada kategori sangat tinggi dan 2 indikator (18%) berada pada kategori tinggi.

Secara umum capaian kinerja pada misi ini tergolong sangat tinggi, ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti Indeks SPBE (137,09%), Nilai Keterbukaan Informasi Publik (100,65%), serta Indeks Kepuasan Masyarakat (101,83%) yang melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik relatif efektif dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Hubungan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja terlihat cukup kuat pada program reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan. Investasi anggaran pada pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan kapasitas aparatur memberikan dampak langsung terhadap meningkatnya kualitas layanan publik. Namun, masih terdapat indikator yang belum optimal seperti Indeks Persepsi Korupsi (77,66%) dan Indeks Rasa Aman (88,75%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan anggaran tersedia, peningkatan persepsi integritas dan keamanan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh intervensi pemerintah daerah tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan perilaku masyarakat.

- 2) Pada Misi 2 pagu anggaran sebesar Rp31.351.291.657 dengan realisasi Rp21.478.000.301 atau 68,51%, yang merupakan tingkat serapan anggaran paling rendah dibandingkan misi lainnya. Namun capaian kinerja masih cukup baik dengan 10 indikator, terdapat 6 indikator (60%) berkategori sangat tinggi, 2

indikator (20%) tinggi, dan 2 indikator (20%) rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua capaian kinerja sangat bergantung pada besarnya serapan anggaran. Pada misi 2 hubungan antara anggaran dan capaian kinerja lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional dan karakteristik struktur ekonomi Wonosobo yang didominasi sektor pertanian.

Beberapa indikator menunjukkan capaian sangat tinggi seperti Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (153,43%), Pertumbuhan Sektor Perdagangan (166,80%), serta Realisasi Investasi Daerah (112,33%). Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi mampu memicu aktivitas ekonomi yang lebih luas. Namun, beberapa indikator belum mencapai target seperti pertumbuhan sektor pertanian (82,18%), spending wisatawan (62,93%), serta persentase usaha mikro naik kelas (57,14%). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran tidak secara langsung mampu mempercepat transformasi ekonomi, terutama pada sektor yang sangat dipengaruhi faktor eksternal seperti harga komoditas pertanian, daya beli wisatawan, serta kapasitas usaha mikro.

- 3) Pada Misi 3 dialokasikan anggaran sebesar Rp294.428.004.201 dengan realisasi Rp237.139.138.025 atau 80,54%. Capaian kinerja pada misi ini sangat baik karena seluruh 6 indikator (100%) berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan pada misi ini sangat efektif dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tingginya capaian kinerja dengan serapan anggaran 80,54. Menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Intervensi pemerintah daerah melalui program layanan kesehatan, bantuan sosial, serta pemberdayaan desa memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Pada Misi 4 pagu anggaran sebesar Rp127.395.159.845 dengan realisasi Rp122.632.964.980 atau 96,26%, yang merupakan salah satu tingkat serapan anggaran tertinggi. Dari 9 indikator kinerja, sebanyak 6 indikator (67%) berada pada kategori sangat tinggi dan 3 indikator (33%) berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan infrastruktur cukup efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang masih di bawah target, seperti Indeks Sanitasi (75,90%), Indeks Aksesibilitas Wilayah (75,40%), serta Indeks Penataan Ruang (86,15%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran pembangunan infrastruktur telah dialokasikan secara signifikan, peningkatan aksesibilitas wilayah dan kualitas sanitasi masih memerlukan investasi yang lebih besar dan berkelanjutan.

- 5) Pada Misi 5 dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp15.374.348.685 dengan realisasi Rp14.756.728.102 atau 95,98%. Capaian kinerja pada misi ini sangat baik dimana dari 5 indikator, sebanyak 3 indikator (60%) berada pada kategori sangat tinggi dan 2 indikator (40%) berada pada kategori tinggi.

Tingginya realisasi anggaran serta capaian indikator menunjukkan bahwa program pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan daerah dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini penting mengingat Kabupaten Wonosobo memiliki karakteristik sebagai wilayah pegunungan yang berfungsi sebagai kawasan hulu berbagai daerah aliran sungai serta memiliki kerentanan terhadap bencana alam seperti longsor. Namun, masih terdapat indikator yang masih belum optimal seperti Indeks Kualitas Udara (87,48%) dan persentase sampah yang terkelola (85,72%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada program pemerintah juga perlu dukungan dari kesadaran masyarakat serta aktivitas ekonomi.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, selain mendasarkan pada asas desentralisasi, juga dapat dilaksanakan berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini mendasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 Ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Asas Desentralisasi adalah Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Asas Dekonsentrasi adalah Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (11) menjelaskan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Urusan pemerintah daerah yang dapat ditugaskan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat absolut/mutlak, yaitu pertahanan, keamanan, keagamaan, yustisi, politik luar negeri serta moneter dan fiskal.

Tugas pembantuan tersebut diselenggarakan, dikarenakan tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan tindak lanjut serta laporan realisasi anggaran berupa neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang dari para kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dana.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas Pembantuan dari Pemerintah Tingkat Atasnya, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak menerima Tugas Pembantuan dari Kementrian/Lembaga yang di tugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1 Target Kinerja

Tidak ada Target Kinerja dalam Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Wonosobo karena pada tahun 2025

Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Kementrian/Lembaga.

3.1.2 Realisasi

Tidak ada Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran dalam Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Wonosobo karena pada tahun 2025 Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Kementrian/Lembaga.

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak menerima Tugas Pembantuan dari Daerah Provinsi yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1 Target Kinerja

Tidak ada Target Kinerja dalam Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Wonosobo karena pada tahun 2025 Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi.

3.1.2 Realisasi

Tidak ada Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran dalam Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Wonosobo karena pada tahun 2025 Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi.

3.3 Permasalahan dan Kendala

Tidak ada Permasalahan dan Kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan karena pada tahun 2025 Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Tidak ada Saran dan Tindak Lanjut oleh Kabupaten Wonosobo dalam Langkah tindak lanjut dari penyelesaian permasalahan dalam tugas pembantuan karena pada tahun 2025 Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Urusan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.1
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)	25.180	Setiap Tahun	Angka Partisipasi Sekolah	89,85	Pertahun	4.024.690.000
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	80,29		
					Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/DIV	78,73		
2	Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs)	Jumlah Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI dan Jumlah Warga negara Usia 13-15	127.827	Setiap Tahun	SD			19.263.770.928
					Angka partisipasi sekolah	99,64		
					Kemampuan literasi	69,5		
					Kemampuan numerasi	60,11		
					Indeks iklim keamanan	77,81		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
		Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs			Indeks iklim kebinekaan	74,49	
					Indeks iklim inklusivitas	62,19	
					SMP		
					Angka partisipasi sekolah	90,8	
					Kemampuan literasi	80,02	
					Kemampuan numerasi	68,74	
					Indeks iklim keamanan	73,88	
					Indeks iklim kebinekaan	74,13	
					Indeks iklim inklusivitas	61,69	
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.014		Angka partisipasi sekolah	41,2	72.800.000

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, 2025

4.1.3. Realisasi Hasil Capaian SPM

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.2
Realiasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	25.180	25.180	100	4.024.690.000	3.517.293.950	87,39
2.	Pendidikan Dasar	127.827	127.827	100	19.263.770.928	15.187.264.481	78.84
3.	Pendidikan Kesetaraan	4.014	4.014	100	72.800.000	61.770.000	84,85

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Pendidikan

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100
1	Pendidikan Anak Usia Dini				100
		Target 100% SPM	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)	89,95	83,89	5,96	93,37%
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
No.	Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Yang Harus Dilayani	25180	25180	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Penerima Pelayanan Dasar		Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	80,29	80,29	-	100
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	78,73	78,73	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2	Pendidikan Dasar				100
		Target 100% SPM	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun) SD	99,64	98	1,64	98.35%
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun) SMP	90,08	94,03	3,95	104.38%
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
No.	Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Yang Harus	127827	127827	-	100

	Dilayani				
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Penerima Pelayanan Dasar		Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	SD				
1	Kemampuan literasi	69.5	69.5	-	100
2	Kemampuan numerasi	60.11	60.11	-	100
3	Indeks iklim keamanan	77.81	77.81	-	100
4	Indeks iklim kebhinekaan	74.49	74.49	-	100
5	Indeks iklim inklusivitas	62.19	62.19	-	100
	SMP				
1	Kemampuan literasi	80.02	80.21	-	100
2	Kemampuan numerasi	68.74	68.74	-	100
3	Indeks iklim keamanan	73.88	74.13	-	100
4	Indeks iklim kebhinekaan	74.13	74.13	-	100
5	Indeks iklim inklusivitas	61.69	61.96	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
3	Pendidikan Kesetaraan				100
		Target 100% SPM	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan	41,2	100	58,8	242,72%
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pendidikan Kesetaraan	4.014	4.014	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Penerima Pelayanan Dasar		Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	41,2	41,2	-	100

Tabel 4.1.3
Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM	Kategori Indeks SPM
-----	-----------------------	------------	---------------------

		(Ip Layanan + Ip Mutu)	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	100	Tuntas Paripurna
2.	Pendidikan Dasar	100	Tuntas Paripurna
3.	Pendidikan Kesetaraan	100	Tuntas Paripurna
	IP Total	100	Tuntas Paripurna

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, 2025

Keterangan:

Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

100 : Tuntas Paripurna

90 – 99 : Tuntas Utama

80 – 89 : Tuntas Madya

70 – 79 : Tuntas Pratama

60 – 69 : Tuntas Muda

< 60 : Belum Tuntas

4.1.4. Alokasi Anggaran

Dalam mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp23.361.260.928 yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan alokasi anggaran pada tahun 2025 tersebut untuk pemenuhan SPM urusan pendidikan, direalisasikan sebesar Rp18.766.328.431 atau 80,33%.

Tabel 4.1.4
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini		4.024.690.000	
2.	Pendidikan Dasar		19.263.770.928	
3.	Pendidikan Kesetaraan		72.800.000	

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo tahun 2025, didukung oleh personil terutama dari aparaturnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Guru dan Pengawas sebagai berikut:

Tabel 4.1.5
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	2
2.	Strata 2	315
3.	Strata 1	4.204
4.	Diploma IV	1
5.	Diploma III	17
6.	Diploma II	14
7.	SLTA/Sederajat	75
8.	SLTP/Sederajat	18

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
9.	SD/Sederajat	6
	Jumlah	4.652

4.1.6. Permasalahan dan Solusi.

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1.6
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Akreditasi satuan PAUD.	Kuota akreditasi pada satuan PAUD yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, sehingga mempengaruhi angka satuan PAUD terakreditasi minimal B.	Meningkatkan persentase akreditasi B melalui sistem seleksi internal yang ketat bagi satuan PAUD yang paling siap, agar kuota yang terbatas hanya diberikan kepada lembaga yang sudah pasti memenuhi standar kualitas tinggi.
2	Kualifikasi pendidik jenjang PAUD	Belum semua guru PAUD berpendidikan sesuai dengan kualifikasi minimal D4/S1.	- Mengakselerasi peningkatan kualifikasi guru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan bantuan biaya studi yang bekerja sama dengan universitas agar masa kuliah lebih cepat dan terjangkau bagi guru yang sudah berpengalaman.
3.	Angka partisipasi sekolah (APS).	Masih terdapat anak tidak sekolah pada usia sekolah yang berpengaruh pada tingkat partisipasi sekolah yang disebabkan faktor ekonomi, kondisi geografis, sosial budaya maupun motivasi.	- Meningkatkan partisipasi sekolah melalui pendekatan jemput bola dengan menghadirkan layanan PAUD berbasis komunitas yang fleksibel, subsidi biaya pendidikan bagi keluarga tidak mampu, serta edukasi masif kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Urusan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang mempunyai tugas dalam pengelolaan kesehatan masyarakat. Pelayanan Dasar di Urusan Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga TB; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.1
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	9007	Setiap Tahun	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	11.403	pertahun	2.167.777.840
					Tablet tambah darah	1.621.260		
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	9007		
					Kartu ibu/rekam medis ibu	9.007		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9.007		
					Media Promosi KIE	265		
					Gel USG	1.351		
					Dokter/dokter spesialis kebidanan	182		
					Bidan	544		
					Perawat	864		
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	8.825	Setiap tahun	Formulir Partograf	8825	pertahun	261.600.000
					Kartu ibu (rekam medis)	9007		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9007		
					Media Promosi	265		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					KIE			
					Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	182		
					Bidan	544		
					Perawat	864		
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	8.817	Setiap tahun	Vaksin Hepatitis B0	8817	pertahun	184.182.000
					Vitamin K1 injeksi	8817		
					Salep/tetes mata antibiotik	8817		
					Formulir bayi baru lahir	8817		
					Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	8817		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8817		
					Dokter/dokter spesialis Anak	183		
					Bidan	544		
					Perawat	864		
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	48.421	Setiap tahun	Kuisiонер Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	48421	Pertahun	14.783.000
					Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	48421		
					Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	48421		
					Vitamin A Biru	3966		
					Vitamin A Merah	40994		
					Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib, Campak, Rubella	21562		
					Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV,	105908		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					DPT -HB -Hib, Campak, Rubella			
					Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	127470		
					Peralatan Anafilaktik	265		
					Terapi Gizi Buruk	401		
					Bidan	544		
					Dokter	176		
					Perawat	864		
					Ahli Gizi	50		
					Guru PAUD			
					Kader Kesehatan	6,715		
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	116.990	Setiap tahun	Buku raport kesehatanku	116.990	Pertahun	449.860.950
					Buku pemantauan kesehatan	116.990		
					Kuesioner skrining kesehatan	116.990		
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	116.990		
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	13999		
					Dokter/Dokter gigi	208		
					Bidan	544		
					Perawat	864		
					Ahli Gizi	50		
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	79		
					Guru			
					Kader Kesehatan	6,715		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	408.213	Setiap tahun	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	25	Pertahun	106.070.000
					Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	Tensi:150 Glukometer : 125 Alat HB: 72 Lancet Blood, Strip gula: 408421 Kit IVA: 24		
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	408421		
					Dokter	176		
					Bidan	544		
					Perawat	864		
					Ahli Gizi	50		
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	79		
					Tenaga Non Kesehatan Terlatih	844		
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	117.392	Setiap tahun	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	117.392	Pertahun	13.027.580
					Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna	265		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Pasien Geriatri (P3G)			
					Buku kesehatan lansia	117.392		
					Dokter	176		
					Bidan	544		
					Perawat	864		
					Ahli Gizi	50		
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	79		
					Tenaga Non Kesehatan Terlatih	6.715		
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	108.976		Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	24	Pertahun	21.700.000
					Tensimeter	265		
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sehat Indonesiaku(A SIK)	1		
					Obat Tensi	108.976		
					Dokter	176		
					Bidan	544		
					Perawat	864		
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	79		
					Tenaga Kefarmasian	225		
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes militus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	7.230	Setiap tahun	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	7.230	pertahun	40.302.520
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem	1		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Informasi Manajemen Puskesmas)			
					Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	24		
					Obat Diabetes	7.230		
					Dokter	176		
					Bidan	544		
					Perawat	864		
					Ahli Gizi	50		
					Tenaga Kefarmasian	225		
					Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	96		
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	79		
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.328	Setiap tahun	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	24	Pertahun	197.851.750
					Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/ medikasi)	2.328		
					Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan	1		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					jiwa pada caregiver)			
					Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	265		
					Tenaga Kesehatan/Docter	176		
					Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	42		
					Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	2		
					Tenaga profesional lainnya	2		
11 .	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan Kesehatan	11.711	Setiap tahun	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	265	Pertahun	249.476.820
					Reagen Zn TB	100		
					Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	25.000		
					Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen , Ose/Lidi), Rak pengering	25.000		
					Catridge tes cepat	15.000		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					molekuler			
					Formulir pencatatan dan pelaporan	1		
					Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1		
					Tuberkulin	880		
					Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	188		
					Perawat	864		
					Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	96		
					Penata Rontgen	26		
					Tenaga kesehatan masyarakat	79		
					Tenaga kesehatan : Radiografer	27		
					Tenaga non kesehatan terlatih	6.715		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	15.191	Setiap tahun	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	265	Pertahun	122.700.000
					Tes cepat HIV (RDT) pertama	15.191		
					Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	15.191		
					Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan	15.191		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK			
					Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	187		
					Perawat	864		
					Bidan	544		
					Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	96		
					Tenaga kesehatan masyarakat	79		
					Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	1		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, 2025

4.2.3. Realisasi Hasil Capaian SPM

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.2
Realiasi Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	9.007	9.007	100	2.167.777.840	2.144.064.100	98,91 %
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	8.825	8.615	97,62	261.600.000	175.717.100	67,17 %
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	8.817	8.460	95,95	184.182.000	179.303.378	97,35 %
4.	Pelayanan kesehatan balita	48.421	48.421	100	14.783.100	14.783.100	100 %
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	116.990	116.990	100	449.860.950	428.385.930	95,23 %
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	408.213	408.213	100	106.070.000	103.330.383	97,42 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	117.392	117.392	100	13.027.580	12.160.079	93,34 %
8.	Pelayanan Kesehatan	108.976	108.976	100	21.700.000	21.690.000	99,95 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
	Penderita Hipertensi						
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.230	7.230	100	40.302.520	20.230.840	50,20 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2.328	2.328	100	197.851.750	184.481.750	93,24 %
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.711	11.711	100	249.476.820	214.264.640	85,89 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	15.191	14.127	93,00	122.700.000	121.188.300	98,77 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, 2025

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Kesehatan

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			98,76
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil				99,90
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	9.007	9.007	0	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				19,90
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	8.995	8.995	-	100
2	Tablet tambah darah	1.621.260	1.621.260	-	100
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	9.007	9.007	-	100
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	9.007	9.007	-	100
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	9.007	9.007	-	100
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	1.351	1.351	-	100
7	Alat deteksi resiko ibu hamil: skrining triple eliminasi dengan tes	9.007	9.007	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	cepat Hepatitis B, Sifilis dan HIV				
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	9.007	9.007	-	100
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9.007	9.007	-	100
10.	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	265	265	-	100
11	Gel USG	1.351	1.351	-	100
12	Tenaga Medis : Dokter/dokter spesialis obstetric dan ginekologi	182	182	-	100
13	Tenaga kesehatan : Perawat	544	544	-	100
14	Tenaga kesehatan : Bidan	864	864	-	100
15	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	225	225	-	100
16	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	50	50	-	100
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	9.007	8.263	744	91,74

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				97,85
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				78,10
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	8.825	8.615	210	97,62
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				19,75
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Formulir Partograf	8.825	8.615	210	97,62
2	Kartu ibu (rekam medis)	9.007	8.615	392	95,65
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9.007	8.615	392	95,65
4	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	265	265	-	100
5	Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis obstetric dan ginekologi	182	182	-	100
6	Tenaga Kesehatan: Bidan	544	544	-	100
7	Tenaga Kesehatan: Perawat	864	864	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
8	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	225	225	-	100
9	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	50	50	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				96,41
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				76,76
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	8.817	8.460	357	95,95
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				19,65
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Vaksin Hepatitis B0	8.817	8.460	357	95,95
2	Vitamin K1 injeksi	8.817	8.460	357	95,95
3	Salep/tetes mata antibiotik	8.817	8.460	357	95,95
4	Formulir bayi baru lahir	8.817	8.460	357	95,95
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	8.817	8.460	357	95,95
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8.817	8.460	357	95,95
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	265	265	-	100
8	Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis Anak	183	183	-	100
9	Tenaga Kesehatan: Bidan	544	544	-	100
10	Tenaga Kesehatan: Perawat	864	864	-	100
11	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	225	225	-	100
12	Tenaga Kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	33	33	-	100
13	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	50	50	-	100
14	Kader Kesehatan	6.715	6.715	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4	Pelayanan Kesehatan Balita				98,68
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Jumlah Yang dilayani	48.421	48.421	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				18,68
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	48.421	48.421	-	100
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	48.421	48.421	-	100
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	48.421	48.421	-	100
4	Vitamin A Biru	3.966	3.808	158	96,02
5	Vitamin A Merah	40.994	39.748	1246	96,96
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	10.686	8.367	2.319	78,30
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	42.387	34.059	8.328	80,35
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	21.134	17.726	3.408	83,87
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	31.701	25.691	6.010	81,04
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak – Rubella	10.567	9.444	1.123	89,37
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	10.995	9.350	1.645	85,04
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak – Rubella	10.995	9.350	1.645	85,04
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	96.078	95.287	791	99,18
14	Peralatan Anafilaktik	265	265	-	100
15	Formula Terapi Gizi Buruk	401	401	-	100
16	Tenaga Medis : Dokter	176	176	-	100
17	Tenaga kesehatan : Bidan	544	544	-	100
18	Tenaga kesehatan : Perawat	864	864	-	100
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	-	100
20	Guru PAUD	-	-	-	100
21	Kader Kesehatan	6.715	6.715	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				99,52
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	116.990	116.990	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				19,52
	Jumlah Mutu	Jumlah Mutu	Jumlah Mutu	Mutu Yang	

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
No.	(Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Yang Terlayani / Terpenuhi	Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Buku raport kesehatanku	116.990	116.990	-	100
2	Buku pemantauan kesehatan	13.999	12.578	1.421	89,85
3	Kuesioner skrining kesehatan	116.990	116.990	-	100
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	116.990	116.990	-	100
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	13.999	12.578	1.421	89,85
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahu diluar sekolah	727.949	654.056	73.893	89,85
7	Alat Pemeriksaan Hb	72	72	-	100
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	18.360	18.360	-	100
9	Media promosi Kesehatan	24	24	-	100
10	Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	13.528	11.846	1.682	87,57
11	Tenaga Medis: Dokter/Dokter gigi	231	231	-	100
12	Tenaga Kesehatan: Bidan	544	544	-	100
13	Tenaga Kesehatan: Perawat	864	864	-	100
14	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	50	50	-	100
15	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	225	225	-	100
16	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	79	79	-	100
17	Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	1	1	-	100
18	Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/Dokter kecil/peer conselor	1	1	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		99,78
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		80
		Penerima Layanan Dasar	Persentase

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(4:3 x 100%)
	Jumlah Yang dilayani	408.213	408.213	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				19,78
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Media promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	265	265	-	100
2	Alat : Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	1.308	1.308	-	100
3	Alat : Tensimeter	265	265	-	100
4	Alat : Glukometer	265	265	-	100
5	Alat : Alat Pemeriksa Hb	265	265	-	100
6	Alat : Tes Strip gula darah, lancet, kapas, alkohol	408.213	408.213	-	100
7	Alat : KIT IVA Tes	24	24	-	100
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	408.213	408.213	-	100
9	Kit Ophthalmologi Komunitas	24	24	-	100
10	Kuesioner PUMA	408.213	408.213	-	100
11	Alat Pelayanan KB	72	72	-	100
	a. Set Pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim	24	24	-	100
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	24	24	-	100
	c. Vasektomi set	24	24	-	100
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	-	100
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	11.403	8.995	2.408	78,88
14	Tenaga Medis : Dokter	176	176	-	100
15	Tenaga kesehatan : Bidan	544	544	-	100
16	Tenaga kesehatan : Perawat	864	864	-	100
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	-	100
18	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	79	79	-	100
19	Kader Kesehatan Terlatih dan mempunyai Kualifikasi tertentu	844	844	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		100
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		80

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	117.392	117.392	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas dan tensimeter	265	265	-	100
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	265	265	-	100
3	Alat pemeriksaan kolesterol	265	265	-	100
4	Bahan medis habis pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	117.392	117.392	-	100
5	Instrumen skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrument Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL Barthel)	265	265	-	100
6	Buku Kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	117.392	117.392	-	100
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	265	265	-	100
8	Tenaga medis: Dokter	176	176	-	100
9	Tenaga Kesehatan: Bidan	544	544	-	100
10	Tenaga Kesehatan: Perawat	864	864	-	100
11	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	50	50	-	100
12	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	79	79	-	100
13	Kader Kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	844	844	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			100	
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80	
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Jumlah Yang dilayani	108.976	108.976	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	24	24	-	100
2	Obat hipertensi	108.976	108.976	-	100
3	Tensimeter	265	265	-	100
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	1	1	-	100
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	265	265	-	100
6	Tenaga Medis: Dokter	176	176	-	100
7	Tenaga kesehatan: Bidan	544	544	-	100
8	Tenaga kesehatan: Perawat	864	864	-	100
9	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	50	50	-	100
10	Tenaga Kesehatan: Tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku	33	33	-	100
11	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	225	225	-	100
12	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	79	79	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	7.230	7.230	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Obat Diabetes Melitus	7.230	7.230	-	100
2	Fotometer atau Glukometer	265	265	-	100
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes	7.230	7.230	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	gula darah, kapas, alkohol, lancet				
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	1	1	-	100
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	24	24	-	100
6	Tenaga medis: dokter	176	176	-	100
7	Tenaga kesehatan : Bidan	544	544	-	100
8	Tenaga kesehatan : Perawat	864	864	-	100
9	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	225	225	-	100
10	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	79	79	-	100
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	-	100
12	Tenaga Kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	96	96	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				100
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	2.328	2.328	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	24	24	-	100
2	Penyediaan Psikofarmaka	2.328	2.328	-	100
3	Penyediaan formulir skrining Kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	2.328	2.328	-	100
4	Penyediaan formular	2.328	2.328	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	pencatatan dan pelaporan melalui system informasi Kesehatan				
5	Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	265	265	-	100
6	Tenaga medis: Dokter	179	179	-	100
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Kesehatan jiwa	42	42	-	100
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	2	2	-	100
9	Tenaga professional lainnya	2	2	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				98,97
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	11.711	11.711	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				18,97
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	265	265	-	100
2	Reagen Zn TB	100	95	5	95,00
3	Masker bedah dan Masker N95	25.000	24.674	326	98,70
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	25.000	16.756	8.244	67,02
5	Catridge tes cepat molekuler	15.000	14.603	397	97,35
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	1	1	-	100
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	1	-	100
8	Tuberkulin	880	568	312	64,55
9	Tenaga medis: Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	188	188	-	100
10	Tenaga Kesehatan: Perawat	864	864	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
11	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	225	225	-	100
12	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	79	79	-	100
13	Tenaga Kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	96	96	-	100
14	Tenaga kesehatan: Radoiografer	27	27	-	100
15	Kader kesehatan	6.715	6.715	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				93,98
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				74,40
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	15.191	14.127	1.064	93,00
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				19,58
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Media promosi komunikasi Informasu dan Edukasi (KIE)	265	265	-	100
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	15.191	14.127	1.064	93,00
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	15.191	14.127	1.064	93,00
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	15.191	14.127	1.064	93,00
5	Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	187	187	-	100
6	Tenaga Kesehatan: Bidan	544	544	-	100
7	Tenaga Kesehatan: Perawat	864	864	-	100
8	Tenaga Kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	96	96	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
9	Tenaga Kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	79	79	-	100
10	Tenaga non kesehatan terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	1	1	-	100

Tabel 4.2.3

Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	99,90	Tuntas Utama
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	97,85	Tuntas Utama
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,41	Tuntas Utama
4	Pelayanan kesehatan balita	98,68	Tuntas Utama
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	99,52	Tuntas Utama
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	99,78	Tuntas Utama
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	Tuntas Paripurna
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	Tuntas Paripurna
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	Tuntas Paripurna
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	98,97	Tuntas Utama
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	93,98	Tuntas Utama
	IP Keseluruhan	98,76	Tuntas Utama

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, 2025

Keterangan:

Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

100 : Tuntas Paripurna

90 – 99 : Tuntas Utama

80 – 89 : Tuntas Madya

70 – 79 : Tuntas Pratama

60 – 69 : Tuntas Muda

< 60 : Belum Tuntas

Dari 12 indikator SPM Urusan Kesehatan, 4 indikator mencapai kategori Tuntas Paripurna dan 8 indikator mencapai kategori Tuntas Utama.

Indikator yang mencapai kategori Tuntas Utama yang masih rendah capaiannya yaitu Pelayanan pada orang beresiko terinfeksi HIV hal ini dikarenakan penemuan orang dengan TBC positif lebih rendah dari yang di target awal penemuan estimasi 70 % atau penemuan TBC positif di angka 2400 sedangkan realisasi di angka 1900. Untuk indikator yang belum mencapai tuntas paripurna adalah Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin dan Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir

dikarenakan tingginya angka abortus pada ibu hamil sejumlah 369 orang.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Dalam mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan, pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.829.332.560 dan direalisasikan sebesar Rp3.619.599.600 atau 94,52%.

Tabel 4.2.4
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2.167.777.840	2.144.064.100	98,91 %
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	261.600.000	175.717.100	67,17 %
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	184.182.000	179.303.378	97,35 %
4.	Pelayanan kesehatan balita	14.783.100	14.783.100	100 %
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	449.860.950	428.385.930	95,23 %
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	106.070.000	103.330.383	97,42 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	13.027.580	12.160.079	93,34 %
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	21.700.000	21.690.000	99,95 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	40.302.520	20.230.840	50,20 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	197.851.750	184.481.750	93,24 %
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	249.476.820	214.264.640	85,89 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	122.700.000	121.188.300	98,77 %
Jumlah		3.829.332.560	3.619.599.600	94,52

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, 2025

Ada beberapa indikator pelayanan SPM tahun 2025 yang tidak terserap secara maksimal, yang pertama anggaran dari Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin hanya terserap sebesar Rp175.717.100 atau 67,17% dari pagu anggaran sebesar Rp261.600.000 di karenakan banyak ibu yang akan melahirkan langsung menuju fasyankes tanpa harus tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang sudah di sediakan oleh puskesmas dan yang kedua indikator Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus yang hanya terserap 50,20%, hal ini di sebabkan ada anggaran untuk penggajian tenaga kesehatan.

4.2.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo tahun 2025, didukung oleh personil terutama dari aparaturn Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 4.2.5
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	1
2.	Strata 2	15
3.	Strata 1	249
4.	Diploma IV	89
5.	Diploma III	545
6.	Diploma I	1
7.	SLTA/Sederajat	24
8.	SLTP/Sederajat	3
9.	SD/Sederajat	4
	Jumlah	931

Selain tenaga PNS yang jumlahnya masih kurang apabila dibanding dengan jumlah sasaran SPM yang harus dilayani, maka untuk mendukung pelaksanaan SPM urusan kesehatan disetiap unit kerja juga ada tenaga yang statusnya tenaga kontrak, secara rinci jumlah tenaga kontrak yang ada pada Dinas Kesehatan dan UPT nya adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah Tenaga Kontrak Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Dinas Kesehatan	8
2	UPTD Labkesda	1
3	Puskesmas Wadaslintang 1	4
4	Puskesmas Wadaslintang 2	2
5	Puskesmas Kepil 1	4
6	Puskesmas kepil 2	3
7	Puskesmas Sapuran	5
8	Puskesmas Kalibawang	6
9	Puskesmas Kaliwiro	16
10	Puskesmas Leksono 1	1
11	Puskesmas Leksono 2	2
12	Puskesmas Sukoharjo 1	0
13	Puskesmas Sukoharjo 2	0
14	Puskesmas Selomerto 1	11
15	Puskesmas Selomerto 2	3
16	Puskesmas Kalikajar 1	7
17	Puskesmas Kalikajar 2	8
18	Puskesmas Kertek 1	5
19	Puskesmas Kertek 2	8
20	Puskesmas Wonosobo 1	3
21	Puskesmas Wonosobo 2	4
22	Puskesmas Watumalang	9
23	Puskesmas Mojotengah	12
24	Puskesmas Garung	4
25	Puskesmas Kejajar 1	3
26	Puskesmas Kejajar 2	2
	Jumlah	131

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2.6
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal	Masih adanya petugas pelaksana teknis dilapangan / puskesmas yang belum memahami secara detail tentang aturan atau definisi operasional dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan kurangnya koordinasi antar lintas program dan sektoral.	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan SPM terhadap pelaksana teknis dilapangan dalam pelayanan SPM yang sesuai dengan aturan atau SOP yang sudah di tentukan oleh kementerian kesehatan.
		Kurangnya komitmen dari tenaga pelaksana teknis pelayanan SPM bidang kesehatan yang berada di Unit Pelaksana Teknis (Puskesmas) sebagai ujung tombak pelayanan. Jumlah tenaga kesehatan yang ada dibandingkan dengan jumlah sasaran yang harus dilayani tidakimbang.	Melakukan Pemerataan tenaga dengan pemenuhan kekurangan tenaga kesehatan yang diperlukan pada unit-unit kerja yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Adapun status tenaga kesehatan bisa berupa PNS maupun tenaga dengan perjanjian kerja.
		Pelaporan yang masih terkendala dengan masih adanya petugas pelaksana yang salah mengartikan definisi operasional pelayanan SPM sehingga menjadikan terhambatnya pelaporan untuk dilakukan analisis data.	Meningkatkan kapasitas petugas pelaksana SPM di Puskesmas dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal terutama terkait sistem pencatatan dan pelaporan data SPM bidang kesehatan.
II	Eksternal	Kurang nya kesadaran dari masyarakat terhadap pelayanan SPM sehingga mempengaruhi capaian pelaksanaan pelayanan SPM dan Penerapan SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dari sisi kebijakan (regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran terutama untuk pemenuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan SPM bidang kesehatan.	Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pelayanan yang berkaitan dengan SPM dan pengintegrasian program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penerapan dan pencapaian SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian, maka pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan SPM bidang kesehatan dapat terpenuhi.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Wonosobo secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelayanan Dasar di Urusan Pekerjaan Umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3.1
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	680	Setiap Tahun	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	170	pertahun	1.100.000.000
					Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	170		
					Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang	-		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM			
					Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau	-		
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	600	Setiap Tahun	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah	25	pertahun	2.815.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Domestik			
					Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	125		
					Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	-		
					Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah	-		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo, 2025

4.3.3. Realisasi Hasil Capaian SPM

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.2
Realiasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Th. 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	680	680	100	1.100.000.000	1.094.364.749	99,49 %
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	600	600	100	2.815.000.000	2.798.815.335	99,43 %

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				100
		Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
	Jumlah Penerima Layanan Dasar s.d	5.000	680	4320	

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	kondisi saat ini				
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
	Jumlah Yang dilayani	680	680	0	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	170	170	-	100
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	170	170	-	100
3	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	-	-	-	100
4	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	-	-	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik				100
		Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
	Jumlah Penerima Layanan Dasar s.d kondisi saat ini	600	600	-	
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Pelayanan Dasar		Yang Belum Terlayani	Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
	Jumlah Yang dilayani	600	600	0	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi			Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	25	25	-	100
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	125	125	-	100
3	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja	-	-	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota				
4	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	-	-	-	100

Tabel 4.3.3
Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100	Tuntas Paripurna
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	Tuntas Paripurna
	IP Total	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, 2025

Keterangan:

Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

100 : Tuntas Paripurna

90 – 99 : Tuntas Utama

80 – 89 : Tuntas Madya

70 – 79 : Tuntas Pratama

60 – 69 : Tuntas Muda

< 60 : Belum Tuntas

Untuk indikator SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari jenis layanan mutu Jaringan Bukan Perpipaan, di Kabupaten Wonosobo tidak ada jaringan air minum bukan perpipaan.

2 indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum mencapai kategori Tuntas Paripurna untuk Indeks Pencapaian (IP) SPM Tahun 2025.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Dalam mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum, pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.915.000.000 yang bersumber dari APBD, dan direalisasikan sebesar Rp3.893.180.104 atau 99,44 %.

Tabel 4.3.4
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	-	1.100.000.000	-
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	-	2.815.000.000	-

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Wonosobo tahun 2025, didukung oleh personil terutama dari aparaturnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Tabel 4.3.5
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2	1
3.	Strata 1	16
4.	Diploma IV	1
5.	Diploma III	3
6.	Diploma II	-
7.	SLTA/Sederajat	2
8.	SLTP/Sederajat	2
9.	SD/Sederajat	-
	Jumlah	25

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3.6
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
1	Penganggaran	Selisih/kesenjangan antara kebutuhan pembangunan Air Minum dan Sanitasi dengan ketersediaan dana yang terbatas	Pengusulan anggaran yang mencukupi
II	Eksternal		
1	Pengelolaan Paska Kegiatan	Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi di tingkat desa masih belum optimal (kepengurusan, kelembagaan dan administrasi)	Pembinaan dan pengelolaan secara berkelanjutan

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di

Kabupaten Wonosobo secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Pelayanan Dasar di Urusan Sosial yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.1

Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	25	pertahun	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	pertahun	538.956.800
					Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	16		
					Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	9		
					Pemukiman Kembali bagi korban bencana	0		
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	pertahun	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	pertahun	104.874.580
					Subsidi uang sewa	0		
					Penyediaan rumah layak huni	0		

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, 2025

4.4.3. Realisasi Hasil Capaian SPM

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.2

Realiasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	25	25	100	538.956.800	538.813.500	99,97
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	1	1	100	104.874.580	104.126.168	99,29

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100	
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80	
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)	
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	Jumlah Yang dilayani	25	25	-	100	
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20	
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	16	16	-		100
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	9	9	-		100
3	Pemukiman Kembali bagi korban bencana.	-	-	-		-
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-		-

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah				100
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	-	-	-	-

B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	-
2	Subsidi uang sewa	-	-	-	-
3	Penyediaan rumah layak huni	-	-	-	-

Tabel 4.4.3

Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	100	Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	100	Tuntas Paripurna
	IP Total	100	Tuntas Paripurna

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, 2025

Keterangan:

Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

100 : Tuntas Paripurna
90 – 99 : Tuntas Utama
80 – 89 : Tuntas Madya
70 – 79 : Tuntas Pratama
60 – 69 : Tuntas Muda
< 60 : Belum Tuntas

2 Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencapai kategori Tuntas Paripurna untuk Indeks Pencapaian (IP) SPMnya.

Untuk indikator SPM Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, capaiannya 100% karena sudah dilakukan tahapan pendataan maupun edukasi kepada masyarakat terdampak bencana, tetapi tidak terlaksana kegiatan relokasi karena beberapa hal, antara lain :

1. Tidak ada kegiatan relokasi (pengadaan tanah relokasi);
2. Masyarakat tidak bersedia untuk direlokasi;
3. Tidak tersedianya lahan potensial untuk relokasi;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpindah ke lokasi yang aman.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Dalam mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp643.831.380 yang

bersumber dari pendanaan APBD, terdiri dari kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp104.874.580 dan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp538.956.800 Berdasarkan alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, direalisasikan sebesar Rp642.939.668 atau 99,86 %.

Tabel 4.4.4

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	-	538.956.800	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	-	104.874.580	-

4.4.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Wonosobo tahun 2025, didukung oleh personil terutama dari aparaturnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebagai berikut :

Tabel 4.4.5

Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2	-
3.	Strata 1	15
4.	Diploma IV	-
5.	Diploma III	3
6.	Diploma II	-
7.	SLTA/Sederajat	-
8.	SLTP/Sederajat	-
9.	SD/Sederajat	-
	Jumlah	18

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4.6
Hambatan dan Tantangan Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Internal	Penghitungan kebutuhan didasarkan pada kemampuan APBD Kabupaten, sehingga tidak semua usulan bisa tertangani.	Perlu disusun skala prioritas.
2	Eksternal	Calon penerima tidak bisa diverifikasi karena bencana tidak bisa diprediksi	Perlu sinkronisasi data lintas instansi

4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo secara teknis dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelayanan Dasar di Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5.1
Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1	Setiap Tahun	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	Pertahun	3.106.948.646
					Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Anggaran Rp.
					Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	20	
					Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	17	
					Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	7	
					Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material	1	
	Pelayanan		41.337	Orang/	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		26.130.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
2	Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Tahun	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	1	Dokumen	
					b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	1	Dokumen	
					2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana			
					1). Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana			
					a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	20	Eksemplar	
					b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	20	Desa	
					c. Tersedianya Narasumber / Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	5	Orang	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					Anggaran Rp.	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target		Batas Capaian
					d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	10	Orang	
					2). Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia			
					a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	1	Media	
					b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	12	Buah	
					c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	1	unit	
					d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	2	Orang	
					e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	1	Orang	
					3).Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik			
					a. Tersedianya Rambu	10	buah	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)			
					b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	5	buah	
					c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	5	orang	
					d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	5	orang	
					e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	1	Orang	
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.377	Setiap Tahun	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			298.783.340
					a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	1	dokumen	
					b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	1	dokumen	
					2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)			
					3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi			
					1). Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	paket	
					b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	paket	
					c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	buah	
					d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	paket	
					e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	5	orang	
					f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	10	Orang	
					2). Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara			
					a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	paket	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	paket	
					c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	buah	
					d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	5	orang	
					e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	10	Orang	
					4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					1). Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)			
					a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	dokumen	
					b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	paket	
					c. Tersedianya Penyelenggara simulasi	10	Orang	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)			
					2) . Gladi Lapang			
					a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	1	dokumen	
					b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	paket	
					c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	10	orang	
					5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					1). Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	365	hari	
					b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan	4	pertemuan	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					kebutuhan)			
					c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1	orang	
					d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	3	orang	
					e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	15	Orang	
					2). Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana			
					a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	5	unit	
					b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	1	unit	
					c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1	unit	
					d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	Unit	
					3). Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	1	paket	
					b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	1	Paket	
					4). Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat			
					a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	1	paket	
					b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	1	paket	
					6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai	1	paket	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					dengan kebutuhan)			
					b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	1	paket	
					c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	1	paket	
					d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	10	Unit	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	501	Setiap tahun	1. Respon Cepat Darurat Bencana			761.117.186
					a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	219	Dokumen	
					b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	15	Orang	
					2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			
					a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	paket	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					Anggaran Rp.	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target		Batas Capaian
					b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	10	unit	
					c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	5	unit	
					d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	dokumen	
					e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	219	dokumen	
					f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	15	orang	
					g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi	3	orang	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)			
					h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	15	orang	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	146	Setiap Tahun	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	48	Layanan	1.947.375.600
					2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2	Dokumen	
					3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	200	Unit	
					4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam	8	Orang	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					kebakaran dan penyelamatan /Sumber Daya Manusia			
				5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	68	orang		
				6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	68	orang		

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo, 2025

4.5.3. Realisasi Hasil Capaian SPM

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5.2
Realiasi Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	100	3.106.948.646	3.057.956.209	98,42
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	41.337	41.337	100	26.130.000	24.607.260	94.17
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	3.377	3.377	100	298.783.340	268.526.3178	89.87
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	501	501	100	761.117.186	733.793.778	96.41
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	146	146	100	1.947.375.600	1.934.556.724	98.11

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum				100
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	1	1	0	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	-	-	-	-
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	-	-	-	-
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	17	17	-	100
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	20	20	-	100
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	7	7	-	100
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				100
A.	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Penerima Layanan Dasar s.d kondisi saat ini	41.337	41.337	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana				
	a. Tersedianya Dokumen	1	1	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta				
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	1	1	-	100
2.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana				
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	20	20	-	100
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	20	20	-	100
	c. Tersedianya Narasumber/ Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	-	100
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	-	100
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia				
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	-	100
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	-	100
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	-	100
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai	5	5	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	dengan kebutuhan)				
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	-	100
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	-	100
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100
A.	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Penerima Layanan Dasar s.d kondisi saat ini	3.377	3.377	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	1	1	-	100
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	1	1	-	100
2.	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)				
3.	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi				
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur				
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai	5	5	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	dengan kebutuhan)				
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	-	100
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	-	100
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	-	100
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)				
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	-	100
	2) . Gladi Lapang				
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	-	100
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	365	365	-	100
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	-	100
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1	1	-	100
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	-	100
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	15	15	-	100
2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana					
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	-	100
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast					
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	b. Tersedianya Teknologi Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat					
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat	1	1	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)				
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana				100
A.	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Penerima Layanan Dasar s.d kondisi saat ini	501	501	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Respon Cepat Darurat Bencana				
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	219	219	-	100
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	15	15	-	100
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan	10	10	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	kebutuhan)				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	-	100
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	-	100
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	219	219	-	100
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	15	15	-	100
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	-	100
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	15	15	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				100
A.	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Penerima Layanan Dasar s.d kondisi saat ini	146	146	-	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan	48	48	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	penyelamatan dan evakuasi				
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2	2	-	100
3	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	200	200	-	100
4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	8	8	-	100
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	68	68	-	100
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	68	68	-	100

Tabel 4.5.3

Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	100	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100	Tuntas Paripurna
	IP Total	100	Tuntas Paripurna

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Wonosobo, 2025

Keterangan:

Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

100 : Tuntas Paripurna

90 – 99 : Tuntas Utama

80 – 89 : Tuntas Madya

70 – 79 : Tuntas Pratama

60 – 69 : Tuntas Muda

< 60 : Belum Tuntas

Urusan Trantibumlinmas untuk Indeks Pencapaian (IP) SPM 5 indikator mencapai kategori Tuntas Paripurna.

Pada Indikator Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Mutu Layanan Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian Materiil dan Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan tidak terpenuhi, karena tidak ada Warga Negara yang terkena dampak dari pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dimaksud, sehingga untuk capaian tetap 100%.

4.5.4. Alokasi Anggaran

Dalam mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibumlinmas, pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp6.140.354.772 dengan sumber pendanaan dari APBD, dan direalisasikan sebesar Rp6.019.440.288 atau 98,03%.

Tabel 4.5.4
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		3.106.948.646	
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		26.130.000	
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		298.783.340	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana		761.117.186	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran		1.947.375.600	

4.5.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Wonosobo tahun 2025, didukung oleh personil terutama dari aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.5.5
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2	5
3.	Strata 1	38
4.	Diploma IV	1
5.	Diploma III	7
6.	Diploma II	-
7.	SLTA/Sederajat	50
8.	SLTP/Sederajat	6
9.	SD/Sederajat	4
	Jumlah	111

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5.6
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Personil dan sarpras	Jumlah SDM dan sarpras penanganan kebakaran yang masih terbatas sehingga belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo	Penambahan Pos Damkar beserta Sarana Prasarannya.

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Urusan Sosial di Kabupaten Wonosobo secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pelayanan Dasar di Urusan Sosial yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6.1
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	300	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	50		18.750.000
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	5		15.000.000
					Penyediaan permakanan	100		17.500.000
					Penyediaan sandang	100		5.260.000
					Penyediaan alat bantu	50		8.200.000
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan	75		20.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					sosial			
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	240		140.500.000
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	10		2.814.570
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan Kesehatan	10		5.427.500
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10		4.000.000
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10		5.499.500
					Layanan rujukan	30		18.750.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	593	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	20	Pertahun	15.000.000
					Penyediaan permakanan	593		17.500.000
					Penyediaan sandang	10		5.260.000
					Penyediaan layanan kedaruratan/la yanan reaksi cepat	5		8.200.000
					Pemberian bimbingan	50		20.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	
					fisik, mental, spiritual		
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	30	140.500.000
					Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	5	2.814.570
					Akses ke layanan pendidikan	20	5.427.500
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	4.000.000
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	5.499.500
					Layanan rujukan	10	18.750.000
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	77	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	20	16.213.740
					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	5	9.100.000
					Penyediaan permakanan	50	17.500.000
					Penyediaan sandang	50	5.250.000
					Penyediaan alat bantu	30	46.961.500
					Penyediaan	5	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					perbekalan kesehatan			
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	20		16.782.900
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlanter	20		142.500.000
					Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	10		2.500.000
					Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	10		5.427.500
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10		4.000.000
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10		5.499.500
					Layanan rujukan	10		18.750.000
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	60	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	50	Pertahun	15.000.000
					Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	10		12.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Anggaran Rp.
					Penyediaan permakanan	75	17.500.000
					Penyediaan sandang	75	5.250.000
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	10	15.000.000
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	10	140.500.000
					Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	10	2.500.000
					Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	10	5.427.500
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	6.500.000
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	5.499.500
					Layanan rujukan	10	18.750.000
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	314	Setiap Tahun	Penyediaan permakanan	100	Pertahun 55.880.684
					Penyediaan sandang	100	24.400.000
					Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	
					Penanganan khusus bagi	50	6.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					kelompok rentan			
Pelayanan dukungan Psikososial	50							

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, 2025

4.6.3. Realisasi Capaian SPM

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6.2
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	300	300	100	1.066.009.466	981.429.981	92,07
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	593	593	100			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	100	100			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	50	50	100			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	314	314	100	89.779.684	87.009.800	97,12

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti				100
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang	Jumlah Yang	Yang Belum	

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
		Harus Dilayani	Terlayani	Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	300	300	0	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Layanan data dan pengaduan	50	50	-	100
2	Penyediaan permakanan	100	100	-	100
3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	5	5	-	100
4	Penyediaan sandang	100	100	-	100
5	Penyediaan alat bantu	50	50	-	100
6	Penyediaan perbekalan Kesehatan	6	6	-	100
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	75	75	-	100
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	240	240	-	100
9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	10	10	-	100
10	Akses ke layanan Pendidikan	10	10	-	100
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	-	100
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	-	100
13	Layanan rujukan	30	30	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti				100
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	593	593	0	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Layanan data dan pengaduan	20	20	-	100
2	Penyediaan layanan	5	5	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	ke darurat/layanan reaksi cepat				
3	Penyediaan permakanaan	593	593	-	100
4	Penyediaan sandang	10	10	-	100
5	Penyediaan perbekalan Kesehatan	10	10	-	100
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	50	50	-	100
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	30	30	-	100
8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	5	5	-	100
9	Akses ke layanan Pendidikan	20	20	-	100
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	-	100
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	-	100
12	Layanan rujukan	10	10	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti				100
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	100	100	0	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Layanan data dan pengaduan	20	20	-	100
2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	5	5	-	100
3	Penyediaan permakanan	50	50	-	100
4	Penyediaan sandang	50	50	-	100
5	Penyediaan alat bantu	30	30	-	100
6	Penyediaan perbekalan Kesehatan	5	5	-	100
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	20	20	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlanjar	20	20	-	100
9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	10	10	-	100
10	Akses ke layanan Pendidikan	10	10	-	100
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	-	100
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	-	100
13	Layanan rujukan	10	10	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Soaial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti				100
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	50	50	0	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Layanan data dan pengaduan	50	50	-	100
2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	10	10	-	100
3	Penyediaan permakanan	75	75	-	100
4	Penyediaan sandang	75	75	-	100
5	Penyediaan perbekalan Kesehatan	10	10	-	100
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	10	10	-	100
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	10	10	-	100
8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta	10	10	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak				
9	Akses ke layanan Pendidikan	10	10	-	100
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	-	100
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	-	100
12	Layanan rujukan	10	10	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Soaial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti				100
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	50	50	0	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Layanan data dan pengaduan	50	50	-	100
2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	10	10	-	100
3	Penyediaan permakanan	75	75	-	100
4	Penyediaan sandang	75	75	-	100
5	Penyediaan perbekalan Kesehatan	10	10	-	100
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	10	10	-	100
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	10	10	-	100
8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	10	10	-	100
9	Akses ke layanan Pendidikan	10	10	-	100
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	-	100
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
12	Layanan rujukan	10	10	-	100

No.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten.				100
A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Penerima Layanan Dasar			Persentase (4:3 x 100%)
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang dilayani	100	100	0	100
B	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
No.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Persentase (4:3 x 100%)
1	Penyediaan permakanan	100	100	-	100
2	Penyediaan sandang	100	100	-	100
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	-	100
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	50	50	-	100
5	Pelayanan dukungan Psikososial	50	50	-	100

Tabel 4.6.3
Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	Tuntas Paripurna
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100	Tuntas Paripurna
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	100	Tuntas Paripurna
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	100	Tuntas Paripurna
	IP Total	100	Tuntas Paripurna

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, 2025

Keterangan:

Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

100 : Tuntas Paripurna

90 – 99 : Tuntas Utama

80 – 89 : Tuntas Madya

70 – 79 : Tuntas Pratama

60 – 69 : Tuntas Muda

< 60 : Belum Tuntas

4.6.4. Alokasi Anggaran

Dalam mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial, pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran APBD Kabupaten Wonosobo sebesar Rp1.155.789.150 dan direalisasikan sebesar Rp1.068.439.781 atau 92,44%.

Tabel 4.6.4
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		1.066.009.466	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan engemis di luar panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten		89.779.684	

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, 2025

Dalam pemenuhan pelayanan ke masyarakat, pendanaan dibantu oleh anggaran APBN Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Kabupaten Wonosobo hanya sebagai lokus pemberian bantuan, melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berkoordinasi dan pendampingan proses penyaluran kepada masyarakat.

Pada Tahun 2025 telah disalurkan beberapa program bantuan berupa Program Atensi Kewirausahaan Dissabilitas Berat dan Lanjut Usia terlantar sebanyak 125 orang, serta Bantuan Kebencanaan dengan total 198 orang.

4.6.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Urusan Sosial di Kabupaten Wonosobo tahun 2025, didukung oleh personil terutama dari aparaturnya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- PNS: 6 orang
- PPPK: 2 orang
- PPPK PW: 20 orang

Tabel 4.6.5
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2	2 orang
3.	Strata 1	16 orang
4.	Diploma IV	-
5.	Diploma III	-
6.	Diploma II	-
7.	SLTA/Sederajat	10 orang

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
8.	SLTP/Sederajat	-
9.	SD/Sederajat	-
	Jumlah	28 orang

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6.6
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Internal	Dalam audit, masalah utama bukanlah "tidak bekerja", tapi "tidak ada bukti". Foto kegiatan, daftar hadir, dan Berita Acara Penyerahan seringkali hilang atau tidak lengkap terutama terkait dengan pemberian bimbingan fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penguatan SOP dalam proses pemberian layanan
2		Input Data Tim Teknis: Petugas lapangan (pekerja sosial/penyuluh sosial) seringkali lebih fokus pada pelaksanaan layanan daripada pendokumentasian secara administratif untuk laporan sehingga data yang tersaji seringkali tidak sesuai dengan beban kerja di lapangan	Penguatan SOP dalam proses pemberian layanan

Secara keseluruhan, Nilai Indeks Pencapaian (IP) Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wonosobo Tahun **2025** yaitu **99,79%**.

4.7. Program dan Kegiatan

4.7.1. Urusan Pendidikan

Program dan Kegiatan dalam penerapan SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.7.1
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	23.361.260.928
1	Pendidikan Anak Usia Dini		
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	4.024.690.000
		Angka Partisipasi Sekolah	
		a. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-
		b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	33.400.000
		c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.360.800.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
		bagi Satuan PAUD	
		d. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	53.240.000
		e. Pembangunan Ruang Kelas Baru	550.000.000
		f. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-
		g. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-
		Kekhususan PAUD	
		i. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	50.000.000
		i. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	-
		i. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	678.250.000
		v. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	94.000.000
		v. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-
		i. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-
		i. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	135.000.000
		i. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-
		x. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	70.000.000
2	Pendidikan Dasar		
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	11.730.373.728
		Angka Partisipasi Sekolah	
		a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-
		b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	2.344.240.728
		c. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	190.000.000
		d. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	643.783.000
		e. Pembangunan Ruang Kelas Baru	810.000.000
		f. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.850.000.000
		Literasi	
		a. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	275.000.000
		b. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.195.900.000
		c. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	177.700.000
		d. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-
		e. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-
		f. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-
		g. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.000.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
		h. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-
		i. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.030.000
		j. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	75.000.000
		Numerasi	
		a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	1.195.900.000
		b. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	177.700.000
		c. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-
		d. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-
		e. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.000.000
		f. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	75.000.000
		g. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-
		h. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	275.000.000
		i. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-
		j. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.030.000
		Keamanan	
		a. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-
		b. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.030.000
		c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	61.666.667
		d. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	58.333.333
		Kebhinekaan	
		a. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-
		b. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.030.000
		c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	61.666.667
		d. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	58.333.333
		Inklusifitas	
		a. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-
		b. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.030.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
		c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	61.666.667
		d. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	53.333.333
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	
		Angka Partisipasi Sekolah	
		a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-
		b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	850.000.000
		c. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.523.329.200
		d. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	146.766.000
		e. Pembangunan Ruang Kelas Baru	300.000.000
		f. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	293.500.000
		Literasi	
		a. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	364.000.000
		b. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	770.267.500
		c. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	65.833.500
		d. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-
		e. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-
		f. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-
		g. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.800.000
		h. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	62.500.000
		i. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	51.000.000
		j. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-
		Numerasi	
		a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	770.267.500
		b. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	65.833.500
		c. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-
		d. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.800.000
		e. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-
		f. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	62.500.000
		g. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
		Peserta Didik	
		h. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	364.000.000
		i. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-
		j. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	51.000.000
		Keamanan	
		a. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-
		b. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	51.000.000
		c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	166.666.667
		d. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	33.333.333
		Inklusifitas	
		a. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-
		b. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	51.000.000
		c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	166.666.667
		d. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	33.333.333
3	Pendidikan Kesetaraan		
		Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	72.800.000
		Angka Partisipasi Sekolah	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	72.800.000

4.7.2. Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan dalam penerapan SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.7.2
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3,829,332,560
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	3,829,332,560

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2,167,777,840
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	261,600,000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	184,182,000
4	Pelayanan kesehatan balita	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14,783,100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	449,860,950
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	106,070,000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13,027,580
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	21,700,000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	40,302,520
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	197,851,750
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	249,476,820
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	122,700,000

4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan dalam penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.7.3
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.100.000.000
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000
		a. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	110.000.000
		b. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	990.000.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	19.501.497.000
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.501.497.000
		a. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	528.000.000
		b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	225.000.000
		c. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.992.000.000
		d. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	70.000.000

4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan Kegiatan dalam penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.7.4
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	Program Pengembangan Perumahan	538.956.800
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	538.956.800
		a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	221.780.160
		b. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	317.176.640
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Program Pengembangan Perumahan	104.874.580
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	104.874.580
		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	104.874.580

4.7.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan dalam penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.7.5
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	Trantibum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.106.948.646
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.585.383.101
		a. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1.253.405.580
		b. Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	5.215.000
		c. Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	800.216.521
		d. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	516.546.000
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	521.565.545
		a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.750.000
		b. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	9.175.000
		c. Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	6.067.500
		d. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14.225.000
		e. Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	18.310.520
		f. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	467.037.525
	Kebencanaan	Program Penanggulangan Bencana	1.086.030.526

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	26.130.000
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	26.130.000
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	298.783.340
		a. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	46.993.932
		b. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	138.605.536
		c. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	4.819.980
		d. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	24.544.000
		e. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	53.819.892
		f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	30.000.000
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	750.580.000
		a. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	465.860.000
		b. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	84.720.000
		c. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	200.000.000
		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	10.537.186
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	10.537.186
	Pemadam Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan penyelamatan Non Kebakaran	1.947.375.600
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.885.240.000
		a. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	35.240.000
		b. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.850.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	29.032.600
		a. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	11.055.000
		b. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	17.977.600

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	33.103.000
		Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	33.103.000

4.7.6. URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan dalam penerapan SPM Urusan Sosial di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.7.6
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		Program Rehabilitasi Sosial	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.066.009.466
		a. Penyediaan Permakanan	70.000.000
		b. Penyediaan Sandang	21.010.000
		c. Penyediaan Alat Bantu	93.923.000
		d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	21.998.000
		e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	71.782.900
		f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	563.557.256
		g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10.414.570
		h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	21.710.000
		i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	61.713.740
		j. Pemberian Layanan Kedaruratan	36.400.000
		k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	18.500.000
		l. Pemberian Layanan Rujukan	75.000.000
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	89.779.684
		a. Penyediaan Makanan	55.880.684
		b. Penyediaan Sandang	24.400.000
		c. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.000.000
		d. Pelayanan Dukungan Psikososial	3.499.000

BAB V

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dikemas dalam arah kebijakan yang ditujukan untuk "Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah" yang merupakan perencanaan keempat dalam periode RPJMD 2021-2026 sekaligus sebagai tahap implementasi RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2025 Tahap Keempat (2021-2025) yaitu "Pengembangan Kegiatan Pembangunan Di Semua Bidang, Dengan Arah Kebijakan Pada Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Output Yang Berupa Pelayanan Publik Dan Produksi Daerah".

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian Kinerja Makro Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, dari 70,63 di tahun 2024, menjadi 71,50 di tahun 2025;
- Angka Kemiskinan mengalami penurunan dari 15,28% di tahun 2024, menjadi 13,34% di tahun 2025;
- Angka Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2024 sebesar 4,02%, mengalami penurunan menjadi 3,99% di tahun 2025;
- Pertumbuhan Ekonomi dari sebesar 4,57% di tahun 2024, mengalami peningkatan menjadi 5,02% di tahun 2025;
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Wonosobo meningkat dari 27,19 Juta Rupiah di tahun 2024 menjadi 28,72 Juta Rupiah di tahun 2025; dan
- Ketimpangan Pendapatan yang diukur melalui Gini Rasio menunjukkan perbaikan, dari 0,334 pada tahun 2024 menjadi 0,375 pada tahun 2025.

Secara prinsipil dapat disimpulkan bahwa roda penyelenggaraan pemerintahan dan akselerasi pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo tetap berjalan secara optimal. Capaian kinerja program tahun 2025 merupakan representasi nyata dari seluruh artikulasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang senantiasa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Keberhasilan yang diraih merupakan manifestasi sinergitas, efisiensi, serta efektivitas pembangunan yang melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mendukung visi pembangunan daerah.

Kendati demikian, disadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target secara maksimal. Hal ini menjadi catatan strategis serta tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan performa kerja di masa mendatang. Seluruh pencapaian maupun diskrepansi yang ada akan dijadikan bahan evaluasi komprehensif guna melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) demi tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Wonosobo yang lebih transformatif.

Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh elemen pemerintahan daerah dan masyarakat atas partisipasi aktif yang didukung oleh optimalisasi APBD serta sektor strategis lainnya. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyadari bahwa dukungan, masukan, dan peran serta masyarakat adalah pilar utama dalam keberlanjutan pembangunan. Kedepannya, keberhasilan ini diharapkan menjadi stimulan untuk mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Sebagai penutup, guna mengeliminasi kekurangan yang ada, diperlukan penguatan komitmen serta kolaborasi yang lebih erat antar seluruh lini. Sinergitas kolektif adalah kunci utama dalam memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan lebih maksimal, akuntabel, dan memberikan dampak luas bagi kemaslahatan masyarakat.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, dengan harapan semoga kinerja pembangunan di Kabupaten Wonosobo semakin baik dan memiliki manfaat yang luas bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan, dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan visi **"Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil, dan Makmur."**